

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 15.000,-

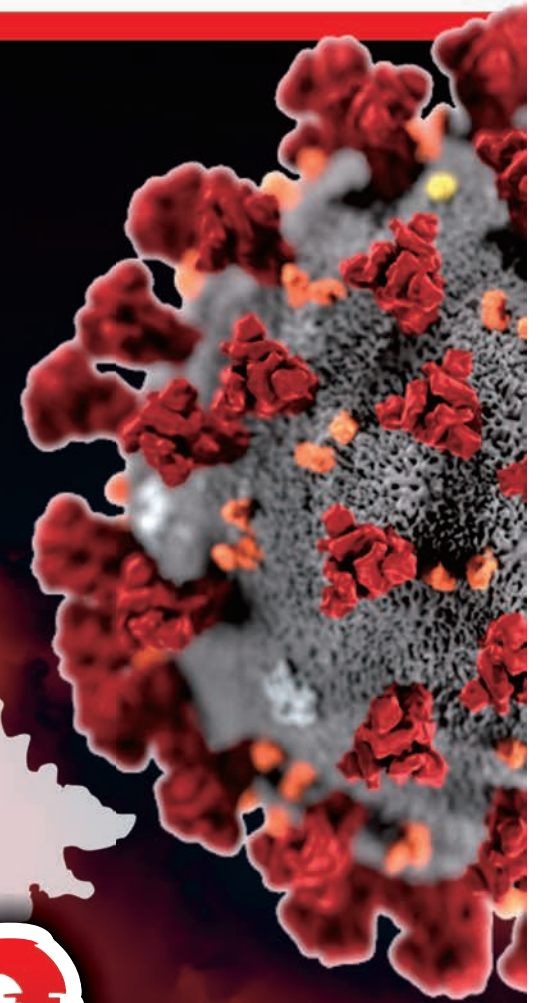
Edisi 263
9 - 22 Sya'ban 1441 H
3 - 16 April 2020

Media ^{t a b l o i d}umat

mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam

CORONA SERANG INDONESIA, REZIM BISA APA?



■ FOKUS

Shalat Jumat
dan Jamaah
Saat Pandemi

■ NASIONAL

Remembering Khilafah 2020
Khilafah Ajaran Islam
yang Wajib Diperjuangkan

■ WAWANCARA

Hermawan Saputra,
Tim Satgas Covid-19 IAKMI
Diprediksikan April-Mei Puncak
Wabah Corona di Indonesia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Alhamdulillah, semoga para pembaca semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Aamiin

Pembaca yang dirahmati Allah, dalam suasana wabah yang melanda negeri ini, semoga kita semua diberi kesabaran oleh Allah SWT. Memang ini bukan hal yang mudah, tapi ini adalah hal yang terjadi di hadapan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita berkomunikasi secara *face to face* terpaksa harus berhenti sementara. Demikian juga aktivitas keluar rumah pun mesti dikurangi. Bagi yang harus keluar rumah untuk bekerja, harus menambah dengan perlindungan diri.

Physical distancing yang dianjurkan pemerintah tidak bisa berlaku secara sempurna. Banyak kendala di sana-sini. Jangankan menjaga jarak, ketika pemerintah mengumumkan agar rakyat bekerja di rumah, anak sekolah belajar di rumah, yang terjadi justru sebagian masyarakat berbondong-bondong ke tempat wisata. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Faktor kesadaran masyarakat untuk berdisiplin ini menjadi faktor penghambatnya.

Di sisi lain, menghadapi masyarakat seperti ini, pemerintah tak berani mengambil opsi yang lebih tegas yakni melakukan karantina massal atau istilahnya *lockdown*. Sepertinya, negara takut terhadap konsekuensi kebijakan tersebut. Mengapa? Karena negara harus menyediakan logistik bagi rakyat khususnya bagi mereka yang berada di daerah yang dikarantina dalam selang waktu yang ditentukan. Negara tak punya uang. Lebih dari itu, dampaknya adalah perekonomian akan terhenti. Ini yang

tampaknya pertimbangan pemerintah mengesampingkan opsi *lockdown*.

Tapi anehnya, di tengah situasi wabah, rezim Jokowi masih berbicara tentang pembangunan ibu kota baru, yang akan menggantikan Jakarta. Ini sangat menyedihkan hati rakyat. Bagaimana bisa bicara pembangunan infrastruktur sementara rakyat sedang menjerit meminta bantuan, fasilitas rumah sakit minim, dan rakyat terus terkapar terserang wabah?

Pembaca yang dirahmati Allah, dalam kaitan itu pula, Media Utama kali ini kembali mengangkat isu wabah Covid-19 ini. Semua orang sekarang sedang bicara virus corona. Dari rakyat kecil sampai para pembesar. Bahkan dunia internasional menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia. Setiap hari ada pernyataan dari para pengamat, dan para ahli tentang penanganan wabah corona ini di Indonesia. Dan hampir semuanya prihatin atas kebijakan pemerintah. Bahkan di dalam negeri sendiri, tim medis berbicara sangat keras kepada pemerintah agar mereka dibantu, dilindungi. Mengapa pemerintah terlihat lamban padahal sudah diperingatkan oleh WHO sekalipun? Adakah yang disembunyikan oleh pemerintah? Tak lupa, kami juga akan menyertakan bagaimana Islam memandang masalah ini dan menyelesaikannya.

Pembaca yang dirahmati Allah, untuk memperkuat Media Utama, Fokus kali ini pun masih membahas masalah corona. Khususnya terkait dengan ibadah bagi kita kaum Muslim. Ini banyak silang pendapat dan pertanyaan. Harus seperti apa?

Akhirnya, mari kita senantiasa memohon kepada Allah SWT agar wabah ini segera diangkat dari negeri ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah segera menolong kita dengan tegaknya syariahnya di muka bumi ini. Aamiin

Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA

Tuntunan Islam

Penyebaran virus corona Covid-19 yang massif menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar. Hal itu karena virus corona jenis baru ini disebut bisa menyebabkan kematian. Virus ini kemudian menular antar manusia melalui tetesan cairan pernapasan tubuh melalui tangan atau permukaan padat. Lalu, orang sehat yang tangannya terkontaminasi bisa terinfeksi bila memegang mulut, hidung atau matanya.

Rasulullah juga memberi tuntunan untuk melakukan isolasi atau *lockdown* atas wilayah yang terkena wabah. Penduduk wilayah yang terserang wabah seperti Indonesia juga dianjurkan untuk berdiam diri di rumah atau *stay at home*, tidak keluar kecuali untuk keperluan yang sangat penting, seraya bersabar dan mengarang ridha dan perlindungan Allah SWT.

Dengan kacamata keimanan, kita mampu melihat musibah ini sebagai pelajaran serta renungan. Karena Covid-19, banyak tempat-tempat maksiat ditutup. Manusia sadar bahwa hidup hanya sebentar sebab kematian jelas di depan mata. Jika kita menggunakan keimanan sebagai sudut pandang dalam menyikapi segala persoalan, akan kita dapati betapa kita tidak ada apa-apanya. Makhluq Allah SWT yang berukuran sangat kecil bernama virus mampu menggemparkan seluruh manusia di muka bumi. Covid-19, *Invisible army* yang mampu menggemparkan dunia tanpa senjata. Lantas apa yang pantas untuk kita sombongkan? Innalillah. **Selli Tiolita Hasibua.Bogor. 081213023xxx**

Wacana di Rumah Saja

Pemerintah Indonesia mengimbau agar masyarakat tetap di rumah. Mungkin kalau di kota metropolitan wacana tersebut sudah sangat dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, beda dengan masyarakat yang tinggal di pelosok desa yang notabene mereka harus bertani/membantu si pemilik sawah (bercokok tanam).

Masyarakat di pelosok desa kebingungan apakah harus ke sawah dari pagi hingga siang dengan gaji kurang lebih Rp. 20.000 atau memilih diam di rumah karena imbauan pemerintah. Faktanya di tempat tinggal saya belum ada bantuan dari pemerintah berupa sembako untuk masyarakat yang berdiam di rumah. Sehingga hal ini membuat masyarakat tetap bekerja/ke sawah meskipun virus corona bergentayangan di penjuru Indonesia.

Tidaklah umat semakin merindukan *khilafah 'ala minhajin nubuwwah* yang kedua? Konon dalam pemerintahan Islam umat tak perlu khawatir apakah hari ini bisa makan atau tidak? Semua dijamin oleh pemerintah. Bahkan ada salah satu khalifah yang belum bisa tidur di malam hari karena memikirkan apakah rakyatnya ada yang kelaparan. Namun di negeri ini kata "Khilafah" menjadi momok yang menakutkan. **Fitriyah, Situbondo-Jawa Timur, 085230542xxx**

Lamban

Seolah gagap dalam mengatasi virus Covid 19, tampak kelambanan dan kesan ketidakseriusan bahkan kebingungan untuk menerapkan *lockdown* atau tidak. Padahal hal tersebut sudah diserukan oleh IDI demi melihat banyaknya korban yang berjatuhan. Pemerintah malah menerapkan kebijakan yang menimbulkan masalah lain bahkan berisiko bagi nyawa rakyat, semisal *rapid test*, *social distancing*, obat klorokuin dan Avigan yang ternyata masih dalam tahap uji coba untuk resmi dinyatakan sebagai obat Covid-19, hingga *herd immunity* yang kontroversial. Kesemua kebijakan tersebut benar-benar menunjukkan kapasitas pemimpin yang tidak *qualified* dan tidak amanah dalam mengurus rakyatnya.

Islam mempunyai tindakan yang tegas, dalam konteks pandemi harus diberlakukan *lockdown*. Rasulullah SAW bersabda "Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya, jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar

Live streaming Remembering Khilafah 2020: Indonesia Berkah dengan Syariah Kaffah, Rabu, (25/3/2020) di kanal Youtube Fokus Khilafah Channel. Hadir sebagai pembicara Ustadz Rokhmat Labib, Khadim Ma'had Syaraful Haramain KH Hafidz Abdurrahman dan Jubir HTI Ustadz Muhammad Ismail Yusanto. Ditayangkan pula suara pidato Amir Hizbut Tahrir Al-'Alim Al-Jalil Syaikh 'Atha' Bin Khalil Abu Ar-Rasyah.[]



MediaUmat tabloid
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Keuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Menara 88 Casablanca, Tower A.10E. Jl. Raya Casablanca No.88, Jakarta Selatan. 12870. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN



SMS/WA Media Pembaca/Komentar untuk MU: 089634912651. Sertakan Nama dan Asal daerah.

darinya".(HR.Al-Bukhari).

Ini menunjukkan harus diberlakukannya karantina/isolasi atas wilayah. Dan hal yang serupa terjadi pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Beliau pun memberlakukan karantina yang serupa, hingga wabah tidak menyebar ke mana-mana dan bisa diatasi.

Itulah gambaran penguasa yang amanah dan bertanggung jawab dalam pengurusan terhadap rakyatnya sehingga mampu melindungi rakyatnya. Penguasa sebagai pelindung dan pengurus seperti itu hanya bisa kita dapatkan dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah Islamiyyah yang atas izin Allah dalam waktu tidak akan lama lagi akan tegak. **Haova Dewi. Bojongsoang. +62 896-2611-8xxx**

Generasi Minim Literasi

Kasus pembunuhan yang dilakukan seorang gadis remaja berusia 15 tahun berinisial NF, di Sawah Besar, Jakarta Pusat, (5/3/2020) sungguh mengejutkan publik. Bagaimana tidak, gadis remaja tersebut mendatangi kantor polisi dan mengaku telah membunuh seorang balita tetangganya yang berusia 5 tahun. Menurut Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto bahwa pelaku mengakui perbuatannya secara terencana dan tidak menyesali perbuatannya bahkan pelaku mengaku puas dengan perbuatannya tersebut. Dilansir Tribun Jakarta.com (6/3/2020).

Apa yang terjadi dengan gadis remaja ini yang seolah telah hilang rasa kemanusiaannya hingga tega berbuat sadis seperti itu? Ternyata setelah polisi mendalami kasus tersebut dan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, perbuatannya dipicu karena terinspirasi film-film horor yang sering dia tonton seperti di antaranya film Chucky. Seperti yang kita tahu bahwa si Chucky ini adalah karakter sebuah boneka yang dirasuki arwah dan melakukan pembunuhan secara sadis dan licik. Banyak faktor yang menjadi penyebab kasus-kasus yang melibatkan para remaja sebagai pelakunya. Di antaranya faktor keluarga, lingkungan (masyarakat) dan negara.

Minimnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya merupakan faktor utama. Bagaimana tidak, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, anak-anak dengan mudahnya bisa mengakses konten apa saja melalui *gadget*-nya. Termasuk konten film kekerasan bahkan konten film porno. Di sini peran orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi apa saja yang anak-anak akses dalam *gadget*-nya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh anak-anak lihat.

Faktor lingkungan pun menjadi penyebab rusaknya generasi muda saat ini. Bagaimana tidak, masyarakat yang individualis yang tidak peduli dengan lingkungannya. Seharusnya masyarakat menjadi kontrol sosial bagi lingkungannya.

Apalagi peran negara sebagai institusi yang menerapkan aturan bagi warga negaranya. Minimnya peran negara dalam menjaga aktivitas informasi dan telekomunikasi untuk memfilter tontonan bagi anak-anak menjadi penyebab rusaknya generasi muda. Sistem sekuler liberal telah memberikan kebebasan tanpa batas kepada generasi muda yang pada akhirnya melahirkan generasi muda yang rusak.

Hanya kembali kepada Islamlah maka generasi akan terselamatkan. Peran negara dalam Islam sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda: "Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus" (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Islam dengan sistem pergaulannya akan menjaga generasi muda dari perbuatan yang rusak. Karena sistem Islamlah satu satunya sistem yang menjadi peradaban ramah anak. Sudah selayaknya sistem ini menjadi rujukan negara karena negara adalah institusi penerapan hukum. Wallahu a'alam bishawab. **Sri Rahayu. +62 898-3321-xxx**



Wabah Virus Corona, Kebobrokan Kapitalisme

Wabah virus Corona semakin menunjukkan kegagalan ideologi kapitalisme yang dipimpin Barat. Ideologi ini telah gagal menjaga nyawa manusia. Korban kematian akibat Covid-19 ini terus meningkat di seluruh dunia. Sampai akhir Maret, di seluruh dunia, jumlah kasus yang terkonfirmasi ada 724.565 jiwa. Dari total kasus tersebut, jumlah kematian mencapai 34.017 kasus. Pasien yang sembuh mencapai 152.076 pasien. Penyebarannya pun sudah meluas ke 199 negara, termasuk Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, sampai ditemukan cara yang paling efektif untuk menghentikan wabah ini.

Negara-negara Barat pun mulai khawatir dengan banyaknya korban di wilayah mereka. Italia bahkan menjadi negara dengan jumlah korban tertinggi di dunia. Sampai akhir Maret, korban yang meninggal menembus angka 10.000. Sementara yang positif terkena virus ini nyaris 100.000 orang. Padahal negara itu sudah menerapkan *lockdown* selama 16 hari.

Amerika Serikat juga mulai khawatir. Pada akhir Maret, jumlah korban kematian di negara Paman Sam ini mencapai 2.400 orang dan 137.000 kasus Covid-19. Dr Deborah L Birk, koordinator utama satuan tugas virus Corona Gedung Putih, menyatakan dengan tindakan pencegahan dan pembatasan ada 200 ribu berpotensi meninggal. Sementara kalau tanpa pencegahan dia memproyeksi akan ada 1,6 juta hingga 2,2 juta orang Amerika akan tewas. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan: "Pandemi Covid-19 mungkin bisa membunuh dua juta orang jika penyebarannya tidak dihentikan" (Aero News, 19/3/2020).

Sementara ekonomi dunia pun yang sebenarnya sudah melemah, semakin berat sebagai dampak dari wabah Covid-19 ini. Dalam riset bertajuk "The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19" ekonom Australian National University Warwick McKibbin dan Roshen Fernando memprediksi dampak virus corona jauh lebih buruk ketimbang flu Spanyol yang pada 1918-1919 menjadi pandemi paling mematikan sepanjang sejarah dengan menelan 40 juta korban jiwa. Dampak ekonomi Covid-19 diperkirakan bisa mencapai US\$ 2,4 triliun atau sekitar Rp 39.304 triliun. Jauh lebih besar ketimbang penyakit pernapasan akut SARS yang pada 2003 memangkas ekonomi dunia sebesar US\$ 40 miliar atau Rp 656,72 triliun.

Jumlah korban jiwa virus corona ini semakin menunjukkan bahwa ideologi kapitalisme tidaklah menghargai nyawa manusia. Dan ini bukan yang pertama. Jumlah korban jiwa akibat penjajahan Amerika secara langsung atau kebijakan Barat di dunia internasional jauh lebih besar. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang rakyat Irak terbunuh selama masa pendudukan Amerika di negara itu. Saat ini, kebijakan Barat yang dipimpin Amerika di Suriah telah menyebabkan lebih dari 300 ribu rakyat Suriah terbunuh. Barat dengan sengaja melakukan pembantaian bahkan mendukung pembantaian keji yang dilakukan rezim Bashar. Amerika dan Rusia pun terlibat langsung melakukan pembunuhan dengan pesawat-pesawat canggih dan bom-bom brutal mereka di Suriah. Belum lagi berapa korban rakyat Palestina yang dijajah Zionis Israel yang didukung penuh oleh Amerika Serikat dan sekutu Baratnya.

Sama halnya dengan kegoncangan ekonomi akibat wabah ini, sesungguhnya disebabkan karena sistem ekonomi kapitalisme yang memang sejak dari dasarnya bermasalah. Dan resesi yang melanda ekonomi dunia, bukanlah pertama kali dan bukan mustahil akan kembali berulang, dipercepat dengan virus corona ini. Ekonomi yang lebih didominasi ekonomi non riil yang berbasis riba, pasar saham, dan mata uang kertas yang tak berbasis emas dan perak, telah membuat ekonomi kapitalisme gampang berguncang.

Belum lagi sifat eksploitatif kapitalisme ini, yang hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan alam dunia ketiga termasuk dunia Islam. Sistem ini telah melahirkan manusia-manusia dan perusahaan-perusahaan rakus yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi, bahkan dibanding dengan nyawa manusia.

Sesungguhnya ini menjadi pelajaran bagi umat manusia. Ketika dunia tidak diatur dengan Islam, maka dunia akan diliputi berbagai bencana yang tak pernah berhenti. Sekaligus ini menjadi pelajaran bagi para *thagut* di negeri-negeri Islam yang selama ini selalu menjilat dan mengikuti Barat dengan ideologinya inci demi inci, meskipun harus membunuh rakyat mereka sendiri, sesungguhnya mereka sedang berlindung kepada sistem yang rapuh bagaikan sarang laba-laba. sebagaimana firman Allah SWT: "Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui." (TQS al-Ankabut [29] : 41). Wallhasil hanya Islam dengan sistem Khilafahnya yang menerapkan syariah Islam secara total akan memberikan kebaikan kepada umat manusia. Bukan yang lain. Allahu Akbar! **farid wadjudi**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com



Corona Serang Indonesia, Rezim Bisa Apa?

Apa yang terjadi di Wuhan, Cina, bisa disaksikan di Indonesia, meski tak sebanyak di sana. Orang-orang mulai bergelimpangan. Rumah sakit mulai kewalahan menangani pasien yang terduga terjangkiti Covid-19.

Tenaga medis yang jumlahnya terbatas sampai berteriak karena minimnya Alat Perlindungan Diri (APD) bagi mereka. Beberapa tenaga medis harus merengang nyawa karena tertular virus tersebut dari pasiennya.

Jumlah orang yang terjangkiti Covid-19 terus bertambah signifikan setiap hari. Anehnya, belum ada kebijakan yang cepat dan berani sebagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina. Pemerintah pusat seperti gamang menghadapi situasi ini.

Sudah ada UU tentang Karantina Kesehatan untuk menangani wabah penyakit menular. Nyatanya, sejak Indonesia mengumumkan adanya Covid-19 pada 2 Maret hingga 31 Maret lalu, belum ada kebijakan negara yang jelas soal ini.

Justru yang mengambil inisiatif adalah pemerintah daerah. DKI Jakarta sebagai episentrum seluruh kegiatan nasional dengan cepat mengumumkan kondisi darurat. Ini dilakukan karena pasien Covid-19 terbanyak berada di Jakarta. Sekolah diliburkan dan pekerja diminta bekerja dari rumah. Transportasi dibatasi.

Bukannya diapresiasi, rezim Jokowi malah menegur Gubernur DKI dengan alasan isolasi wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat. Bukan daerah. Kenyataan ini membuat geram masyarakat. Akhirnya, entah apa latar belakangnya, pemerintah pusat kemudian menyerahkan kebijakan penanganan Covid-19 ini ke daerah kembali.

Sejak awal, respon rezim Jokowi terhadap pandemi Covid-19 ini terasa kurang. Saat negara tetangga mulai menutup negara mereka, justru Indonesia malah membuka diri selebar-lebarnya. Ini ditandai dengan insentif bagi wisatawan. Tenaga kerja asing juga tetap saja dipersilakan masuk.

Rezim bahkan membanggakan diri Indonesia bebas dari corona saat negara tetangga sudah terjangkiti. Ini sempat membuat khawatir para diplomat yang ada di Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Jangan-jangan Indonesia tak serius mendeteksi masuknya virus tersebut ke Indonesia. Mereka mendesak Indonesia agar lebih serius dan siap.

Benar saja, begitu ada yang terbukti positif Covid-19, rezim Jokowi mulai gamang menghadapinya. Terlebih lagi jumlahnya terus meningkat dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Mungkin tertinggi di dunia, mencapai hampir 8 persen—padahal rata-rata global hanya 3 persen.

Inilah mengapa banyak kalangan mendesak pemerintah segera melakukan *lockdown* atau semisalnya.

Tapi rezim Jokowi terus menimbang-nimbang. Faktor ekonomi tampaknya menjadi faktor utama. Kemungkinan kas negara dalam kondisi kosong. Sementara jika memberlakukan UU Karantina Kesehatan, negara harus menanggung kebutuhan pokok rakyat. Uang dari mana?

Inilah fakta sebuah negara yang tidak dilandasi oleh syariah dalam mengelolanya. Islam memomorsatukan keselamatan rakyat dibandingkan lainnya. Sebab, hilangnya satu nyawa Muslim itu lebih besar perkaranya dibandingkan hilangnya dunia.

Seharusnya, wabah ini menyadarkan semua orang agar kembali kepada Islam. Hanya dengan Islam, keberkahan akan datang. □ **mujiyanto**

TERDAMPAK CORONA, NEGARA DI MANA?

Sejak diumumkan 2 Maret 2020, kasus infeksi virus corona (Covid-19) belum menunjukkan angka penurunan. Sebaliknya, jumlah orang yang terinfeksi terus bertambah. Data Senin (30/3) pukul 15.45 WIB, total kasus positif Covid-19 mencapai 1.414 kasus. Sebanyak 122 orang meninggal dan 64 pasien berhasil sembuh.

DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus infeksi terbanyak di Indonesia, mencapai 698 kasus, disusul Jawa Barat dan Banten. Hanya tiga provinsi yang dilaporkan belum ada kasus positif Covid-19 yakni Bengkulu, Gorontalo, dan NTT.

Hingga tulisan ini dibuat, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona Achmad Yurianto menuturkan pemerintah sudah memeriksa lebih dari 6.500 spesimen terkait Covid-19.

Banyak pihak mulai khawatir terhadap tren peningkatan jumlah kasus positif Covid-19. Pemda DKI Jakarta mengumumkan status tanggap darurat diperpanjang hingga 19 April, mengingat tingkat penyebaran virus itu kian meluas. "Status tanggap darurat di Jakarta diperpanjang mulai 5 April sampai 19 April," kata Gubernur DKI Anies Baswedan, Sabtu (28/3).

Bahkan Pemda DKI sudah menghitung skenario terburuk

atas wabah ini. "Skenario terburuk bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang positif," kata Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono dalam konferensi pers yang digelar secara virtual melalui akun *Youtube* Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan, DKI Jakarta sudah menyiapkan skenario untuk menangani ketika kasusnya berjumlah 500, 1.000, bahkan sampai dengan 8.000 orang terkonfirmasi positif.

Secara global, jumlah orang yang positif Covid-19 juga bertambah. Hingga Senin (30/3) pukul 15.31 WIB, ada 724.565 orang yang positif Covid-19, berada di 199 negara. Jumlah kematian mencapai 34.017 kasus, dan 152.076 pasien telah dinyatakan sembuh.

Prediksi

Bila pemerintah tidak segera mengambil langkah cepat dan serius untuk mencegah penularan Covid-19, diperkirakan hampir 2,5 juta orang di negara ini berpotensi terjangkit Covid-19. Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) telah memprediksi jumlah tersebut dalam sebuah skenario model yang diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappe-

nas), Jumat (27/3).

Pandu Riono, anggota tim tersebut, seperti dikutip *detik.com*, menjelaskan, jumlah orang yang positif Covid-19 bisa meningkat berlipat-lipat bila tak ada intervensi tingkat tinggi dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut.

Ia menjelaskan, ada jenis-jenis intervensi yang dilakukan terhadap penularan Covid-19 yakni 1) Tanpa intervensi; 2) Intervensi rendah: jaga jarak sosial secara sukarela, membatasi kerumunan massa; 3) Intervensi moderat: tes massal cakupan rendah, mengharuskan jaga jarak sosial (penutupan sekolah/bisnis); 4) Intervensi tinggi: tes massal cakupan tinggi, mewajibkan jaga jarak sosial.

Berdasarkan jenis-jenis intervensi tersebut, ia menilai, penanganan pemerintah Indonesia terhadap virus ini tergolong minim. "Yang sekarang hanya ada imbauan. Jadi, antara tanpa intervensi dan intervensi rendah," kata Pandu Riono, doktor epidemiologi lulusan University of California Los Angeles ini.

Tim FKM UI menjelaskan, tiap 1 kasus positif Covid-19 (satu orang) bisa menginfeksi setidaknya 2 orang lainnya. Mereka telah membuat prediksi. Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk Indonesia adalah 268 juta. Dari jumlah penduduk tersebut,



"Kapasitas rumah sakit di Indonesia tidak akan mampu menangani korban corona ini."

52,9 persen populasi tinggal di wilayah urban; 14,8 persen tinggal di rumah kurang dari 8 meter persegi; angka terjadinya pneumonia (penyakit radang paru-paru) adalah 1,3 per 1.000 orang; 28,2 persen penduduk bepergian; 50,2 persen mencuci tangan dengan cara tidak benar.

Berikut adalah prediksi jumlah orang positif Covid-19.

1. Tanpa intervensi: +/- 2.500.000 orang
2. Intervensi rendah: +/- 1.750.000 orang
3. Intervensi moderat: +/- 1.250.000 orang
4. Intervensi tinggi: +/- 500.000 orang

Prediksi tersebut diasumsikan terjadi pada hari ke-77. Tim menggunakan patokan hari ke-1 pada pekan pertama Februari 2020 alias lebih awal dari pengumuman kasus pertama oleh Pemerintah Indonesia (2 Maret). Soalnya, data yang diperoleh dari rumah sakit di Indonesia sudah menunjukkan adanya peningkatan kasus pneumonia dan gejala mirip Covid-19 sejak pekan pertama Februari.

Mereka juga memprediksi jumlah kematian kumulatif akibat Covid-19 di Indonesia:

1. Tanpa intervensi: 240.244 orang
2. Intervensi rendah: 144.266 orang

3. Intervensi moderat: 47.984 orang
4. Intervensi tinggi: 11.898 orang

Bila pemerintah tidak meningkatkan penanganan terhadap virus ini, rumah sakit di Indonesia bakal tidak muat lagi menampung pasien Covid-19. "Kapasitas rumah sakit di Indonesia tidak akan mampu menangani korban corona ini," kata Pandu.

Desakan

Melihat sikap pemerintah yang terkesan lamban ini, banyak pihak berteriak agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang cepat dan berani. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan pemerintah segera melakukan *lockdown* atau karantina kewilayahan total di seluruh penjuru negeri sebagai upaya menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Melakukan total *lockdown* di seluruh negeri dan atau lokal *lockdown* untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan dari para ahli," kata Sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangannya, Ahad (29/3).

Ia juga menyarankan pemerintah melakukan realokasi seluruh atau sebagian anggaran infrastruktur untuk digunakan menangani virus tersebut. MUI meminta pemerintah untuk menunda

rencana anggaran pemindahan ibu kota dan dipergunakan untuk membantu ekonomi masyarakat serta memulihkan perekonomian nasional.

"Keempat, mengalihkan seluruh dan atau sebagian anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan kelurahan bagi menolong rakyat setempat selama masa *lockdown*," tutur Anwar.

Tak lupa, MUI meminta dan mewajibkan para pengusaha besar untuk memberikan bantuan penanganan kasus corona serta mengatasi persoalan ekonomi yang dialami oleh masyarakat lapis bawah.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendesak pemerintah pusat segera melakukan *lockdown*. Ketua Satgas Covid-19 IDI, Zubairi Djoerban, berharap kebijakan itu segera diambil pemerintah. "Sangat setuju banget *lockdown* dan minta segera, itu penting," kata Zubairi kepada wartawan, Ahad (22/3).

Jika pemerintah alergi dengan istilah *lockdown*, menurutnya, tak masalah pemerintah menggunakan istilah lainnya tapi penerapannya sama yaitu membatasi bahkan mengisolasi warga di rumah.

IDI menyoroti imbauan *social distancing* tidak berlangsung sebagai mana harapan karena masyarakat tidak disiplin melaksana-

Hindari Kewajiban kepada Rakyat

de penerapan darurat sipil oleh rezim Jokowi, dalam pandangan ahli hukum tata negara Refly Harun adalah tindakan melepaskan diri dari kewajiban pemerintah menanggung kebutuhan dasar rakyat.

"Kalau cuma darurat sipil saja, ya hilang kewajiban pemerintah (untuk menanggung kebutuhan dasar warga)," kata Refly seperti dikutip *kompas.com*, Senin (30/3).

Berbeda halnya apabila pemerintah menerapkan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Jika pemerintah menerapkan hal tersebut, maka pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah harus menanggung kebutuhan dasar warganya, termasuk hewan ternak milik rakyat.

Menurutnya, lebih baik pemerintah menerapkan darurat kesehatan untuk memulihkan kesehatan masyarakat. Bukan memulihkan pemerintahan dan tertib sosial sebagaimana dikandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. [] **emje**

kannya. Jika terus dibiarkan, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 bisa gagal.

Sementara itu, Pengurus Besar (IDI) bersama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan 38 organisasi kesehatan lain di Indonesia mendesak pemerintah menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

"Setiap tenaga kesehatan berisiko untuk tertular Covid-19. Maka, kami meminta terjaminnya Alat Perlindungan Diri (APD) yang sesuai untuk setiap tenaga kesehatan. Bila hal ini tidak terpenuhi kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan pasien Covid-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat," demikian rilis yang mereka keluarkan.

Teriakan tenaga kesehatan ini sangat beralasan sebab di lapangan kondisi mereka cukup memprihatinkan. Sudah beberapa dokter dan perawat meninggal karena menangani pasien Covid-19. Di beberapa rumah sakit dan Puskesmas di daerah mereka berinisiatif sendiri melindungi diri seadanya dengan menggunakan jas hujan murahan—harga Rp 10 ribuan. Itu pun dipakai berulang-ulang.

Gamang

Pemerintah Jokowi sendiri sepertinya gamang menghadapi situasi sekarang. Setelah *keukeuh* tidak mau mengambil kebijakan *lockdown*, kelihatannya rezim Jokowi mulai mengubah sikap.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk itu, karena pemerintah tak bisa serta merta menutup satu atau dua wilayah tanpa aturan pasti. Hal ini juga sesuai

dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Mahfud menjelaskan, karantina wilayah berbeda dengan *lockdown*. Karantina Wilayah, menurutnya, adalah istilah lain dari *physical distancing* atau *social distancing* yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. Namun ia belum memerinci kebijakan itu dan kapan bisa diterapkan.

Di tengah ketidakpastian kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah mengambil langkah sendiri. Beberapa daerah melakukan *lockdown* daerahnya. Dimulai oleh Provinsi Papua, kemudian Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, dan Kota Ciamis di Jawa Barat.

Akhirnya, Presiden Jokowi mengemukakan wacana untuk menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19. Ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan *physical distancing* ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, *physical distancing*, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat *video conference* dari Istana Bogor, Senin (30/3).

Ahli hukum dari UGM Yogyakarta, Oce Madril, tidak habis pikir atas rencana pemerintah menerapkan darurat sipil sebagai langkah terakhir mengatasi penyebaran corona. Padahal, sudah ada UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai payung hukum menanggulangi wabah penyakit. Bahkan UU itu ditandatangani sendiri oleh Jokowi.

Ingin lepas tanggung jawab? [] **emje**



Buah Ketidakseriusan

Banyak kalangan mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan lockdown

Di saat negara lain, khususnya negara terdekat dengan Indonesia, sibuk menangani masalah penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia tenang-tenang saja. Pantas di media sosial warganet geram. Kegeraman ini cukup berasal karena arus wisatawan yang masuk Indonesia dari Cina—pusat penyebaran Covid-19—terus mengalir.

Muncul suara-suara di media sosial bahwa pemerintah menyembunyikan informasi tentang virus tersebut. Tentu pemerintah menolak tuduhan itu. Rezim Jokowi hingga akhir Februari 2020 menyatakan tidak ada virus corona di Indonesia.

"Nggak ada (pemerintah menyembunyikan virus corona). Siapa yang bilang? Media sosial itu *ndak* bisa dipercaya," kata Menko Polhukam Mahfud MD, Sabtu (29/2).

Ia menuding, ada orang yang sengaja membuat isu terkait virus corona di Indonesia. "Coba kalau ada di mana itu virus corona. Itu kan cuma orang mau bikin isu. Tidak (ada virus corona di Indonesia) sampai hari ini ya. Saya tidak tahu kalau sampai besok tapi

sampai hari ini tidak. Sampai hari ini Indonesia masih zero corona," tegas Mahfud.

Namun pernyataan pemerintah ini rupanya tidak membuat para diplomat yang ada di Indonesia meyakinkannya. Mereka khawatir terhadap tes laboratorium yang dilakukan pemerintah Indonesia. Para diplomat yang bertemu Menkes Terawan Agus Putranto pada rapat tertutup mengingatkan bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan deteksi kasus virus corona dengan lebih serius.

Seperti dikutip dari *The Sydney Morning Herald*, mereka menyampaikan pesan lain bahwa banyak rumah sakit di Indonesia yang tidak memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, tempat tidur isolasi tidak cukup, dan transportasi spesimen tidak memadai.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun khawatir terhadap klaim pemerintah bahwa tidak ada Covid-19 di Indonesia. Mengutip *The Sydney Morning Herald* Rabu (5/2) Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut Indonesia harus berbuat lebih banyak dalam hal deteksi kasus dari persiapan di fasilitas kesehatan.

Respon pemerintah terkesan tak serius melihat ancaman Covid-19 tersebut, padahal di Cina sudah puluhan ribu orang bergejimpangan dan ribuan orang lainnya meninggal. Menkes dengan entengnya menyebut virus corona tak lebih berbahaya dibandingkan virus influenza.

"Padahal flu batuk pilek yang biasa terjadi pada kita itu angka kematiannya lebih tinggi daripada yang ini, corona. Tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa?" kata Terawan di kantornya, Senin (2/3).

Ia mengatakan, penyakit ini bisa sembuh sendiri. "Harus diingat ini penyakit *self limited disease*, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Sama seperti virus lain," ujarnya.

Sebelumnya, ia meyakinkan rakyat Indonesia bahwa pemerintah sudah sangat siap dalam menghadapi situasi yang ada terkait virus corona.

Ketidakseriusan pemerintah itu terlihat pula pada komentar para menteri Jokowi. Virus ini dibuat bahan guyonan. "Tapi (ini) guyonan sama Pak Presiden ya, insyaallah ya, virus corona tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun berkelakar: "Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus corona tak bisa masuk. Tapi omnibus law tentang perizinan lapangan kerja jalan terus.

Orang Asing Bebas

Ketidakseriusan pemerintah menangkalkan masuknya virus corona ke Indonesia ini terlihat dari kebijakan menggenjot masuknya wisatawan asing ke Indonesia. Ada iming-iming insentif sebesar 30 persen bagi wisatawan.

Turis dibiarkan masuk ke Indonesia. Termasuk yang dari Cina. Sebelumnya tahun 2019, lebih dari 2 juta turis Cina masuk ke Indonesia. Tidak termasuk

pekerjanya. Larangan penerbangan langsung antara Cina dan Indonesia baru mulai berlaku pada hari Rabu (29/1).

Awal Maret, pemerintah baru mengeluarkan larangan masuk bagi orang asing dari tiga negara yakni Italia, Iran, dan Korea Selatan. Ini dilakukan setelah banyak orang terjangkit Covid-19 di negara tersebut. Anehnya, pemerintah tak mengeluarkan larangan bagi masuknya orang dari Cina.

Dan ini terbukti dengan masuknya 49 pekerja dari Cina pada Ahad (15/3) ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka masuk ke Indonesia tanpa melalui proses karantina di Indonesia. Mereka masuk ke Indonesia melalui Thailand. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan membela keberadaan mereka dengan menyebut kedatangan mereka legal. Justru yang merekam kedatangan TKA Cina ini ditangkap polisi.

Dua hari kemudian orang-orang asing diketahui masuk lagi ke Kendari. Ini dibenarkan oleh pihak Garuda yang membawa para penumpang tersebut. Tapi jumlahnya belum diketahui.

Tolak Lockdown

Menghadapi wabah Covid-19 yang terus meluas, banyak kalangan mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan *lockdown*, sebagaimana dilakukan negara lain demi mencegah penyebaran Covid-19.

Namun Jokowi bersikeras menolak opsi tersebut. Dalam rapat terbatas bersama gubernur, ia mengatakan kondisi Indonesia beda dengan negara lain. "Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda, memiliki kedisiplinan berbeda," kata Jokowi dalam *ratas online*, Selasa (24/3).

Tak heran, DKI Jakarta yang mulai menerapkan *lockdown* terbatas mulai 16 Maret dengan meliburkan sekolah dan menganjurkan para pegawai bekerja dari

rumah 'ditegur' Istana. Gubernur Anies Baswedan didatangi Mendagri Tito Karnavian Selasa (17/3) yang mengingatkan Anies bahwa *lockdown* adalah kewenangan pemerintah pusat.

Kepala daerah yang melanggar mendapat ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara dan/atau denda Rp 100 juta. "Untuk pembatasan, karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu menjadi kewenangan pusat," kata Tito usai menemui Anies.

Lalu apakah kemudian pemerintah pusat mengambil alih penanganan wabah di DKI yang kian meluas? Tidak. Kamis (19/3), pemerintah pusat mempersilakan Anies untuk memimpin upaya pencegahan penularan virus Corona di Jakarta. Alasannya, sekarang otonomi daerah.

Sulit Masker

Meluasnya pandemi Covid-19 ini mendorong banyak orang mencari masker sebagai pelindung diri. Tapi barang tersebut sulit ditemukan di pasaran. Kalau ada, harganya selangit.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi menginformasikan kepada publik bahwa stok masker dalam negeri sebetulnya cukup untuk kebutuhan warga. Ia menyebut ada 50 juta masker yang tersedia.

Ternyata, produk masker Indonesia justru diekspor ke luar negeri, Cina dan Singapura. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia telah melakukan ekspor masker atau *surgical mask* senilai 74,7 juta dolar AS selama Februari 2020. Nilai ini naik signifikan dari posisi Januari 2020 yang hanya berkisar 2,1 juta dolar AS.

Nasi telah menjadi bubur. Ketidaksiapan pemerintah menjadikan wabah Covid-19 meluas hampir ke seluruh Indonesia. Rakyat dan tenaga kesehatan dalam ancaman. Akankah masih juga gamang mengambil kebijakan? **emje**

Rezim Tolak Lockdown, Ini Penyebabnya

Presiden Jokowi dengan tegas menolak *lockdown* atau karantina wilayah. Alasannya, seperti kata Mendagri Tito Karnavian, karena faktor ekonomi. Apa itu?

Ternyata *lockdown* membawa konsekuensi bagi pemerintah. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, salah satu kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga.

"Problemnya, negara *gak* punya uang untuk lakukan *lockdown*," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. **emje**

Yakin Qadha' dan Ikhtiar

Kaum Muslim penting untuk memahami petunjuk syariah, bagaimana menghadapi wabah ini sehingga tepat dalam bertindak.

"Para ahli hari ini mengklaim bahwa kebersihan yang baik, isolasi diri, dan karantina adalah alat paling efektif untuk mencegah dan membasmi virus corona. Apakah Anda tahu siapa lagi yang menyarankan tindakan ini selama pandemi? Nabi Muhammad, lebih dari 1.300 tahun yang lalu," tulis Dr Craig Considine, seorang sosiolog dalam *twitter*-nya pada 27 Maret lalu. Rasulullah SAW memberikan contoh yang belum pernah ada sebelumnya. Apa yang dilakukan Nabi SAW menandakan, kaum Muslim tidak boleh menganut ajaran fatalistik. Menyerah pasrah dan tidak melakukan ikhtiar. Justru Nabi SAW mengajari umatnya bagaimana mencegah penularan penyakit dengan cara efektif. Ini adalah kaidah kausalitas, sebab akibat, sebuah ikhtiar manusia.

Kaum Muslim penting untuk memahami petunjuk syariah, bagaimana menghadapi wabah ini sehingga tepat dalam bertindak. Terlebih lagi, wabah penyakit bukanlah baru pertama kali ini terjadi. Tiga belas abad yang lalu, wabah penyakit pun terjadi di masa Nabi SAW, kemudian Nabi memberikan solusi. Itulah solusi Islam.

Menerima Qadha'

Secara keyakinan (*i'tiqadi*), musibah—apapun bentuknya—merupakan bagian dari qadha' atau ketetapan Allah SWT. Allah berfirman: *"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh)." (TQS Al Hadid: 22)*

Sikap seorang Muslim terhadap qadha' Allah SWT adalah ridha, menerima dengan sepenuh hati. Karena itu, Allah akan membalas keridhaan itu dengan kebaikan. Sebaliknya, seorang Muslim

dilarang dan haram hukumnya membenci qadha' Allah SWT. Ini seperti yang disabdakan Rasul SAW:

"Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa saja yang ridha, untuk dia keridhaan itu dan siapa yang benci, untuk dia kebencian itu." (HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Baihaqi).

Lalu, apakah kaum Muslim kemudian pasrah, menyerah, dan tidak berbuat apa-apa atas musibah yang dihadapinya? Sebagai ketetapan Allah, musibah harus dihadapi. Maka, sikap sabar terhadap musibah adalah sikap yang terbaik, sebab Allah SWT menguji hamba-Nya dengan musibah. Balasannya, Allah SWT memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar menghadapi musibah (QS al-Baqarah: 155-157).

Selain itu, Rasul SAW mengajari umatnya untuk istirja' (mengembalikan segalanya kepada Allah SWT), berdoa, berzikir serta memperbanyak ibadah dan taqarrub kepada Allah SWT baik shalat, sedekah, tilawah Al-Qur'an, shalat-shalat sunnah dan lainnya.

Dan kaum Muslim harus banyak memohon kepada Allah SWT agar wabah Covid-19 ini bukan azab dari-Nya; semoga wabah ini segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah SWT.

Berikhtiar

Tidak hanya berhenti hanya menerima qadha, berdoa, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi musibah. Nabi SAW memberikan tuntunan lainnya. Terhadap orang sakit, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berobat. Apa maknanya? Harus ada ikhtiar agar penyakit, termasuk wabah, segera hilang.

Dulu, ketika ada orang yang sakit, Rasul melarang mereka bercampur dengan yang sehat sebagaimana sabdanya: *"Janganlah*

kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat." (HR al-Bukhari).

Percampuran orang sakit dan orang sehat memungkinkan terjadinya penularan. Terlebih lagi bila diketahui bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang menular antar manusia. Pencegahan dengan menjaga jarak, tidak kontak fisik seperti salaman, berpelukan, berciuman dsb, cukup efektif. Inilah yang sekarang dikenal sebagai *physical distancing* atau *social distancing*.

Bahkan perintah Nabi agar menjauhi orang yang sakit menular ini cukup tegas. *"Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa." (HR Ahmad).*

Sebagaimana diketahui, penyakit kusta ini merupakan salah satu penyakit menular. Orang sehat tidak boleh mendekati mereka agar tidak tertular.

Tuntunan Nabi SAW ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, saat terjadi wabah corona. Virus corona menyebar melalui *droplet* air liur dari *carier* (pembawa yang tidak sakit) atau orang yang terjangkiti, maka menjaga jarak menjadi hal yang penting. Sebab virus itu bisa menempel pada media atau tangan yang menyentuh mulut atau cairan hidung lalu menyentuh suatu media. Jika tangan seseorang menyentuh media yang ada virus Covid-19, lalu menyentuh muka (mulut, hidung, mata), hal itu bisa membuat tertular.

Makanya, para ahli menjelaskan protokol yang perlu dilakukan: sering mencuci tangan, sebaiknya dengan sabun, secara benar; menghindari menyentuh atau mengusap muka, kecuali tangan bersih atau setelah mencuci tangan; segera mencuci pakaian setelah pergi keluar rumah; termasuk melakukan semua itu begitu tiba di rumah setelah pergi ke luar, dsb sebagaimana anjuran

para ahli.

Itu dalam skala pribadi. Dalam skala yang lebih luas, Rasulullah SAW pun memberikan tuntunan. *"Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah keluar darinya" (HR al-Bukhari).*

Inilah yang disebut sebagai karantina atau isolasi atas wilayah yang terkena wabah. Istilah kerennya *lockdown*. Larangan masuk dan keluar wilayah itu juga mencakup semua sarana untuk masuk dan keluar darinya, yaitu transportasi.

Penduduk wilayah yang dilanda wabah bukan hanya diperintahkan untuk berdiam di negeri/wilayahnya tapi berdiam di rumahnya. Bersabar, seraya mengharap ridha Allah SWT dan

meyakini akan qadha' Allah maka baginya ada pahala setara dengan pahala syahid.

Kata Nabi SAW: *"Tha'un itu merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah jadikan sebagai rahmat untuk kaum Mukmin. Tidaklah seorang hamba, saat tha'un terjadi, berdiam di negerinya seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid." (HR al-Bukhari dan Ahmad).*

Dengan keyakinan dan ikhtiar yang maksimal, musibah bagi kaum Muslim adalah kebaikan. Adakah yang dicari oleh seorang Muslim selain kebaikan? [] **emje**

Tanggung Jawab Negara

Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, termasuk wabah Covid-19, tidak akan efektif tanpa peran negara. Dalam pandangan Islam, negara harus mengurus urusan rakyat dengan serius. Keselamatan jiwa rakyat nomor satu.

Amir (pemimpin) masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad).

Negara wajib memelihara urusan kesehatan masyarakat. Bahkan layanan itu wajib diberikan secara gratis.

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat ini, negara wajib menjamin perawatan dan pengobatan semua orang yang sakit; menyediakan semua alat kesehatan yang dibutuhkan secara memadai, termasuk APD paramedis. Pemerintah juga wajib menjamin birokrasi, protokol dan prosedur yang diperlukan berjalan.

Pemerintah harus membuat kebijakan sehingga protokol *physical distancing* atau *social distancing* bisa berjalan secara efektif; termasuk meniadakan kerumunan orang baik di pusat perbelanjaan, tempat umum, rumah makan dan sejenisnya, fasilitas publik termasuk transportasi, dsb. Termasuk menjamin kebutuhan pokok para pekerja harian lepas. Ini tugas negara dalam Islam. [] **emje**

Hermawan Saputra,
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
(IAKMI)/ Tim Satgas Covid-19 IAKMI

Diprediksikan April-Mei Puncak Wabah Corona di Indonesia



Sikap abai dan tidak benar-benar serius dalam mengurus rakyat sepertinya sudah menjadi ciri khas rezim Jokowi. Dalam kasus wabah corona pun tampak nyata kegagapan dan kelambanan dalam menanganinya. Akibatnya para praktisi kesehatan di lapangan pun kelabakan. Sedikit gambarannya dapat ditangkap dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Tim Satgas Covid-19 IAKMI Hermawan Saputra. Berikut petikannya.

Bagaimana kondisi wabah Corona di Indonesia saat ini?

Secara resmi diumumkan oleh pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 bahwa dari hari ke hari terjadi peningkatan angka kasus terkonfirmasi positif.

Namun kalau kita lihat indikasi-indikasi di tengah masyarakat, *pertama*, sudah menyebar di hampir seluruh provinsi. *Kedua*, di daerah-daerah juga sudah terjadi transmisi lokal.

Kendala apa saja yang dialami praktisi kesehatan dalam menangani pasien corona?

Pertama, tidak mampunya kita mendeteksi lebih banyak kasus karena agak terlambat dalam melakukan pemeriksaan laboratorium. Awalnya kita masih terpusat dengan laboratorium Litbangkes. Kemudian ada desentralisasi mulai dari Surabaya dan Eijkman di Jakarta.

Tetapi kalau kita lihat dengan luasnya wilayah Indonesia dan juga cakupan jumlah penduduk yang 260 juta lebih, seharusnya kita ini sedari awal sejak terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 ada desentralisasi pengujian laboratorium RT PCR (*Real Time Polymerase Chain Reaction*) untuk mendeteksi apakah seseorang itu positif atau negatif corona.

Kedua, yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dari fasilitas kesehatan. Mulai dari edukasi pemahaman tenaga kesehatan di rumah sakit sampai penyediaan dan ketersediaan alat prosedur, alat pelindung diri (APD), prosedur penanganan dan juga sistemnya, termasuk ketersediaan ruang isolasi di berbagai wilayah.

Nah, ketika kasus sudah lebih dari 300 positif corona, baru kita, dalam arti pemerintah, mulai gelagapan. Banyak orang memeriksakan diri hingga tidak tertangani. Maka sekarang Wisma Atlet jadi rumah sakit darurat.

Jadi, setiap ada kenaikan kasus positif apalagi kenaikan PDP dan ODP, laju kekurangan perumahan (fasilitas karantina) dan tenaga medis juga meningkat. Karena tenaga kesehatan di rumah sakit dengan sendirinya dinaikkan statusnya menjadi pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP), artinya dirumahkan karena bersentuhan langsung atau kontak dengan pasien yang positif corona. Bahkan belakangan ini banyak tenaga kesehatan yang meninggal dunia.

Dengan kata lain, laju pertumbuhan penyakit di tengah masyarakat berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan kesehatan. Ini gambarannya.

Plus lagi, sebagian perilaku masyarakat kita tidak mawas diri.

Peran apa saja yang dibutuhkan praktisi kesehatan dari pemerintah?

Sampai hari ini (Kamis, 25/3) yang masih dibutuhkan itu adalah APD, mulai dari standar masker N95 (efisiensi menyaring partikel berbahaya lebih besar atau sama dengan 95 persen), sarung tangan karet, baju pelindung diri Hazmat (*hazardous material*). Yang paling penting juga untuk rujukan pemeriksaan laboratorium yang namanya virus transfer media (VTM), semacam alat boks begitu untuk mengantarkan pemeriksaan swap tenggorokan ke pusat-pusat laboratorium.

Itu semua di lapangan kurang semua. Bahkan saat ini, ada rumah sakit-rumah sakit yang *saking* kreatifnya menyulap jas hujan menjadi APD. Kaca helm juga disulap jadi APD. Ini semua sangat kurang, baik ketersediaannya maupun pendistribusiannya. Itu semua di lapangan masih kacau.

Apakah itu semua sudah dikomunikasikan kepada pemerintah?

Sudah.

Tanggapan pemerintah?

Pemerintah menyadari masih banyak kekurangan tetapi bahasa pemerintah sih, "Kita sudah berkomitmen", "Kita sudah memesan", bahkan mengatakan "Sudah mendistribusikan".

Jadi problem kita ini, apa yang sudah dibuat dalam bentuk kebijakan dan keputusan tetapi di lapangan itu tidak terimplementasi dengan baik.

Apa yang dibutuhkan para medik dari publik?

Yang dibutuhkan saat ini tentu saja kesadaran diri untuk tetap di rumah. Kalau semua orang menahan diri di rumah, minimal 7-14 hari, itu akan membantu betul mengurangi risiko-risiko penularan dan memberi ruang fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk melayani yang sudah tersakiti secara optimal di fasilitas kesehatan.

Yang kedua, juga kesadaran diri kalau terpaksa harus ke luar rumah, maka keluar rumah dengan menggunakan alat pelindung diri.

Cara terbaik, jaga daya tahan tubuh, batasi gerak ke luar rumah, dan mawas diri seperti makan teratur, olahraga secara rutin dan istirahat yang cukup. Nah, itu kuncinya.

Masih terlalu banyak orang di sekitar Jakarta naik kereta KRL untuk bekerja...

Ya, itulah... dari awal juga kita sudah mengkritisi pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Tempo hari Pemda DKI pernah melakukan pembatasan ketat termasuk alat transportasi tetapi laju tenaga

kerja dari Bodetabek itu cukup tinggi, bahkan masih ratusan ribu tiap hari.

Berarti ada yang belum kompak. Kantor buka, transportasi masih lalu lalang. Ini menyangkut kebijakan daerah dan pusat. Seharusnya itu semua terkoordinasi.

Jakarta juga ketika berencana lockdown langsung dilarang pemerintah pusat. Tanggapan Anda?

Terlalu prematur pernyataan dari pemerintah pusat itu. Pemerintah pusat mengatakan, "Tidak lockdown! Tidak lockdown!" Harus kita ingat bahwa lockdown itu pilihan, bagian dari opsi di dalam kasus wabah. Bahkan kita punya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah. Karantina wilayah itu bahasa lain dari lockdown. Artinya itu dimungkinkan.

Semua negara di dunia ini mempunyai opsi bahkan menerapkan juga lockdown. Bahkan Cina sendiri melakukan lockdown. Karena kasusnya sudah luar biasa.

Jadi, jangan juga menganggap remeh kasus ini. Ketika dianggap selesai hanya dengan *social distancing*, tidak diikuti kebijakan, sebenarnya sejauh ini tidak ada kebijakan pusat yang betul-betul *power full* untuk kasus ini.

Nah, lockdown itu kebijakan, keputusan berani pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai persoalan politik, ekonomi, distribusi, pariwisata dan seterusnya. Tetapi itu bagian dari opsi, jangan belum apa-apa sudah mengatakan tidak lockdown.

Apa karena itu semua, rerata kematian (mortality rate) positif corona di Indonesia

termasuk yang tertinggi sedunia?

Ya, *mortality rate* itu numeratonya adalah angka kematian. Denumeratonya adalah jumlah kesakitan.

Di negara lain mengapa *mortality rate*-nya rendah? Karena kesakitannya mampu dideteksi dengan cepat. Pemeriksaan laboratoriumnya masif.

Nah di Indonesia, kasus kesakitannya lambat dideteksi, yang kesakitannya lambat ditangani, kematiannya tinggi denumeratonya kecil. Maka *mortality rate*-nya besar.

PR kita adalah kecepatan dan ketepatan penanganan. Di dunia ini *mortality rate*-nya sekitar 3 persen. Indonesia masih terlalu tinggi berkisar di 8-8,7 persen.

Artinya apa?

Kita belum betul-betul mampu menyaring semua kesakitan di lapangan. Apalagi 60 persen kasus ini asimtomatik, tidak menunjukkan gejala. Artinya, 60 persen orang yang sudah terpapar corona ini tidak jatuh sakit.

Diprediksikan kapan puncaknya?

Berbagai ahli, termasuk kami dari IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia), memprediksikan sekarang itu belum puncaknya. Puncaknya itu sekitar pekan ketiga April hingga pekan kedua Mei.

Artinya, April-Mei menjadi bulan yang cukup menyibukkan kita. Dan ini berkaitan juga dengan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri. Baik sebelum maupun sesudahnya. Seharusnya ada kebijakan yang cukup serius dari pemerintah, misalnya tidak perlu mudik tahun ini karena berisiko besar.[]

Muhammad Ismail Yusanto,
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia

Keselamatan Rakyat harus Didahulukan

Meski wabah corona merupakan kasus yang luar biasa yang paling mondial. Tapi banyak pihak yang berkesimpulan pemerintah di sini menganggap enteng wabah corona. Kesimpulan tersebut ada benarnya, bila publik melihat rekam jejak digitalnya. Selain menyinggung hal tersebut, dalam wawancara dengan wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto juga menjelaskan bagaimana cara menangani masalah seperti ini dalam sudut pandang Islam. Berikut petikannya.



Luar biasa ya wabah corona virus ini...

Betul. *Fatal case rate* (FCS) memang terbilang kecil. Hanya sekitar 3 – 4 persen rata-rata dunia. Jauh bila dibanding wabah SARS atau MERS yang bahkan bisa mencapai 40 persen. Tapi tingkat penularannya luar biasa. Sampai ini hari, lebih dari setengah juta orang di lebih dari 200 negara di seluruh dunia telah terinfeksi. Dari jumlah itu, lebih dari 20 ribu di antaranya telah meninggal dunia.

Sepanjang sejarah, saya kira ini wabah yang paling mondial. Tidak ada negara di muka bumi ini yang tidak tersentuh oleh virus ini. Jasad renik, yang dengan perbesaran 1000 kali mikroskop pun belum tampak wujudnya, nyatanya telah membuat manusia seperti tak berdaya.

Ada lebih dari 3 miliar manusia yang saat ini terpaksa harus tinggal di rumah berpekan-pekan lamanya untuk menghindari penularan yang makin menggila. Kerugian global luar biasa di berbagai bidang.

Manusia yang katanya gagah perkasa, ternyata tak berdaya menghadapi makhluk yang amat kecil seperti ini, bagaimana jadinya jika harus menghadapi penciptanya?

Tapi banyak pihak yang berkesimpulan pemerintah di sini menganggap enteng wabah corona...

Faktanya memang begitu. Coba buka lagi berkas-berkas pemberitaan media cetak, elektronik maupun media daring, terutama sebelum tanggal 2 Maret 2020, pasti akan terlihat betapa pemerintah memang menganggap enteng wabah ini.

Ada pejabat yang mengatakan bahwa kita ini kebal corona gegara kita suka makan

nasi kucing. Ketika banyak lembaga dunia meragukan klaim pemerintah, bahwa Indonesia bebas corona, pejabat kita berang, dan balik menyerang. Dengan pongahnya, ada satu pejabat di bidang investasi, pada 22 Februari sempat mengatakan, "Corona sudah mereda, kini saatnya membolehkan lagi TKA Cina masuk kembali ke Indonesia". Ha, mereda?

Kedua, keadaan mulai berubah setelah pemerintah, melalui keterangan pers yang diberikan oleh presiden langsung, mengakui ada dua penderita positif Covid-19. Tapi konon, pengumuman itu pun dilakukan setengah terpaksa setelah pemerintah Australia dan Malaysia mengumumkan ada penderita Covid-19 berasal dari Indonesia.

Bagaimana pula sikap rezim pasca 2 Maret 2020 hingga kini?

Setelah pengumuman itu, memang ada perubahan sikap pemerintah. Tapi tetap saja lambat, utamanya dalam tes corona. Pemerintah hanya melakukan beberapa ratus sampel di awal Maret ini. Padahal telah banyak kasus mulai terdeteksi pada Februari di hampir seluruh negara Asia Tenggara, Indonesia baru melaporkan kasus pertama pada 2 Maret.

Berdasar data per 20 Maret pemerintah Indonesia melakukan 2.028 tes Corona. Dengan proyeksi untuk 272,22 juta penduduk Indonesia pada 2020, performa tes Indonesia yakni 7,4. Menurut *The Wall Street Journal* (WSJ) ini terendah dibanding negara lain. Tertinggi Korsel dengan 6.148.

Padahal tes ini kunci. Bila tes dilakukan dengan cepat, maka bisa segera diketahui siapa

saja yang telah terkena, dari mana dan siapa saja yang potensi terkena.

Belum lagi menyangkut kesiapan sistem kesehatan di Indonesia menghadapi wabah corona. Sebagai perbandingan Indonesia disebut hanya memiliki 12 tempat tidur rumah sakit per 10 ribu penduduk, sementara Korea Selatan memiliki 115 tempat tidur rumah sakit per 10 ribu penduduk.

Jumlah tenaga dokter Indonesia juga terbilang masih kalah dari Italia yang sekarang sudah kewalahan menghadapi corona. Banyak tenaga medis yang kekurangan alat pelindung diri, sampai harus memakai jas hujan.

Hingga kini, belum terlihat jelas strategi pemerintah menghadapi Covid-19. Apakah mengikuti Cina dengan kebijakan *lockdown*, atau Korea Selatan dengan langkah efektif deteksi dini secara masif. Imbauan Presiden Jokowi untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah justru menimbulkan polemik karena tidak diikuti dengan turunan kebijakan yang kongkret.

Apakah lockdown (dalam UU disebut karantina) solusi yang tepat untuk zona merah corona di Indonesia?

Sampai saat ini, pemerintah menempuh cara mengimbau agar masyarakat bekerja, belajar dan beribadah di rumah (*stay at home*/SAH) dan melakukan *social* atau *physical distancing* (PD). Sebenarnya cara ini, bila dilakukan dengan disiplin dan konsisten, juga cukup efektif untuk menghentikan laju penularan virus corona. Maka, *lockdown* boleh tidak harus dilakukan. Cuma pertanyaannya, apakah masyarakat kita cukup disiplin?

Jika tidak, sementara situasi sudah makin genting, akibat deteksi dini yang lambat dan penularan makin kencang, maka pilihannya tak lain adalah *lockdown*. *Lockdown* adalah *stay at home* dan *physical distancing* yang dipaksakan. Dan jika kebijakan ini tidak dilakukan, dipastikan penyebaran virus akan makin menggila. Dalam simulasi, jumlah tertular bisa mencapai lebih dari 1 juta orang di seluruh Indonesia di akhir Juni dengan jumlah kematian tentu juga akan meningkat. Mengerikan sekali.

Menurut Anda, lantas apa yang membuat rezim tak mau melakukan lockdown?

Pemerintah tak sanggup tanggung konsekuensi dari kebijakan itu. Menurut UU, bila *lockdown* atau karantina wilayah ini dilakukan, pemerintahlah yang harus menjamin kehidupan masyarakat utamanya yang tidak mampu.

Tapi menurut saya, bukan hanya karena hal itu. Dari awal pemerintah memang tampak gamang. Seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. *Lockdown* tidak mau, tapi melakukan tes cepat juga tidak dilakukan. Sementara pemerintah daerah, seperti DKI, yang bergerak cepat malah dikecam. Belakangan, terbukti Pemprov DKI lah yang benar. Pempus lambat melangkah.

Bagaimana pula nasib pekerja harian yang praktis tidak punya tabungan dan penghasilan bila harus berdiam di rumah?

Di situlah peran pemerintah. Karena itu *lockdown* memang harus direncanakan cepat dan matang. Harus benar-benar dialokasikan dana untuk hal ini. Keselamatan rakyat harus didahulukan ketimbang kepentingan ekonomi atau

bisnis. Jangan sampai untuk memindahkan ibukota bilang ada dana, sementara untuk menjaga nyawa rakyatnya bilang tidak ada.

Yang benar dalam menempatkan tawakal dan ikhtiar terkait wabah corona ini seperti apa?

Tawakal harus dilakukan bersama ikhtiar. Dalam ikhtiar adalah tawakal, dan dalam tawakal ada ikhtiar. Ikhtiar untuk menjaga kesehatan diri dengan mencuci tangan sering-sering, menjaga asupan makanan, istirahat dan olahraga, termasuk menjaga supaya virus ini tidak dengan mudah menular dengan melakukan SAH dan PD, disertai doa dan tawakal.

Bagaimana pula solusi Islam yang harus dilakukan negara terkait masalah ini?

Pertama, harus benar-benar menjaga pola konsumsi dengan makanan dan minuman yang halal dan thayib selalu.

Kedua, menjaga selalu kebersihan diri dan lingkungan. Terbukti kebiasaan wudhu berkeselarasan dengan anjuran cuci tangan selalu.

Ketiga, ketika ada yang menderita sakit menular, tidak boleh bercampur dengan yang sehat. Jika jumlahnya banyak, apalagi dengan tingkat penularan yang tinggi, harus dilakukan isolasi wilayah alias *lockdown* sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Umat bin Khattab ra.

Apa yang harus dilakukan agar solusi Islam ini diadopsi negara?

Ya negaranya harus menerapkan syariah Islam secara kaffah. Hanya dengan cara itu, kita semua akan mendapatkan berkah atau kebaikan-kebaikan.[]



Mereka Bicara

Kelambanan Pemerintah Atasi Wabah



KH Ali Bayinullah,
Pimpinan Ponpes Hafidz Darul Bayan

Negara Kurang Tanggap

Negara pertama kurang tanggap, yang kedua lelet. Harusnya bertindak cepat. Apabila ada wabah di suatu daerah muncul maka harus cepat tanggap, pintu-pintu masuk itu ditutup, ini berdasarkan hadits.

Perhatikan di Wuhan, semua akses langsung ditutup. Tidak seperti di sini, sudah jelas Cina sumber wabah, TKA Cina masih bisa masuk ke Indonesia.

Seharusnya saat ini diberlakukan *lockdown* secara total karena memang sudah parah. Jokowi tidak melakukan itu, karena saya rasa dia keberatan dengan pemenuhan hak asasi rakyat, atau memang tidak ada duitnya sama sekali.[]



Edy Mulyadi,
Pengamat Ekonomi

Rakyat Butuh Pangan, Bukan Darurat Sipil

Presiden Jokowi, telah menegaskan kepada gugus tugasnya bahwa tidak akan ada *lockdown*, padahal sampai Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan santun meminta agar Indonesia *lockdown*. Kenapa pemerintah tidak mau *lockdown*?

Apabila *lockdown*, pemerintah harus berkewajiban menjaga masyarakat untuk tetap diberi suplai, sesuai UU Karantina. Pemerintah berkewajiban memberikan kebutuhan dasar manusia, bahkan hewan ternak di situ.

Dengan corona ini, kita lihat pemerintah bulak balik *ngeyel* bilang enggak ada *lockdown*, baru belakangan Menkopolkum Mahfud MD mengatakan sedang disusun peraturan pemerintah tentang karantina. Itu bagus. Tapi secara tiba-tiba Presiden Jokowi mengumumkan ada pembatasan sosial skala besar. Yang bikin ngeri dari pembatasan itu adalah dengan bersamaan akan diberlakukan darurat sipil, dan saya baca pasal-pasalnya darurat sipil itu mengerikan sekali, sampai pemerintah berhak membatasi percetakan, membatasi siaran, mengeledah. Ini saya bilang represif.

Pak Presiden, rakyat itu sekarang butuhnya darurat pangan. Rakyat sudah setuju untuk tetap di rumah dan tidak melakukan perjalanan keluar, tidak berkerumun, akibatnya ada sebagian yang kehilangan pendapatannya. Tapi tolong rakyat butuh bantuan pangan.

Kita kurang uang? Kalau saya sudah hitung-hitung loh katakanlah 200 juta orang tidak mampu, 1 orang dikasih 30.000 per hari, kali 30 hari, catatan saya mengatakan hanya butuh Rp 180 triliun selama satu bulan untuk membantu pangan rakyat supaya mereka tidak keluyuran, tidak menularkan, atau tertular.

Memang banyak, tapi sebenarnya pemerintah bisa realokasi, dari mana? Kita punya anggaran infrastruktur yang gila-gilaan Rp 419 Triliun waktu itu. Itu *kan* bisa dialihkan untuk penanganan wabah ini? Kenapa susah?

Lalu kita punya anggaran kementerian dan lembaga itu Rp 1.600 triliun. Kalau 20 persen saja dialihkan untuk memerangi Covid 19, itu lebih dari cukup, mungkin hanya Rp 230 triliun.

Kita juga punya sisa pembayaran anggaran. Itu jumlahnya 240 triliun. Ini ada uang yang bisa dipakai untuk

memerangi Covid 19. Ini kenapa Menteri Keuangan malah meminjam uang lagi?[]



dr Saharuddin,
Direktur Help Sharia

Mengkhawatirkan dan Mengecewakan

Penanganan Covid 19 di Indonesia ini bukan hanya mengkhawatirkan, namun juga mengecewakan. Mengapa? Pertama dari sisi fasilitas tentu infrastruktur kita tidak siap untuk melakukan penanganan terhadap pasien-pasien yang terpapar virus. Ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak sinkron dengan fasilitas yang kita miliki. Seharusnya kebijakan itu amunisi fasilitas kita.

Ini ada dua pilihan kita melakukan pembatasan secara tegas, atau kita membiarkan proses ini terjadi secara alami. Masing-masing pilihan mempunyai konsekuensi, pilihan pertama kalau kita membiarkan ini terjadi secara alami, artinya *sosial distancing* itu hanya berupa imbauan seperti yang selama ini kita lihat, tidak ada *action* di lapangan. Seharusnya tegas meskipun tidak *lockdown*. Itu harus diikuti dengan kebijakan lain yang melakukan pencarian sebanyak mungkin orang yang terpapar, lakukan tes massal dan isolasi bagi yang tertular.

Jadi biarlah orang-orang yang sehat itu berkeliaran, tidak secara ketat ditahan. Yang dites mayoritas rakyat sehingga yang positif tidak lolos. Karena ada yang tanpa gejala tapi berkeliaran itu akan menularkan kepada pihak lain. Itu sebenarnya konsekuensi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang kalau mau diambil.

Opsi kedua melakukan *lockdown* total, artinya menutup benar-benar akses keluar masuk kota. Kemudian masyarakat di suatu wilayah yang terpapar dalam zona merah dihentikan, supaya penularan itu benar-benar berhenti. Ini tidak butuh waktu yang lama, paling 2 atau 3 pekan sesuai masa inkubasinya. Maka orang-orang yang terpapar tidak mengalami gejala lagi, dan dinyatakan aman untuk berinteraksi. Ini harus *lockdown* total dan ketat, ini konsekuensinya.

Kalau kita mengambil opsi masyarakat itu masih longgar untuk beraktivitas, lalu mengetes secara massal, itu artinya akan ada banyak orang berkeliaran tanpa gejala, dan berpotensi menularkan. Apa akibatnya? Orang nanti banyak bertemunya di rumah sakit.

Apa fasilitas kita siap untuk menampung orang-orang yang datang ke rumah sakit akibat kebijakan itu? Ini *kan* kita sudah seribu lebih terpapar, ya saya bilang sudah terlambat kita, sudah keteteran. Daya tampung rumah sakit kita terbatas.[]



Fadli Zon,
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra

Sangat Terlambat

Kalau kemarin saya membaca pernyataan Menkopolkum tengah menggodok PP turunan dari UU

Karantina Kesehatan, sebagai langkah persiapan penerapan karantina wilayah. Meski terlambat, saya apresiasi. Ini menandakan ada sedikit kemajuan berpikir pemerintah di tengah situasi semakin darurat.

Namun pada saat yang sama, keterangan Menkopolkum tersebut membongkar ketidakmatangan

perencanaan pemerintah selama ini dalam penanganan Covid-19. Menurut saya, jika karantina wilayah sejak awal telah menjadi salah satu opsi di meja Presiden, penyusunan PP tersebut seharusnya dapat dimulai lebih cepat, setidaknya sejak 2 Maret lalu ketika kasus positif pertama Covid-19 diumumkan Presiden.

Namun, ironisnya hal tersebut baru mulai digodok setelah jumlah kasus Covid-19 menginjak angka ribuan. Apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah ini *"too little and too late."* Seharusnya, di tengah situasi sangat darurat, pemerintah tak perlu menunggu PP selesai untuk menetapkan status karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), atau *lockdown*.

UU No.6/2018 tentang Karantina Kesehatan sebenarnya sudah cukup menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menetapkan status karantina wilayah atau PSBB. Dalam pasal 98, dikatakan UU tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 8 Agustus 2018. Bukan disebut berlaku ketika peraturan pelaksana selesai disusun. Berlaku dan bisa diterapkannya suatu UU tidak ditentukan peraturan di bawahnya (PP).

Ketidaktegasan pemerintah pusat selama ini mengakibatkan sejumlah kepala daerah berani mengambil inisiatif masing-masing menerapkan *local lockdown*. Meskipun menurut UU Karantina Kesehatan pasal 49 - terlepas dari perbedaan istilah- penetapan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. Ini menandakan, kebijakan pusat gagal memotret kecemasan dan kenyataan di daerah.[]



Tengku Zulkarnain,
Wasekjen MUI Pusat

Jangan Main-main dengan Nyawa

Hari ini, saya mengalami keadaan yang seumur hidup tidak pernah saya alami. Karena virus corona, Jumatan ditiadakan di Jakarta. Ditutup dengan resmi dan sudah 129 kelurahan terjangkit penyakit akibat corona. Fatwa MUI Pusat dan Surat Perintah Gubernur Jakarta wajib dipatuhi.

Waktu 14 hari, menurut sains dianggap mampu memutuskan mata rantai penularannya, jika manusia disiplin berkurung di rumah melakukan *sosial distancing*.

Penyebab utama salah satunya ini karena begitu lemahnya pemerintah terhadap TKA. Kepada pihak penguasa, berhentilah memasukkan TKA Cina, sumber asal virus bencana dunia ini. Jangan bermain-main dan berlagak pilon dengan nyawa anak bangsa hanya demi secuil duit. Jika itu termasuk perjanjian sebagai syarat utang kemarin, batalkan dengan tegas, demi bangsa dan negara.

Tentu saja itu hanya ikhtiar kita dalam situasi wabah seperti ini. Selain usaha pastilah yang paling penting adalah doa dan penyerahan diri kepada Allah semata. Virus corona itu makhluk ciptaan Allah belaka. Dia tidak kuasa melakukan apa pun tanpa izin Allah. Tubuh ini juga milik Allah. Dan, tidak ada satu pun makhluk yang akan mampu mencedarainya tanpa izin Allah.

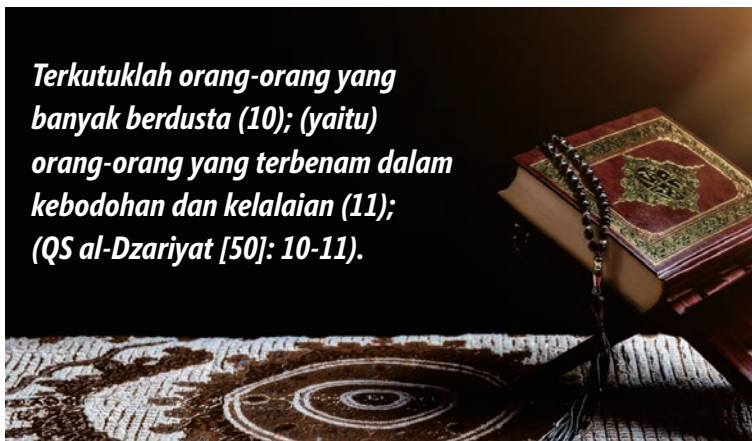
Ya Allah segerakan wabah Virus China ini berlalu dari negeri kami. Agar mudah kami beribadah dan bersilaturahmi seperti sedia kala. Khususnya di bulan Ramadhan dan bulan Syawal mendatang.[] **ghifari-fatih**

Kontradiksi Perkataan Orang-orang Kafir

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI



Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta (10); (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian (11); (QS al-Dzariyat [50]: 10-11).



Dalam ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkan tentang perkataan orang-orang kafir yang berbeda-beda dan kontradiktif terhadap Rasulullah, Alquran, dan Hari Kiamat. Lalu, dipalingkan orang-orang yang berpaling dari semua kebenaran.

Ayat-ayat ini memberikan celaan dan ancaman kepada orang-orang kafir yang melontarkan perkataan yang hanya didasarkan pada persangkaan tanpa dasar bahkan kedustaan.

Ancaman bagi Para Pendusta

Allah SWT berfirman: *Qutila al-kharrâshûn* (terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta). Kata *qutila* merupakan ungkapan doa keburukan dan kecelakaan kepada orang-orang yang disebut sesudahnya. Sehingga para mufassir menafsirkan kata tersebut dengan *lu'ina* (terlaknat, terkutuk). Al-Anbari berkata, "Kata *al-qatl* jika diberitakan dari Allah SWT, maka bermakna *al-la'n* (pelaknatan, kutukan). Sebab, orang yang dilaknat Allah SWT sama dengan orang yang terbunuh dan binasa. Itu sebagaimana dalam firman-Nya: *Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?* (QS al-Taubah [9]: 30).

Namun ada juga sebagian ulama yang menafsirkan *qutila* di sini adalah orang yang wajib dijatuhkan hukuman mati oleh tangan kaum Muslimin.

Yang mendapatkan doa keburukan dan kecelakaan dalam ayat ini adalah *al-kharrâshûn*. Kata *al-kharrâsh* merupakan *shîghah mubâlaghah* dari kata *kharasha*. Menurut al-Azhari, pada asalnya kata *al-kharash* bermakna *al-tazhanniy* (yang bersifat persang-

kaan) pada perkara yang tidak diyakini.

Dijelaskan juga oleh Ibnu 'Asyur, *al-kharsh* adalah *al-zhann* (dugaan, persangkaan) yang pelakunya tidak memiliki alasan bagi persangkaan tersebut, sehingga itu merupakan sindiran untuk kesalahan dalam persangkaannya. Juga, merupakan *kinâyah* (kiasan) bagi kesesatan yang disengaja atau dianggap remeh.

Penjelasan serupa juga dikemukakan al-Raghib al-Asfahani. Menurutnya, *al-kharsh* adalah semua perkataan yang dikatakan berasal dari *zhann* (persangkaan, dugaan) dan *takhmîn* (perkiraan, taksiran). Disebut *kharsh* ketika orangnya tidak berkata atas dasar dari pengetahuan yang pasti, dugaan kuat, dan pendengaran langsung, baik sesuai dengan fakta maupun tidak, namun hanya disandarkan pada persangkaan dan perkiraan, seperti orang yang menaksir buah. Semua orang yang berkata seperti itu, terkadang juga disebut *kâdzib* (pendusta), meskipun sesuai dengan apa yang dikatakan, sebagaimana yang diceritakan tentang orang-orang munafik dalam firman-Nya: *Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, "Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah." Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta* (TQS al-Munafiqun [63]: 1).

Ahmad Mukhtar juga mengatakan bahwa kalimat *kharasha al-say'a* bermakna *khaman wa hadasa* (mengira, menduga). Berkata berdasarkan *zhann* (dugaan) tanpa pemeriksaan. Ini sebagaimana kata *takhrûsûn* dalam firman-Nya: *Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu*

hanya mengira (TQS al-An'am [6]: 148).

Dalam konteks ayat ini, ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang makna *kharrâshûn*, yang tidak jauh dari makna bahasa tersebut. Banyak mufassir menafsirkan *al-kharrâshûn* dengan *al-kadzdzâbûn* (orang-orang banyak berdusta). Di antara yang berpendapat demikian adalah Mujahid, al-Zajjaj, al-Baghawi, dan lainnya. Bahkan menurut al-Wahidi, semua mufassir mengatakan bahwa makna ayat ini adalah *lu'ina al-kadzdzâbûn* (terlaknatlah para pendusta).

Dikatakan al-Farra', makna *al-kharrâshûn* adalah para pendusta yang membuat-buat kebohongan tentang perkara yang tidak mereka ketahui. Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya Muhammad gila, pendusta, tukang sihir, dan penyair." Ini adalah doa keburukan atas mereka. Sebab, orang yang dilaknat Allah SWT, maka dia dalam posisi terkutuk dan celaka.

Penjelasan serupa juga dikemukakan Ibnu Zaid yang mengatakan bahwa ayat ini bermakna, "Mereka adalah orang-orang yang selalu mereka-reka kebohongan terhadap Nabi SAW. Sebagian dari mereka menyebut Nabi SAW sebagai penyihir, padahal mereka sendiri yang mempraktikkan ilmu sihir. Sekelompok lainnya menyebut Nabi SAW sebagai penyair, padahal mereka sendiri yang membuat syair. Sekelompok lainnya menyebut Nabi SAW sebagai paranormal, padahal mereka sendiri yang bergelut di bidang perdukunan. Ada juga yang menyebut Nabi SAW sebagai pendongeng, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya: *Dan mereka berkata, "(Itu hanya) dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang."* (TQS al-Furqan [25]: 5).

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat ini adalah terlaknatlah *al-mutakahhin* (peramal, dukun) yang membuat-buat kedustaan dan kebatilan, lalu mereka menerkannya. Dikatakan Ibnu Abbas ra, makna *al-kharrâshûn* adalah *al-kahanah* (para dukun).

Menurut sebagian lainnya bermakna *al-murtâbûn* (orang-

orang yang ragu-ragu). Ini sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas ra. Menurutnya, makna ayat ini adalah *lui'na al-murtâbûn* (terkutuklah orang-orang yang ragu-ragu). Hal yang sama juga dikatakan oleh Mu'adz ra dalam khutbahnya, *halaka al-murtâbûn* (binasalah orang-orang yang ragu-ragu).

Menurut Fakhruddin al-Razi, *al-kharrâshûn* di sini adalah yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya yang memberitakan tentang *lafi qawl[in] mukhtalif[in]* (benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat). Mereka tidak kokoh dalam suatu perkara dan tidak pasti. Namun mereka menduga dan hanya mengira-ngira.

Hal yang sama juga dikatakan Ibnu 'Asyur. Bahwa *al-kharrâshûn* adalah orang-orang yang menyampaikan *al-qawl al-mukhtalif* (pendapat yang berbeda-beda) yang berasal dari *khawâthir* (sesuatu yang muncul dari benak atau hati), bukan dari dalil. Ini sebagaimana diberitakan dalam QS al-'An'âm [6]: 116. Maksud dari kata *al-kharsh* dalam ayat tersebut adalah dugaan dalam perkataan mereka tentang Dzat dan Sifat Allah SWT.

Dijelaskan pula oleh Ibnu 'Asyur, *al-kharsh* dalam perkara akidah merupakan sesuatu yang tercela. Sebab akidah tidak dibanggun kecuali atas dasar keyakinan karena pentingnya perkara tersebut. Inilah asal perkara yang dicela dalam ayat ini. Sedangkan *al-kharsh* dalam muamalah sesama manusia, maka tidak dicela dengan celaan ini. Ada sebagian yang tercela jika mengantarkan pada bahaya dan spekulasi. Sebagian *al-kharsh* juga diperbolehkan untuk kebutuhan.

Tenggelam dalam Kelalaian

Kemudian Allah SWT menerangkan tentang *al-kharrâshûn* dalam firman-Nya: *al-ladzina hum fi ghamrat[in] sâhûn* ([Yaitu] orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian).

Pada asalnya, kata *al-ghamarah* bermakna yang menutupi dan menyelimuti sesuatu. Termasuk dalam makna ini adalah kata *na-har ghamar* (samudera). Artinya, yang menenggelamkan orang yang memasukinya. Demikian juga dengan kata *ghamarât al-mawt* (sakaratul maut).

IKHTISAR:

1. Orang-orang kafir hanyalah membuat-buat kedustaan. Mereka diancam mendapatkan laknat.
2. Orang-orang kafir tenggelam dalam kelalaian.

Sedangkan *sâhûn* bermakna lalai dan lupa terhadap urusan akhirat. Secara bahasa, kata *al-shaw* bermakna *al-ghaflah* (lalai) dari sesuatu dan hilang dari hatinya.

Diterangkan Ibnu Abbas ra dan lainnya bahwa makna ayat ini adalah orang-orang yang lalai dan lengah dalam kekufuran dan keraguan).

Ibnu Zaid berkata, "Mereka lalai dengan apa yang datang kepada mereka, lalai dengan apa yang telah diturunkan untuk mereka, dan lalai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada mereka. Perhatikan firman-Nya: *Tetapi, hati mereka (orang-orang kafir) itu dalam kesesatan dari (memahami Alquran) ini, dan mereka mempunyai (kebiasaan banyak mengerjakan) perbuatan-perbuatan lain (buruk) yang terus mereka kerjakan* (TQS al-Mukminun [23]: 63)."

Kemudian Ibnu Zaid berkata, "Perhatikanlah ketika Anda mengambil sesuatu lalu menenggelamkannya ke dalam air." Dikatakan Mujahid tentang ayat ini, seakan-akan hatinya berada di dalam suatu tempat yang tertutup.

Menjelaskan ayat ini, Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan, terlena dalam perbuatan dosa, lalai terhadap kebenaran yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi SAW dan mereka mengacuhkannya."

Demikianlah. Orang-orang kafir itu sesungguhnya tidak punya dasar, pijakan, dan argumen-tasi terhadap perkataan yang mereka lontarkan. Semuanya batil. Sehingga perkataan mereka tergolong sebagai kedustaan. Allah SWT pun mengancam mereka dengan laknat. Sehingga mereka tidak mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, hanya keburukan, kecelakaan, dan kesengsaraan yang mereka peroleh. *Wal-Lâh; lam bi al-shawâb.* []

Direktur LBH Pelita Umat Kasusnya Harusnya Dihentikan

Ini lebih mirip proses politik untuk menekan para pengkritik rezim Jokowi menggunakan sarana hukum.

Direktur LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin kembali dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi dalam kasus menyebarkan berita bohong. Ahmad mengaku janggal atas pemanggilan itu. Sebab, kasus tersebut tidak ada buktinya.

"Kasus ini semestinya dihentikan. Karena pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 UU No 1/1946 itu pidana karena dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal, ulasan artikel itu bersumber dari banyak media kredibel," ungkap Ahmad kepada *Media Umat*.

Artikel tersebut menyoal antara lain: bantuan Menkeu Sri Mulyani kepada Ormas sebesar Rp 1,5 triliun. Staf SBY Osy Dermawan yang menyebutkan SBY tak nyaman dengan audit Jiwasraya yang ditarik hingga ke tahun 2006. Soal Jokowi yang saat itu cenderung pasif terhadap kasus Jiwasraya. Soal dugaan duit korupsi Jiwasraya mengalir ke Pilpres. Soal laporan TV One yang memuat grafik definisi khilafah terkait rencana dihapuskannya ajaran khilafah dari madrasah.

"Itu semua ada sumbernya," jelas Ahmad.

Ia menceritakan bahwa dia dipanggil kembali dipanggil sebagai saksi untuk perkara lain dengan materi yang sama. Ada tiga

warganet yang juga ditetapkan sebagai tersangka karena mengunggah artikel serupa.

Seharusnya, menurut Ahmad, jika tuduhan kepolisian adalah menyebarkan berita hoaks, berita kebohongan, mestinya penyidik terlebih dahulu memeriksa sumber berita. Karena itu, tim hukum Ahmad dari LBH Pelita Umat telah mengirim surat kepada Kapolri agar dilakukan konfrontasi saksi-fakta.

"Tim hukum saya minta konfrontasi dengan Sri Mulyani dan KH Sa'id Aqil Siradj untuk memastikan benar tidak telah ada MoU Ormas dengan Kemenkeu terkait bantuan dana senilai Rp 1,5 triliun? Benar tidak Sri Mulyani telah salurkan dana sebesar Rp 211 miliar melalui pondok pesantren?" jelas Ahmad.

Ia mengatakan, penyidik harus memeriksa staf SBY, Jokowi, redaktur TV One. Kalau mereka diperiksa dan membenarkan memang ada fakta terkait Jiwasraya, terkait laporan berita rencana Kemenag penghapusan mata pelajaran khilafah, semestinya perkara selesai.

"Darimana unsur 'berita bohong' yang dituduhkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri? Wong semua ada faktanya," tegas Ahmad.

Belum lagi, pasal 207 KUHP itu menurut Putusan MK No. 013-022/PUU-



IV/2006, MK dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Menurut Ahmad, ini delik aduan, harus ada penguasa atau pejabat yang melaporkan.

"Faktanya, kasus yang saya hadapi itu atas laporan internal polisi. *Kan aneh?*" ungkap Ahmad.

Kasus ini, menurut Ahmad, jelas ganjil. Ini lebih mirip proses politik untuk menekan para pengkritik rezim Jokowi menggunakan sarana hukum. "Karena saya dan tim LBH Pelita Umat memang konsisten mengkritisi kebijakan rezim yang keliru," katanya.

Ahmad menambahkan kepada para pengemban dakwah jangan takut untuk berdakwah, jangan sampai kriminalisasi ini menghentikan perjuangan Islam.

"Jangan takut, jangan menyerah, tetap berdakwah, baik dengan lisan maupun tulisan. Rezim menargetkan agar seluruh pengemban dakwah takut dengan proses kriminalisasi ini. Karenanya, para pengemban dakwah, segenap umat tak boleh takut. Teruskan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Urusan keselamatan, serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT," pungkasnya. **[fs]**

Bicara Pindah Ibu Kota, Ajak Donasi Wabah Pengamat: Rezim Mulkan Jabriyan

Rezim melakukan itu karena karakter dari awal adalah mereka dikendalikan oleh para investor politik.



Pemerintah berencana membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah Covid-19. Pada saat yang bersamaan, rezim terus berbicara tentang pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini menimbulkan anggapan buruk di tengah rakyat, seolah pemindahan ibu kota lebih penting dari keselamatan warga.

Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroki menilai, pemerintah sedang menunjukkan dirinya sebagai pemerintahan pada fase keempat yaitu *mulkan jabriyan*, penguasa otoriter yang menghisap rakyatnya.

"Ini karakter pemerintahan yang menghisap rakyatnya. Ini wujud pemerintahan demokrasi itu, mereka berutang kepada para investor politiknya, sehingga jika pindah ibu kota ini ada kepentingan investor-investor politiknya,"

ujar Wahyudi, Senin (30/3).

Jangan heran, kata Wahyudi, penguasa begitu bersemangat ketika berbicara tentang pemindahan ibu kota. Sebaliknya, begitu lamban ketika menangani wabah Covid-19. Seolah mereka tak mau berkorban jika itu untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus membiayai sendiri.

Wahyudi mengatakan bahwa rezim melakukan itu karena karakter dari awal adalah mereka dikendalikan oleh para investor politik. Mereka tidak lagi mandiri. Kebijakan mereka diarahkan oleh kepentingan para cukong yang telah membiayainya saat kampanye.

Pemerintah bergeming ketika banyak kalangan mendesak segera dilaksanakan karantina wilayah atau *lockdown*. Menurut Wahyudi, sesuai undang-undang No. 6 tahun 2018, negara harus menanggung seluruh biaya masyarakat. Pemerintah tak mau itu.

Karenanya, ia mengimbau pemerintah agar segera mengambil kebijakan yang tegas demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat. "Kalau kita lihat, semakin lama mengulur-ulur waktu *me-lockdown* atau mengkarantina dengan dalih apapun terutama dalih dana, maka nyawa rakyat yang menjadi taruhannya," tandasnya.

Ia menegaskan, presiden itu punya seribu kewenangan bahkan lebih semua kewenangan. Bukan hanya kewenangan, presiden punya segenggam kekuasaan, untuk mengeluarkan Perppu, kekuasaan untuk menghukum, menangkap dan seterusnya. "Sehingga banyak sekali sumbernya, hanya mau atau tidak," jelasnya.

Menurutnya, sebenarnya tidak besar dana yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan *lockdown* selama 2 pekan atau 14 hari. Kalau per orang biaya hidupnya sekitar Rp 50 ribu, kali 14 berarti Rp 700 ribu per orang. Kalau penduduk Indonesia yang miskin hanya sekitar 7 juta, maka tidak sampai menghabiskan uang Rp 50 triliun.

Sementara sebelumnya, subsidi tiket saja sudah Rp 80 triliun, belum lagi untuk bunga utang Rp 200 triliun. "Untuk bayar utang padahal bisa dinegosiasikan dulu agar ditunda dengan alasan karena ada virus corona. Itu solusi paling mudah untuk bernegosiasi. Jadi persoalannya mau atau tidak mau. Apalagi kalau kita mau mengeluarkan Rp 100 triliun pun nggak ada masalah apalagi untuk rakyat sendiri," pungkasnya. **[ghifari]**

Jamaah Umrah *Overstay* Dipulangkan Habib Rizieq Masih Tetap Tertahan

"Habib tidak bisa pulang bukan karena itu. Karena adanya pengasingan politik."



Kerajaan Arab Saudi mengampuni semua jamaah umrah yang *overstay*. Saudi meminta Pemerintah RI menjemput para WNI tersebut. Namun bagaimana dengan Muhammad Rizieq Syihab (Habib Rizieq) apakah termasuk yang bakal dijemput pemerintah RI untuk pulang ke tanah air?

"Mereka yang akan pulang ke Indonesia perlu mendaftar secara *online* ke pihak Saudi. Saya tidak tahu Habib mendaftar

atau tidak," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah seperti dilansir dari *detikcom*, Kamis (26/3).

Kemlu RI menyatakan ada puluhan WNI yang termasuk jamaah umrah *overstay* di Arab Saudi. Permintaan Saudi tercantum dalam surat Kedutaan Saudi bertanggal 24 Maret 2020. Surat ini diawali judul 'Sangat Segera'.

Melalui surat itu, Saudi menyatakan pihaknya telah membebaskan para jamaah umrah yang *overstay* dari segala implikasi

hukum dan denda. Semua WNI jamaah umrah yang *overstay* sudah diampuni dan perlu segera dijemput pemerintah RI.

Dia tidak tahu apakah permintaan Saudi ke RI untuk menjemput WNI ini dila-tarbelakangi kondisi pandemi virus corona atau tidak. "Kita maknai apa yang tersurat saja, sebagai pemberian kemudahan untuk WNI yang habis visa umrahnya," kata Faizasyah.

Sebagaimana diketahui, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebril mengatakan Imam Besar FPI Habib Rizieq terkendala pulang ke Indonesia karena izin tinggal habis (*overstay*) sehingga harus membayar denda terlebih dahulu untuk bisa kembali ke tanah air.

Direktur HRS Center Abdul Choir Ramadhan membantah Habib Rizieq tidak bisa dipulangkan karena berstatus *overstay* di Arab Saudi. Choir menyatakan Habib Rizieq belum bisa pulang karena diterapkan pengasingan politik dan adanya permintaan dari pemerintah Indonesia.

"Habib tidak bisa pulang bukan karena itu. Karena adanya pengasingan politik. Kenapa pengasingan politik? Dicegah keluar dari Arab Saudi karena ada permintaan dari pemerintah Indonesia," ujarnya saat wawancara dengan *Media Umat*, Selasa (31/3).

Menurutnya, hal ini tidak ada kaitan-

nya dengan visa yang *overstay*. Habib Rizieq tidak bisa meninggalkan Saudi melalui pendekatan hukum yang direkayasa seolah-olah Habib Rizieq tidak bisa pulang karena *overstay*. Dan *overstay* itu terjadi karena ada aksi pencegahan dari Arab Saudi itu 1/2 tahun yang lalu.

"Karena dicegah dari sini, sehingga otomatis dengan sendirinya visa Habib Rizieq itu *overstay* dan bukan hanya Habib Rizieq, putri dan istrinya juga mengalami hal yang sama. Karena visa itu kelompoknya Habib Rizieq," ungkapnyanya.

Sama halnya dengan salah satu kuasa hukum Habib Rizieq, Damai Hari Lubis yang menerangkan, WNI yang dimaksud oleh Arab Saudi adalah jamaah umrah.

Hal ini tentu berbeda dengan Habib Rizieq yang dilarang pulang. "Masalah Habib Rizieq bukan masalah hukum terkait *overstay*, sehingga tidak bisa diselesaikan via *online*. Jadi harus ada putusan politik melalui keputusan resmi Kerajaan Arab soal pencabutan cekal," ujar Damai.

Selain itu Kerajaan Arab juga harus mengeluarkan surat Bayan Safar atau izin keluar dari Arab untuk bisa membuat Habib Rizieq pulang. Damai pun menantang pihak pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam urusan memulangkan Habib Rizieq. **ghifari**

Pemerintah juga dinilai mengecewakan, pasalnya kapasitas pemerintah pusat ternyata jauh di bawah harapan

Daerah Inisiatif *Lockdown* Pemerintah Pusat Dinilai Terlambat

Merebaknya pandemi Covid 19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Alhasil tanpa arahan pusat, beberapa daerah di Indonesia melakukan *lockdown* atau karantina wilayah untuk memperkecil risiko bertambahnya masyarakat yang terpapar Covid-19.

Cendekiawan Muslim Fahmi Amhar menilai, pemerintah pusat terlambat dan tidak peka. Bahkan apabila melakukan *lockdown* sekarang pun, sudah sangat terlambat, karena penyebaran virusnya sudah telanjur luas.

"Sangat terlambat. Sudah puluhan ribu *carrier* virus meninggalkan DKI ke daerah. Dan daerah pasti akan kewalahan," jelasnya kepada *Media Umat*.

Menurut Fahmi, apabila karantina tidak dikoordinasikan dengan pusat maka akan timbul masalah-masalah baru, itu dikarenakan tidak adanya SOP yang seragam dalam karantina.

"Standar karantinanya akan beragam. Akan banyak *musykilah* (masalah) yang beda penanganannya," jelas Fahmi.

Pemerintah juga dinilai mengece-

wakan, pasalnya kapasitas pemerintah pusat ternyata jauh di bawah harapan, dari banyak segi kapasitas lain pun seperti itu, mengecewakan.

"Kapasitas kepedulian, kapasitas berpikir, kapasitas merencanakan, kapasitas anggaran, kapasitas SDM, kapasitas komunikasi, dan sebagainya sangat mengecewakan," kata profesor ini.

Apabila terus seperti ini, ia menilai, wabah Covid-19 akan lama berakhir di Indonesia. Selain itu pula kaum Muslim terancam dikucilkan termasuk dalam masalah ibadah.

"Dampaknya, kita akan lebih lama dikucilkan di dunia. Mungkin haji atau umrah dari Indonesia baru bisa tahun 2022," tegas Fahmi.

Sebelumnya, beberapa daerah yang memutuskan melakukan *lockdown* atau karantina wilayah adalah Papua, Tegal, dan Aceh, adapula *lockdown* yang merupakan inisiatif warga. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan akses penerbangan dan pelayaran ditutup.

Akses hanya akan dibuka untuk angkutan barang dan bahan makanan. Keputusan ini akan terlihat sangat wajar ketika



kita melihat bagaimana tidak siapnya fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

Misalnya hanya ada dua ruang isolasi berstandar WHO, namun kebijakan ini ditentang oleh pusat, kementerian perhubungan tegas mengatakan tidak ada penutupan bandara.

Di Tegal, Wali Kota Dedy Yon Supriyono, menerapkan *lockdown* dengan hanya membuka tak lebih dari tiga pintu masuk yang merupakan jalan provinsi dan jalan nasional. Ini dilakukan karena adanya pa-

sien yang pulang dari Abu Dhabi ternyata positif. Padahal orang tersebut telah lolos dari bandara, lolos di stasiun, sampai Tegal jatuh sakit dan ternyata positif. "Kan mabok kita," ungkap Dedy.

Aceh juga menerapkan *lockdown* parsial, terutama di kawasan tempat tinggal pasien yang terpapar Covid 19, mereka bahkan meminta untuk Provinsi Banda Aceh melakukan hal serupa dengan menutup akses bandara dan darat. **fs**

Remembering Khilafah 2020

Khilafah Ajaran Islam yang Wajib Diperjuangkan

la menegaskan menegakkan khilafah adalah bagian dari ketakwaan.

Selain Isra' Mi'raj, ada juga peristiwa sejarah yang tidak kalah pentingnya bagi umat Islam di bulan Rajab. "Apa itu? Yakni hilangnya institusi kaum Muslimin yang bernama Khilafah," ujar KH Rokhmat S Labib dalam acara *live streaming Remembering Khilafah 2020: Indonesia Berkah dengan Syaria Kaffah*, Rabu, (25/3/2020) di kanal Youtube Fokus Khilafah Channel.

Pada 28 Rajab 1342 Hijriah atau 99 tahun yang lalu Khilafah Utsmaniyah, Khilafah yang terakhir diruntuhkan oleh Mustafa beserta Inggris dan negara-negara kafir penjajah.

Maka sejak saat itulah umat Islam tak punya institusi yang menerapkan Islam secara kaffah, yang menyatukan umat ini dan melindungi mereka serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

Rokhmat menegaskan khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab hadits, dalam *syarah* hadits, di dalam kitab fikih, dalam sirah dan juga dalam kitab-kitab tarikh.

Imam An Nawawi misalnya, dalam *Syarah Muslim* dengan tegas mengatakan

"*Wa ajma'uu 'ala annahu yajibu 'alal muslimi miina nashbu khaliifatin wa wujuubuhu bis syar'ilaabil'aql.*"

"Beliau katakan mereka bersepakat yakni kaum Muslimin berijma' bahwa wajib atas kaum Muslimin mengangkat seorang khalifah. Bahkan beliau katakan dan wajibnya mengangkat khalifah itu *bisyar' laa bil'aql*. Berdasarkan *syara'* dan bukan berdasarkan akal," bebrnyanya dalam acara daring (*online*) yang disaksikan secara langsung sekira 14 ribu kaum Muslimin dari berbagai penjuru Indonesia.

Penting juga untuk ditegaskan bahwa khilafah itu bukan sekadar *fardhun* tetapi dia adalah *taajul furudh* (mahkota kewajiban). "Mengapa disebut mahkota kewajiban? Karena dengan Khilafah maka berbagai macam kewajiban lainnya bisa ditegakkan," kata Rokhmat.

Maka menegakkan khilafah berarti juga menegakkan berbagai macam kewajiban yang diwajibkan Allah SWT. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al Mawardi dalam kitab *Ahkamus Sulthaniyah* ketika beliau menjelaskan tentang *Al Imamah awil Khilafah*. Imamah atau khilafah.

"Beliau katakan *al Imamah maudhu'ah*

li Khilafatin nubuwwah fii hirasatid dini wa siyasatid dunyaa," kutipnya.

Al-Imamah atau kepemimpinan dijadikan, diletakkan, diposisikan dalam rangka mengganti kenabian. Bukan sebagai nabi yang mendapatkan wahyu tetapi *fii hirasatid diin*, dalam rangka menjaga agama, penjagaan agama. *Wa siyasatid dunyaa*, dan pengaturan urusan dunia.

"Jadi urusan agama ini tak akan bisa ditegakkan kecuali dengan khilafah. Oleh karena itu menegakkan khilafah bukan hanya menegakkan fardhu tapi juga berbagai macam fardhu yang lain," tegasnya dalam video yang kini sudah ditonton lebih dari 116 ribu pirsawan tersebut.

"Maka saudara-saudara, tanpa khilafah seperti yang saat ini terjadi hukum Islam terlantar. Ayat tentang *hudud*, ayat tentang jinayat, ayat tentang jihad, ayat tentang politik, ayat tentang ekonomi semuanya terlantar. Karena apa? Karena tidak institusi yang menegakkannya," ungkapnya.

la menegaskan, menegakkan khilafah adalah bagian dari ketakwaan. Karena takwa adalah menjalankan semua perintah Allah SWT. Menjauhi larangan-Nya atas

dasar iman dan dorongan untuk mendapatkan pahala, ridha dan surga-Nya, itulah takwa.

"Dan ketika kita bertakwa maka kita berhak mendapatkan janji Allah SWT. Apa itu? Yakni diberikan jalan keluar atas segala masalah yang kita hadapi," tegasnya.

Lalu ia pun membaca Alquran surah ath-Thalaq ayat 2-3, yang artinya: 'Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka.'

"Oleh karena itu semestinya kita bukan menganggap Khilafah itu sebagai ancaman tetapi sebagai ajaran Allah SWT yang wajib kita perjuangkan yang dengan begitu kita berhak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT," pungkasnya.

Selain pidato Ustadz Labib, acara yang berlangsung dua jam tersebut diisi pula oleh suara rekaman Amir Hizbut Tahrir *Al-'Alim Al-Jalil* Syekh 'Atha' Bin Khalil Abu Ar-Rasyah serta *talkshow* dan tanya jawab bersama Khadim Ma'had Syaraful Haramain KH Hafidz Abdurrahman dan Jubir HTI Ustadz Muhammad Ismail Yusanto. **joy**

MAJELIS BENGKEL PENGUSAHA

Ketika Pengusaha Menjadi Penguasa Belajar dari Umar bin Khattab

Ayah, kita kok seperti ini ya menghadapi musibah? Kita punya panduan hukum syara' yang super lengkap dan sudah terbukti, tapi gak mau dipakai. Akhirnya mau dipakai tapi sebagian. Diminta muhasabah agar semua bersegera bertaubat dari kemaksiatan, gak mau, karena katanya, ini tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan. Ini murni soal musibah wabah penyakit!

Didesak agar segera mengambil kebijakan pencegahan sejak dini, malah kalem dan bilanganya di negeri kita tidak ada, barulah setelah di penjuru waktu, itupun setelah banyaknya jumlah korban yang berjatuhan.

Diminta taat, ee malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, harga barang malah melonjak tinggi *de el el*. Saya ini juga pengusaha, biasa mengambil keputusan cepat. Apapun pasti ada risikonya, tapi kok ini seperti diulur-ulur. Kasihan rakyat banyak yang memang tidak mampu. *Kan* mestinya malah bisa lebih cepat dan tepat! *Hadeuh* itu yang namanya pertanyaan keluar seperti berondongan peluru yang *kagak* ada berhentinya. *Saking* semangatnya!

Trully Muslimpreneur,

Begini. Kita sedang menghadapi musibah ini di alam kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Bukan saat Islam tegak diterapkan. Jadi, pemikiran, perasaan dan peraturan bagi kebanyakan kita ya kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan seperti itu!

Biar gampang, mari kita cari *benchmark*. Namanya *benchmark* berarti kita mesti sandingkan dengan penguasa

sa Muslim yang berasal dari kalangan pengusaha dan sistemnya Islam dan -satu lagi- juga mengalami situasi musibah yang hampir sama. Setuju ya?!

Oke, kita lihat sosok Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah yang luar biasa. Sejarah mencatat itu.

Ya, salah satu ujian terberat terjadi pada tahun keenam masa kepemimpinannya yakni tahun 18 H/561 Masehi. Di tahun ini, umat Islam diuji dengan wabah penyakit mematikan. Wabah ini dikenal dengan Tha'un 'Awamas. Apa yang dilakukan Umar sebagai pemimpin?

Umar menempuh langkah-langkah strategis sesuai syariat. *Pertama*, mengurungkan perjalanannya menuju Damaskus, saat di tengah perjalanan. Keputusan itu diambil setelah Abdurrahman bin Auf menyampaikan pesan Nabi: "Jika kalian mendengar adanya wabah di suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya. Namun, jika terjadi wabah di tempat kalian berada maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad). Umar pun taat! Semua taat!

Kedua, memerintahkan gubernur Syam untuk mengisolasi rakyatnya, mengobati semua yang sakit dengan fasilitas dan obat-obatan gratis dan menjamin seluruh hajat hidupnya selama wabah terjadi. Rakyat pun taat. Hasilnya, bi idznillah wa bi nashrillah, hanya dalam tempo 2 minggu wabah pun hilang. Dua kebijakan ini kini dikenalkaitkan dengan istilah *lockdown* dan *social distancing*.

Rakyatnya taat pada syariat. Penguasanya juga taat pada syariat, bahkan lebih dulu melakukan muhasabah apa yang salah padanya, lalu mencari tahu apa yang keliru

pada rakyatnya.

Intinya, Umar tegas meminta dirinya dan semua jajarannya beserta seluruh rakyatnya untuk pertama-tama memohon ampun dan bertaubat dari segala maksiat yang dilakukan. Umar dan seluruh sahabat sangat tahu bahwa pesan pertama dari Allah SWT jika terjadi musibah pasti itu karena ada maksiat -sekecil apapun itu- dan karenanya harus segera bertaubat secara massal.

Trully Muslimpreneur,

Umar bin Khattab jelas pengusaha kakap era Nabi SAW yang kekayaannya berpadu dengan ketaatannya pada Islam. Kewibawaannya berpadu dengan pengorbanannya bagi Islam. Ketokohnya berpadu dengan keteladanan sikapnya dalam menerapkan Islam kaffah, baik semasa Rasul SAW masih hidup maupun telah tiada. Pengusaha yang dibaai menjadi penguasa penuh amanah. Bukan pengusaha yang menjadi penguasa penuh kezaliman. Totalitas pada penerapan syariat Islam dalam bingkai khilafah tampak jelas tak terbantahkan. Jauh dari retorika, dan puja puji dunia yang tak ada arti!

Trully Muslimpreneur... Yuk berbenah, yuk serius. Umat menanti kita. Bisnis penuh berkah, Ngaji penuh energi dan Dakwah penuh manfaat bagi umat. Agar berkah yang menghampiri kita semua, bukan wabah! Dan penguasa sadar untuk mengurus umat di dunia sebagai modal agar bisa masuk surga di akhirat. Bismillah!

Barakallahu fikum...

@bah Salim. Bengkel Pengusaha

Seruan *Lockdown*: Rugi Ekonomi atau Rakyat Mati

Anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar mereka selama 14 hari: makan tiga kali sehari, listrik, dan air, hanya Rp 4 triliun.

Presiden Jokowi bersikeras menolak *lockdown* atau karantina wilayah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Padahal, jumlah penderita virus tersebut setiap harinya bertambah dengan tingkat kematian yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral, pemerintah masih mempertimbangkan budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia.

"*Lockdown* berakibat seluruh kebutuhan hidup rakyat harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi mengakibatkan kelangkaan logistik yang berpotensi memunculkan *social unrest* (ketidakstabilan sosial). Oleh karena itu, perlu ada perhitungan yang sangat matang," ujar Donny (28/3).

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa pemerintah masih ragu menghadapi konsekuensi *lockdown*.

"Kalau *lockdown* maka terjadi penurunan ekonomi yang lebih drastis dan banyak pihak yang harus kehilangan mata pencaharian.

Itu menuntut pemerintah untuk memberikan stimulus lebih dan membutuhkan persiapan infrastruktur sampai aparat untuk menegakkan pembatasan *lockdown* tersebut," ujarnya, Senin (30/3).

Seruan *Lockdown*

Sebelumnya, ekonom senior Indef Dradjad Wibowo mengatakan *lockdown* harus segera dilakukan. Pemerintah harus lebih tegas untuk melakukan pencegahan penyebaran virus dibanding mempertimbangkan perekonomian.

Menurutnya, perekonomian saat ini sudah sangat tertekan karena virus corona. Penyelamatan terbaiknya adalah dengan mencegah wabah ini meluas, kalau perlu ambil langkah ekstrem untuk melakukan *lockdown* alias isolasi wilayah.

Hal yang sama juga disuarakan oleh Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian. Menurut mereka, pemerintah terlalu angkuh untuk terus menyatakan tidak mau melakukan *lockdown*.

"Pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak ada *lockdown*! Sudah begitu banyak

yang memberikan saran tetapi nampaknya keras kepala, ciri kepemimpinan seolah-olah kuat, tetapi menghadapi masalah dalam manajemen yang krisis," tulis mereka (29/3).

Menurut mereka, perlambatan ekonomi memang sudah tidak bisa lagi dicegah, tapi untuk menyelamatkan perekonomian tugas utama pemerintah adalah menangkalkan wabah corona meluas. Salah satunya dengan melakukan *lockdown*. Setelah itu baru memikirkan kebijakan ekonomi yang pas.

"Perlambatan ekonomi tidak dapat dicegah, tetapi tugas pemerintah utamanya menangkalkan wabah Covid-19. Setelah itu baru menangkalkan ekonomi agar tidak terjungkal menjadi krisis, yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk," kata Didik dan Fachru.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mendesak pemerintah untuk memberlakukan *lockdown* untuk menekan penularan corona. Menurut Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Djoerban, pihaknya setuju jika *lockdown* diterapkan.

"Sangat setuju banget *lockdown* dan minta segera, itu penting," ucap Zubairi, Ahad (22/3).



la memahami bahwa pemerintah alergi dengan istilah *lockdown*. Namun, menurutnya tak masalah jika pemerintah tak menggunakan istilah *lockdown*, namun memberlakukan yang penerapannya sama yaitu membatasi bahkan mengisolasi warga di rumah.

Sebelumnya, Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, membuat pernyataan yang mengimbau Presiden Jokowi untuk melakukan beberapa langkah untuk mengatasi pandemi Covid-19, termasuk menyerukan *lockdown*.

"Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari, di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum (zona merah) penyebaran COVID-19 atau dae-

rah lain dengan berbagai pertimbangan," demikian di antara imbauan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Jumat (27/3).

Mereka juga membuat simulasi anggaran yang dibutuhkan 9,6 juta penduduk Jakarta jika pemerintah menerapkan *lockdown*. Anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar mereka selama 14 hari: makan tiga kali sehari, listrik, dan air, hanya Rp 4 triliun.

Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan pajak pemerintah yang mencapai Rp 1.334 triliun pada 2019. Jadi, apa sebenarnya yang ditakutkan pemerintah? Ekonomi bisa pulih, tapi tidak dengan nyawa yang mati.[] **muis**

MUAMALAH

Jual-Beli "Murabahah"

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Dalam kitabnya, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'ashirah*, Syekh Yusuf as-Sabatin menjelaskan, bahwa jual-beli *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan ketika seseorang menjual barang dengan harga beli dia sebelumnya, disertai dengan tambahan keuntungan yang dia sepakati dengan pembeli berikutnya.

Jual-beli seperti ini harus memenuhi beberapa syarat:

1. Harga awal harus jelas bagi pembeli kedua.
2. Keuntungan juga harus jelas, karena keuntungan itu bagian dari harga yang akan dibayarkan oleh pembeli kedua.
3. Harga awal harus termasuk harta yang memiliki padanan [*mitsliyyat*], yaitu harta yang serupa keadaannya, seperti emas, perak dan gandum.
4. Harga awal hendaklah bukan merupakan kompensasi dari jenis yang sama, yang termasuk harta riba, karena tambahan keuntungan pada kondisi itu menjadi riba. Seandainya seorang pembeli membeli kurma dari orang lain, maka ia tidak boleh membayarnya dengan kurma yang lebih banyak, karena itu adalah riba. Andai

dia membeli kurma dengan uang, maka ia boleh memberikan tambahan terhadap harga belinya, karena tambahan itu bukan merupakan riba, karena perbedaan jenis hartanya.

5. Akad pertama haruslah sah. Jika akad pertama *fasad*, maka tidak boleh dijual secara *murabahah*, karena *murabahah* ini menjual dengan harga awal disertai tambahan. Adapun jual beli yang *fasad*, meskipun memberikan manfaat kepemilikan setelah serah terima, hendaknya dinilai dengan nilai barang yang dijual itu, atau yang semisalnya. Bukan berdasarkan harganya. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga 50 Dinar, sementara jual-belinya *fasad*. Pembelinya sudah mengambil barang tersebut, tetapi harganya belum dibayar, kemudian penjual memintanya membayar dengan harga tersebut. Maka, dalam kasus seperti ini, pembeli tersebut tidak boleh menyerahkan harganya, yaitu 50 Dinar, harga yang disepakati dalam akad. Namun, dia harus membayar nilai barang tersebut di pasaran. Kadang nilainya bisa 50 Dinar, bisa juga lebih. Karena bisa naik, dan turun.

Harga awal adalah harga yang harus dibayar pembeli saat akad. Adapun biaya yang dikeluarkan setelah harga awal tidak termasuk dalam komponen harga awal. Maka, penjual bisa menyatakannya dengan tiga redaksi, sebagai berikut:

- a) "Saya beli dengan harga 100 Dinar." Atau, "Modalku 100 Dinar." Atau, "Ia menjadi milikku, dengan 100 Dinar." Ini jika dia ingin memberitahukan harganya saja.
- b) "Aku membeli dengan harga 100 Dinar. Aku melakukan sesuatu untuknya setara dengan 10 Dinar." Jika dia ingin memberitahukan harga, sekaligus biaya lain yang dibutuhkan. Ini demi menghindari kebohongan untuk mendapatkan tujuan tertentu.
- c) "Barang itu berguna untuk saya, dengan 100 Dinar, dan 10 Dinar." Ini jika ingin memberitahukan harganya, dan bantuannya.

Jual beli seperti ini dibenarkan secara syar'i, jika memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana di atas. *Walla-hu a'lam.*[]

Pandemi Covid-19 menimbulkan masalah baru di tengah-tengah umat Islam. Bukan hanya soal menjaga diri agar tak tertular, tapi juga bagaimana ibadah bisa tetap berlangsung sesuai ketentuan syariah. Seperti apa? Fokus membahasnya.

Shalat Jumat dan Jamaah Saat Pandemi

Di dalam daulah al-Khilafah, shalat Jumat dan jamaah tidak akan ditelantarkan

Di satu sisi kaum Muslim dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT tapi di sisi lain kaum Muslim harus menerima kenyataan adanya larangan untuk berkerumun demi menghindari penyebaran penyakit Covid-19. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan larangan menyelenggarakan shalat Jumat di suatu daerah yang penyebaran coronanya tak terkendali.

Namun karena data mengenai peta pandemi tidak jelas, kaum Muslim bingung. Ada yang masih melaksanakan, ada yang meniadakan. Yang meniadakan mendasarkan pada praduga bahwa banyak orang sehat yang mungkin menjadi carier (pembawa) virus tersebut. Yang melaksanakan, mendasarkan fakta orang-orang di sekitar masjid dalam kondisi sehat.

Sebenarnya, apakah model masyarakat seperti ini dalam kacamata Islam? Mudir Ma'had Syaraful Haramain KH Hafidz Abdurrahman menjelaskan, ada kesalahan solusi yang diambil oleh kapitalisme dan yang serupa dengannya.

Mereka menyelesaikan masalah ini berdasarkan tiga tahap: *pertama*, menyembunyikan masalah.

Kedua, karantina dan isolasi parsial. *Ketiga*, isolasi semi total di rumah.

Ia kemudian menerangkan, dengan mengkaji secara mendalam tiga solusi itu, semuanya tidak mengatasi persoalan, tetapi akan meningkatkan kegagalan ekonomi dan kegagalan lainnya. "Kemudian melipatgandakan penyakit ini, kebosanan dan stres yang menimpa masyarakat seperti yang kita dengar tentang kondisi-kondisi di masyarakat kapitalis," terangnya.

Karena itu, katanya, solusi yang shahih untuk penyakit ini adalah seperti yang ada di dalam syariah Allah SWT. Yakni, negara menelusuri penyakit tersebut sejak awalnya dan bekerja membatasi penyakit di tempat kemunculannya sejak awal dan orang-orang sehat di tempat-tempat lainnya tetap bekerja dan memproduksi.

Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."

Inilah yang disebut karantina. Berdasarkan hal itu, maka khilafah membatasi penyakit di tempatnya, dan penduduk setempat tetap tinggal di situ dan penduduk lainnya tidak boleh masuk ke tempat itu. Negara kemudian melakukan kewajiban syar'inya. Menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan obat secara gratis bagi seluruh rakyat, mendirikan rumah sakit dan laboratorium pengobatan dan lainnya yang termasuk kebutuhan pokok rakyat, sebagaimana pendidikan dan

keamanan.

Sementara orang yang sehat tetap melanjutkan kerja mereka. Kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan, sebagaimana sebelumnya. Tidak menghentikan kehidupan masyarakat secara umum dan mengisolasi mereka di rumah dan berikutnya melumpuhkan kehidupan ekonomi.

Shalat Jumat

Dengan kondisi seperti itu, Hafidz menjelaskan, hanya orang sakit yang diisolasi dan tidak boleh masuk ke masjid untuk shalat jamaah dan shalat Jumat. Termasuk disertai langkah-langkah berupa kebersihan, masker dan jika diperlukan menggunakan selubung (APD) dan lainnya.

Sementara orang-orang yang sehat tetap melaksanakan shalat Jumat dan shalat jamaah tanpa dihentikan. Jika diperlukan, diadakan tim medis di masjid untuk memeriksa orang yang diduga sakit dari orang-orang yang shalat sehingga bisa diambil langkah-langkah terhadapnya tanpa meninggalkan shalat Jumat dan shalat jamaah.

Mengapa? Ia menjelaskan, dalil-dalil yang ada tentang shalat jamaah dan shalat Jumat tidak berisi penelantaran secara terus-menerus. Bahkan shalat itu tidak menuntut jumlah besar untuk menunaikannya. Diberikan udzur untuk sebagian kaum Muslim dari menghadirinya, karena sebab-sebab yang khusus untuk mereka sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan shalat jamaah, maka itu adalah fardhu kifayah: Shalat jamaah merupakan fardhu kifayah yang wajib ditampakkan bagi masyarakat. Abu Darda' telah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, "Tidaklah ada tiga orang di satu kampung dan pedalaman, di mana tidak ditegakkan di tengah mereka shalat, kecuali setan telah menguasai mereka. Kamu harus berpegang kepada jamaah. Sesungguhnya serigala memakan domba yang menyendiri." [HR Abu Dawud dengan sanad hasan].

2. Adapun shalat Jumat, hukumnya fardhu ain, tidak gugur kecuali dengan udzur, dan dalil-dalil atas hal itu banyak. Antara lain, firman Allah SWT, "Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." [QS al-Jumu'ah [62]: 9].

Perintah di dalam ayat ini hukumnya wajib, dengan adanya qarinah larangan dari yang mubah, menunjukkan bahwa *thalab* [perintahnya] itu *jazim* [tegas].

Shalat Jumat tidak wajib atas orang yang takut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra bahwa Nabi saw bersabda, "Siapa saja yang mendengar seruan (Adzan) dan tidak menjawabnya maka tidak ada shalat untuknya kecuali karena udzur". Mereka berkata: "Ya Rasulullah apa udzurnya?" Baginda bersabda:

"takut atau sakit". [Hr al-Baihaqi di Sunan al-Kubra].

Begitulah, shalat Jumat hukumnya wajib bagi tiap Muslim, kecuali yang dinyatakan oleh nas syar'i. Selain mereka, yang tidak dinyatakan oleh nas syar'i, maka shalat Jumat tetap fardhu ain baginya. Ini adalah udzur syar'iy dan tidak bisa bisa diqiyaskan.

Shalat Jumat disyaratkan berada dalam sejumlah orang kaum Muslim. Para sahabat telah berijmak bahwa harus ada sejumlah orang untuk shalat Jumat. Maka shalat Jumat itu harus dilakukan dalam sejumlah orang. Tidak disyaratkan jumlah tertentu. Jumlah berapapun yang bisa disebut jamaah maka dinilai sebagai jumlah yang dengannya shalat Jumat itu absah.

Hanya saja, karena harus jamaah dan sejumlah, dan hal itu tidak bisa terpenuhi kecuali dengan tiga orang atau lebih, karena dua orang tidak disebut jamaah karena tidak adanya sejumlah orang bersama jamaah. Atas dasar itu maka harus tiga orang yang padanya wajib Jumat sehingga sah shalat Jumat itu. Jika kurang dari jumlah itu maka tidak sah disebut Jumat karena tidak adanya sejumlah orang. Telah terakadkan ijmak sahabat bahwa harus ada sejumlah orang untuk shalat Jumat.

Begitulah, di dalam daulah al-Khilafah, shalat Jumat dan jamaah tidak akan ditelantarkan. Tetapi orang yang punya udzur syar'i, dia boleh tidak menghadiri, sedangkan orang yang lain menghadiri.

Terkait dengan adanya pendapat bahwa telah menjadi dugaan kuat (*ghalabah azh-zhann*) bahwa semua orang berpotensi tertular dan tidak mungkin mencegahnya, Hafidz menjelaskan, bagaimana pun langkah-langkah dan kehati-hatian diambil, maka itu merupakan kemungkinan yang lemah, khususnya jumlah minimal untuk jamaah adalah dua orang dan untuk shalat Jumat adalah tiga orang. Ini menurut yang lebih rajih. Seandainya kita asumsikan adanya kemungkinan ini maka itu diambil di wilayahnya saja.

"Dari sini maka perkara itu wajib ditetapkan (diverifikasi) dengan sangat rinci dan amanah. Jika jumlah itu terpenuhi menurut *ghalabah azh-zhan*, maka shalat Jumat dan shalat jamaah tidak boleh ditiadakan, tetapi diambil semua langkah dan tindakan kehati-hatian. Jadi tindakan pencegahan itu tidak berarti meninggalkan kewajiban, melainkan kewajiban itu ditunaikan disertai mengambil kehati-hatian dan langkah-langkah untuk mencegah penularan," jelasnya.

Ia menerangkan, jika negara menutup masjid-masjid tanpa mengerahkan segenap upaya dalam memverifikasi *ghalabah azh-zhan*, sebagaimana penjelasan tersebut, dan berikutnya melarang masyarakat mendatangi masjid untuk shalat Jumat dan jamaah, maka negara berdosa dengan dosa besar karena menelantarkan (meniadakan) shalat Jumat dan jamaah. **It's**

Menangani Jenazah Covid-19

Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh mengambil langkah kemudahan (al-masyaqqah tajlibut taisir).



Salah satu problem yang dihadapi oleh kaum Muslim, baik tenaga medis maupun non-medis, adalah bagaimana menangani jenazah Covid-19, yang bisa menularkan virusnya kepada yang menanganinya.

Ada tiga ketentuan dalam proses memandikan jenazah pasien Covid-19, yakni:

Pertama, jika menurut ahli memandikan jenazah Covid-19 dengan cara standar tersebut masih membahayakan bagi yang memandikan atau penyebaran virusnya, maka jenazah tersebut boleh dimandikan dengan cara menuangkan air ke badan jenazah saja, tanpa *dalku* (digosok). Sebagaimana penjelasan dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, "Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekadar dituangi air, maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan cara dituangi air tanpa digosok" [Lihat, Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid I/476]

Kedua, jika itu tidak bisa dilakukan juga, maka boleh tidak dimandikan dan diganti dengan ditayamumkan. Berdasarkan keterangan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, "Dan tayamum dapat menggantikan memandikan mayit karena tidak ada air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal orang mati tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika dimandikan dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok" [Lihat, Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid I/476]

Ketiga, jika hal itu juga tidak dapat dilakukan karena dalam kondisi darurat, maka jenazah boleh langsung dikafani dan dishalati, tanpa dimandikan atau ditayamumkan. Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh mengambil langkah kemudahan (*al-masyaqqah tajlibut taisir*). Hal tersebut sebagaimana firman Allah, "Dan Dia tidak pernah sekalipun menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." [TQS. al-Haj: 78].

Juga sabda Rasulullah, "Dari Abi Hurairah Abdul Rahman bin Shakhr ra. berkata: "Saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: "Segala sesuatu yang aku larang buat kalian semua, maka jauhilah. Segala sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian semua, maka lakukan semampu kalian". Generasi sebelum kalian hancur disebabkan terlalu banyak bertanya (*protes*) dan menyelisih *para nabi mereka*." [HR Bukhari – Muslim].

Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh *Idaaratul Iftaa'* Kuwait menyatakan, "Sebagian ulama kontemporer mengatakan bahwa jenazah itu jika tidak dapat dimandikan karena terkena penyakit menular yang da-

pat menular kepada petugas yang memandikan jenazah, maka jenazah itu ditayammumkan.

Jika para ahli dalam kedokteran menetapkan adanya bahaya dari memandikan dan mentayamumkan bagi petugas yang memandikan dan mentayamumkan, maka jenazah itu dishalatkan tanpa dimandikan dan tanpa ditayamumkan."

Namun untuk melaksanakan fatwa di atas, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: "Sesungguhnya pendapat gugurnya memandikan dan mentayamumkan tersebut, tidaklah diambil (dilakukan) kecuali setelah melakukan prosedur-prosedur preventif yang wajib untuk mencegah penularan penyakit kepada petugas yang memandikan atau mentayamumkan. Dan bahwa para petugas itu haruslah orang yang terlatih dalam penanganan kasus-kasus penyakit (menular)."

Beginilah cara Islam memperlakukan jenazah kaum Muslim yang terkena penyakit menular.[] **Its**

Shalat dengan Shaf Renggang, Bolehkah?

Dalam suasana pandemi global Covid-19, berkerumun menjadi hal yang harus dihindari, *physical distancing* menjadi hal yang harus dilakukan. Muncul pertanyaan, apakah boleh menjaga jarak ini diterapkan pula dalam shaf shalat? Sebab, biasanya shalat itu harus merapatkan barisan. Tidak boleh ada celah antar jamaah.

Dr Labib Najib menjelaskan tentang masalah itu. Menurut, shalat (orang yang berjamaah dengan membuat jarak) mereka sah. Ia mendasarkan hal itu kepada pendapat para pemuka ulama' mazhab Syafii, semoga Allah merahmati mereka. Mereka mengatakan bahwa kalau imam dan makmum di masjid berkumpul, maka status kemakmumannya sah dengan syarat, makmum mengetahui gerakan imamnya, dan tidak mendahului. Maksudnya, makmum tidak mendahului imamnya dalam posisinya.

Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah mereka mendapatkan keutamaan jamaah? Menurut as-Syihab ar-Ramli, mereka tetap mendapatkan keutamaan berjamaah.

Sementara menurut Ibn Hajar, jawabannya: Tidak. Redaksinya di dalam al-Manhaj al-Qawim, dengan matannya: "Disunahkan merapikan barisan. Perintah itu berlaku untuk setiap orang. Mulai dari imam sendiri, atau yang diseru, lebih tegas untuk mengikuti. Dengan ancaman bagi yang meninggalkannya. Maksudnya adalah menyempurnakan shaf yang pertama, dan seterusnya. Menutup celah, merapatkan tumit orang yang berdiri di sana.. Jika itu dilanggar, maka hal itu makruh (tidak disukai)."

At-Tarmasi memberikan komentar pernyataan Ibn Hajar (Juz IV/41): "Maksudnya, keutamaan jamaahnya hilang menurut pensyarah. Menurut as-Syuhab ar-Ramli, "Semua yang dimakruhkan dari segi berjamaah bisa menghilangkan keutamaannya (jamaah), kecuali merapikan barisan."

Hal itu dikemukakan oleh al-'Allamah Ba'asyan, semoga Allah merahmatinya, dalam Busyra al-Karim, hal. 362.

Lihat pula untuk tambahan, kitab al-Manhaj an-Nadhah, masalah no 362 juga.

Dr Labib Najib menegaskan, sebagai pendalaman fiqh: "Boleh jadi kemakruhan itu hilang, menurut Ibn Hajar al-Haitami, rahimahullah, jika memang ada kebutuhan untuk itu."

Kesimpulannya, shalat berjamaah di masjid dengan posisi makmum tidak rapat seperti shalat berjamaah di waktu normal (tak ada wabah) dalam rangka menjaga jarak (*social distancing/physical distancing*) demi mencegah kemungkinan penularan Covid-19, masih diperbolehkan. Dengan begitu, berjamaah di masjid masih bisa berlangsung.

Hanya saja yang perlu diperhatikan, seharusnya orang-orang yang sakit tidak memaksakan diri ikut shalat berjamaah. Selain itu, kebersihan masjid menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Pembersihan secara rutin menjadi hal yang tak bisa dihindarkan agar seluruh jamaah terbebas dari kemungkinan kuman/virus/bakteri.

Praktik masjid menggulung karpetnya dan meminta jamaah membawa sajadah masing-masing bisa menjadi terobosan untuk mencegah penularan penyakit. Pihak masjid pun lebih mudah membersihkan lantainya dengan pembersih anti kuman/bakteri.[] **Its/emje**



Nasib Bani Nadhir Pasca Perang

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Kaum Yahudi Bani Nadhir telah dikepung oleh Nabi *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* dan pasukannya. Pengepungan itu tidak berlangsung lama, hanya enam hari. Ada yang mengatakan lima belas malam. Allah membuat mereka dicekam ketakutan, sehingga mereka bersiap-siap untuk menyerahkan diri dan meletakkan senjata. Mereka mengirim pesan kepada Rasulullah, *"Kami bersedia keluar dari Madinah"*.

Rasulullah memberi mereka kesempatan untuk meninggalkan Madinah bersama keluarga mereka. Mereka juga diizinkan membawa harta benda mereka sebanyak yang bisa dibawa oleh seekor unta. Sementara itu, senjata tidak boleh dibawa.

Mereka pun turun dari benteng dengan kesediaan untuk mematuhi syarat tersebut. Mereka merobohkan rumah mereka sendiri untuk diambil pintu-pintu dan jendelanya. Bahkan ada yang sempat membawa tiang-tiang penyangga atap rumahnya. Mereka mengajak istri dan anak-anak mereka dan berusaha membawa serta 600 ekor unta. Mayoritas dari mereka terutama para pembesarnya seperti Huyay bin Akhthab dan Salam ibn Abul Huqaiq, menuju Khaibar sedangkan sisanya pergi ke Syam. Di antara mereka hanya dua orang yang menyatakan keislaman, yaitu Yamin bin 'Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Keduanya tetap bisa menguasai harta bendanya.

Rasulullah melucuti senjata Bani Nadhir dan menguasai tanah, rumah, dan harta benda yang mereka tinggalkan. Dalam hal persenjataan, baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* memperoleh 50 baju besi, 50 perisai, dan 340 pedang.

Harta, tanah dan rumah Bani Nadhir menjadi milik Rasulullah seluruhnya, bukan hanya seperlima. Allah memberikannya khusus kepada baginda, dan kaum Muslim sama sekali tidak mengusiknya. Setelah itu, baginda berhak memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* membagikannya, terutama kepada orang-orang Muhajirin awal, dan sebagian diberikan kepada Abu Dujanah dan Sahl bin Hunaif dari Anshar. Karena keduanya sangat miskin. Dari harta itu, baginda juga mengambil untuk nafkah keluarga baginda selama setahun. Persenjataan dan perlengkapan perang yang tersisa dijadikan sebagai persediaan untuk membela agama Allah.

Perang Bani Nadhir itu terjadi pada bulan Rabiul Awal 4 H atau Agustus 625 M. Allah menurunkan keseluruhan surah al-Hasyr tentang peristiwa ini. Di dalamnya Allah melukiskan proses eksodus orang-orang Yahudi, yang menceritakan sepak terjang orang-orang munafik, menjelaskan hukum harta fa'i, memuji sahabat Muhajirin

dan Anshar, menegaskan kebolehan menebang dan membakar sesuatu di daerah musuh demi kemaslahatan perang dan tidak termasuk perbuatan merusak di muka bumi.

Allah juga menasihati orang-orang Mukmin agar menjaga ketakwaan, dan mempersiapkan bekal akhiratnya, kemudian menutup surat itu dengan pujian kepada Dzat-Nya sendiri dan menjelaskan beberapa nama dan sifat-Nya. Ibn 'Abbas ber-

memerangi rekan kami itu atau kami akan melakukan begini dan begitu. Tidak ada lagi jarak bahkan antara kami dan gelang kaki istri kalian".

Sesampainya surat ini kepada Bani Nadhir, mereka sepakat untuk mengkhianati Rasulullah. Mereka mengirim utusan untuk menyampaikan pesan kepada baginda, *"Utuslah 30 sahabatmu, sementara kami akan mengirimkan 30 Rabi kami. Kita bertemu di tempat ini dalam posisi yang seja-*

Mereka kemudian menyusulkan pesan, "Bagaimana kita semua bisa saling memahami, sementara jumlah kita cuma 60 orang. Kirimkanlah tiga sahabatmu, sementara tiga Rabi kami akan menemuimu. Mereka akan mendengarkan dakwahmu. Jika mereka beriman, kami semua akan ikut beriman dan membenarkanmu."

Maka Nabi *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* berangkat bersama tiga sahabatnya sementara Bani Nadhir siap dengan senjata untuk menghabisi baginda. Namun, di luar dugaan, seorang perempuan Bani Nadhir mengutus seseorang menemui saudaranya, seorang lelaki Muslim Anshar. Dia membocorkan rencana pengkhianatan Bani Nadhir terhadap Nabi *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama*. Maka langsung saja saudaranya mengejar baginda sampai tersusul dan menjelaskan ikhwal pengkhianatan ini, sebelum baginda sampai ke tempat mereka.

Mendengar informasi itu, baginda pun yang balik pulang ke Madinah. Esoknya Nabi *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* pergi ke perkampungan Bani Nadhir bersama pasukan, lalu mengepung mereka. Baginda bersabda, *"Kalian tidak lagi aman hidup bersamaku, kecuali jika bersedia menyepakati syarat-syaratku."* Akan tetapi, mereka menolak kesepakatan sehingga Rasulullah menyerang mereka pada hari itu juga.

Esok harinya baginda berangkat ke tempat Bani Quraizah dengan membawa pasukan kavaleri dan infanteri, dan meninggalkan Bani Nadhir. Baginda mengajak mereka menyepakati perjanjian damai, dan mereka bersedia menandatangani sehingga beliau beranjak meninggalkan mereka.

Esoknya lagi, Rasulullah kembali mendatangi Bani Nadhir dengan membawa pasukan infanteri. Sampai waktu itu, mereka belum mau menerima tawaran damai baginda. Karenanya, baginda menyerang sampai mereka terdesak dan akhirnya bersedia keluar dari Madinah. Mereka diizinkan membawa harta sebanyak yang bisa diangkut dengan unta, kecuali persenjataan.

Setelah itu, berlangsunglah eksodus Bani Nadhir dengan membawa perbekalan sebanyak yang bisa diangkut unta, berupa harta benda, termasuk pintu-pintu dan tiang-tiang rumah. Mereka sendiri yang merobohkan dan menghancurkan rumah-rumah mereka, lalu membawa tiang-tiang yang masih layak dipakai. Pengusiran mereka merupakan awal berkumpulnya Yahudi di Syam.

Begitulah nasib Bani Nandhir, pasca perang. Mereka kalah, dan akhirnya diusir dari Madinah, karena terbukti berkhianat kepada Rasulullah *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* dan kaum Muslim. Mengkhianati perjanjian, dan berkhianat kepada negara.[]



Rasulullah melucuti senjata Bani Nadhir dan menguasai tanah, rumah, dan harta benda yang mereka tinggalkan. Dalam hal persenjataan, baginda Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama memperoleh 50 baju besi, 50 perisai, dan 340 pedang.

komentar tentang surah al-Hasyr, "Ini untuk Bani Nadhir". Ini adalah ikhtisar dari Ibn Ishaq dan mayoritas sejarawan, seputar perang Bani Nadhir.

Abu Dawud dan Abdurrazzaq meriwayatkan pemicu lain dari perang ini yaitu surat kafir Quraisy kepada golongan Yahudi usai Perang Badar. *"Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang ahli dalam mengepung dan bertahan. Maka bersediakah kalian*

jar agar mereka mendengarkan dakwahmu. Jika mereka membenarkan dan beriman kepadamu, kami semua akan ikut beriman."

Nabi *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* dan 30 sahabatnya berangkat. Demikian pula 30 Rabi Yahudi. Namun, Bani Nadhir berkata satu sama lain, *"Mana mungkin kita sanggup menghadapinya, sementara dia didampingi oleh 30 sahabatnya mereka semua orang-orang berani mati."*



MULTAQA ASATIDZ BOGOR MEMBANGUN SINERGI

Bogor - Sekira 80 ustadz dari Ciomas dan Dramaga serta warga hadir *Multaqa Asatidz: Membangun Sinergi untuk Meraih Kemuliaan Islam dan Kaum Muslimin*, Ahad (15/3) di Majelis Darus Surur 17 al-Mahmudiyah, Cilubang, Bogor.[]



MENELADANI PERJUANGAN RASULULLAH SAW

Jember - Sejumlah ustadz dan remaja mengikuti *Multaqa Ulama Aswaja Jember: Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW*, Kamis (12/3) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jember.[]



TRAGEDI MUSLIM INDIA, BUKTI GAGALNYA PAHAM NASIONALISME

Nganjuk - Tragedi Muslim India merupakan bukti gagalnya paham nasionalisme. Begitulah kesimpulan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam *Multaqa Ulama*, Jumat (13/3) di Mushala Kyai Abdul Fattah Ngetos, lereng Gunung Wilis Nganjuk.[]



RAJAB BULAN PENEGAKAN HUKUM ALLAH

Sumenep - *Multaqa Ulama* bersama Tokoh Masyarakat membahas Rajab sebagai bulan penegakan hukum Allah, Sabtu (14/3) di Majelis Taklim Al Hidayah Sumenep.[]



KHILAFAH PELINDUNG KAUM MUSLIMIN

Pasuruan - Sejumlah kiai dan ustadz mengikuti *Multaqa Ulama Aswaja Pasuruan: Khilafah Pelindung Kaum Muslimin*, Sabtu (14/3) di LPI Al Fath, Pasuruan.[]



KHILAFAH PEMERSATU DAN PERISAI UMAT

Surabaya - Sejumlah ustadz, tokoh masyarakat dan remaja menghadiri *Multaqa Ulama Aswaja Surabaya: Khilafah Pemersatu dan Perisai Umat*, Ahad (15/3) di kediaman Ustadz H. Soeprajogi, Mojo, Surabaya.[]



2020 TAHUN UMAT ISLAM

Jombang - Sembilan belas kiai, ustadz, tokoh masyarakat dan beberapa santri hadir *Multaqa Ulama Aswaja: 2020 Tahun Umat Islam*, Sabtu (14/3) di Tembelang, Jombang.[]



KEMBALIKAN JATI DIRI MUSLIM SEBAGAI KHAIRU UMMAH

Wonogiri - Tak kurang dari 50 ustadz dan tokoh masyarakat menghadiri *Jalsah 'Ammah Ulama: Kembalikan Jati Diri Muslim sebagai Khairu Ummah*, Sabtu (14/3) di Wonogiri.[]

Kebijakan Umar Melaksanakan "Sunah Lockdown"

Khalifah kedua, Umar bin al-Khattab *radhiyallahu 'anhu* pernah dihadapkan pada kasus wabah menular ketika sedang berkunjung ke Syam. Wabah itu terjadi di daerah Amawash, Palestina.

Apa sikap Khalifah Umar? Beliau tidak berpasrah diri dan melanjutkan rencananya mengunjungi daerah terjangkiti wabah tersebut seraya menyerukan sahabat yang lain untuk berdoa menerima yang mungkin akan menimpa mereka. Sebaliknya, Khalifah Umar mengambil keputusan tegas membatalkan rencana kunjungan tersebut yang membuat banyak sahabat protes atas sikap Umar itu.

Riwayat lengkapnya sebagai berikut:

Ketika Umar pergi ke Syam, setelah sampai di Saragh, pimpinan tentara datang menyambutnya. Antara lain terdapat Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada Umar, bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Ibnu Abbas berkata, Umar berkata, "Panggil ke sini para pendahulu dari orang-orang Muhajirin!" Maka kupanggil mereka, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka.

Kata Umar, "Wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Bagaimana pendapat kalian?", Mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kepada Umar; "Anda telah keluar untuk suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat, tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja." Sebagian lain mengatakan, "Anda datang membawa rombongan besar yang di sana terdapat para sahabat Rasulullah SAW. Kami tidak sependapat jika Anda menghadapkan mereka kepada wabah penyakit ini." Umar berkata, "Pergilah kalian

dari sini!" Kemudian Umar berkata lagi, "Panggil ke sini orang-orang Anshar!"

Maka aku memanggil mereka, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kebijaksanaan mereka sama dengan orang-orang Muhajirin. Mereka berbeda pendapat seperti orang-orang Muhajirin. Maka kata Umar, "Pergilah kalian dari sini!" Kata Umar selanjutnya, "Panggil ke sini pemimpin-pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum penaklukan Makkah!" Maka aku (Ibnu Abbas) memanggil mereka.



Ternyata mereka semuanya sependapat, tidak ada perbedaan. Kata mereka, "Kami berpendapat, sebaiknya Anda pulang saja kembali bersama rombongan Anda dan jangan menghadapkan mereka kepada wabah ini. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian!"

Kemudian Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab,

"Mengapa kamu bertanya demikian hai Abu 'Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Beliau menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukanlah jika engkau menggembalkannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala dengan takdir Allah?"

Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah tiba-tiba datang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin 'Auf yang belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri."

Mendengar itu, akhirnya Umar mengucapkan puji syukur kepada Allah, setelah itu beliau pergi. Di dalam Hadis Ma'mar ada tambahan Umar berkata, "Bukankah jika kamu menggembalkan unta di tempat yang tandus dengan meninggalkan tempat yang subur berarti kamu telah membuatnya lemah?"

Ketika itu Abu Ubaidah menjawab, "Ya." Kemudian Umar berkata, "Maka berangkatlah! Maka Abu Ubaidah berangkat hingga sampai di Madinah, lalu dia berkata, "Insya Allah ini adalah tempat tinggal." [Muslim, Shahih Muslim, No. 4114]. **har**

KRISTOLOGI

Paskah, Budaya Pagan?

Oleh: **Hj Irena Handono**, Pakar Kristologi, Pendiri Irena Center

Bagaimana awal mula perayaan Paskah dan urgensinya bagi umat Kristen? Umat Kristen menyebut Paskah sebagai *Easter*. Sedangkan umat Yahudi juga memperingati Paskah yang mereka sebut *Pesach*. Walaupun keduanya berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan, Paskah umat Kristen dan Yahudi berbeda.

Pesach/Passover

Pesach/Paskah (Ibrani) adalah perayaan Yahudi yang diadakan pada tanggal 14 bulan Nisan (bulan Yahudi) sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir di bawah Nabi Musa as atau yang dikenal dengan Exodus. Malam sebelumnya, Tuhan menyuruh mereka mempersembahkan korban anak domba dan makan roti tidak beragi, darah anak-domba itu digunakan untuk memberi tanda pada rumah-rumah orang Yahudi untuk membedakannya dengan rumah-rumah orang Mesir (Kel. 12:1-28).

Easter

Sedangkan Paskah (*Easter*) adalah perayaan umat Kristen untuk memperingati kebangkitan Yesus. Tanggalnya

berubah-ubah tapi pasti jatuh di hari Minggu, sehingga disebut Minggu Paskah. Istilah *Easter* berakar dari bahasa Inggris Kuno *Eastre* atau *Eostre*. Nama ini mengacu pada nama Dewi *Eostre*/Astarte dari budaya Anglo-Saxon di Jerman. Festivalnya disebut Ostara, yakni untuk menghormati Astarte (Dewi Kesuburan) yang berlangsung di awal musim semi. Simbol kelinci dipakai sebagai lambang kesuburan karena kelinci adalah binatang yang mudah beranak-pinak. Dan telur sebagai simbol awal kehidupan.

Easter, sebuah festival untuk menghormati Astarte, Dewi Kesuburan, yang dilambangkan kelinci dan telur sebagai simbol kesuburan umum dalam budaya pagan. (Encyclopedia Britannica, 1982 Edition, vol. 4, halaman 501.)

Yesus seperti yang telah dibahas di beberapa tulisan yang lalu, adalah berasal dari Bani Israel yang beragama Yahudi. Ia mengikuti agama Nabi Musa as juga seluruh tradisi agama Yahudi termasuk *Pesach*. Hal ini terbukti dengan peristiwa Perjamuan Malam yang dilakukannya sesuai ritual Yahudi dengan menggunakan roti tak beragi (Luk. 22:7-38). Perjamuan Malam ini kemudian hari oleh umat Kristen disebut sebagai Perjamuan Kudus.

Sinkretisme

Lalu bagaimana budaya Pagan "Easter" berubah menjadi hari Kebangkitan Yesus sebagai Tuhan? Di sinilah letak titik kritis dari pondasi keimanan Kristen. Dari semula Yesus telah melarang murid-muridnya untuk menyebarkan risalah yang dibawanya kepada orang-orang di luar Bani Israel.

Namun ini dilanggar. Paulus yang bukan murid Yesus tapi justru pemburu/pembunuh pengikut Yesus, mengaku sebagai murid dan ikut-ikutan menyebarkan risalah Yesus.

Paulus menyampaikan hal yang berbeda. Yesus melarang minum *khamr* tapi Paulus membolehkan. Yesus mewajibkan khitan, justru Paulus melarang. Yesus mengajarkan monotheisme Paulus mengajarkan dualisme (Tuhan Ayah dan Tuhan Anak). Ia menyebarkannya kepada bangsa Romawi.

Imperium Romawi sangat kuat akan budaya paganis. Agama mereka adalah menyembah Dewa Matahari, *Sol Invictus*. Ketika agama baru Kristen yang disebarluaskan oleh Paulus lambat laun memasuki wilayah tersebut maka terjadilah perbenturan-perbenturan budaya yang hampir membelah Roma.

Atas dasar kepentingan politik demi

keutuhan imperium Roma maka diselenggarakanlah Konsili Nicea 325 M. Pertentangan Yesus manusia atau Tuhan dalam Konsili ini akhirnya memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan Anak. Inilah solusi yang dilakukan Konstantin penguasa tertinggi Romawi untuk menyelamatkan imperiumnya.

Ia membuat agama *hybrid*, mencampurkan politeisme yang berasal dari agama pagan dan monoteisme yang berasal dari agama Yahudi dalam suatu konsep baru yang disebut Trinitas. Tiga dalam satu, satu dalam tiga.

Lalu bagaimana membuat 'benang merah' antara Yesus yang dikenal luas sebagai manusia dan Yesus sebagai tuhan. Maka dalam konsili yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin tersebut menetapkan hari Paskah (*Easter*) sebagai Hari Kebangkitan Yesus.

Yesus dikatakan mati setelah disalib lalu dikuburkan dan setelah tiga hari kemudian bangun/bangkit dari kematian untuk naik ke langit dan duduk di kanan tuhan Bapa. Manusia biasa tidak mungkin melakukan hal tersebut, sehingga masuk akal Yesus adalah tuhan. Hari Paskah harus dirayakan tepat pada hari Minggu walaupun tanggalnya selalu berubah-ubah. **har**



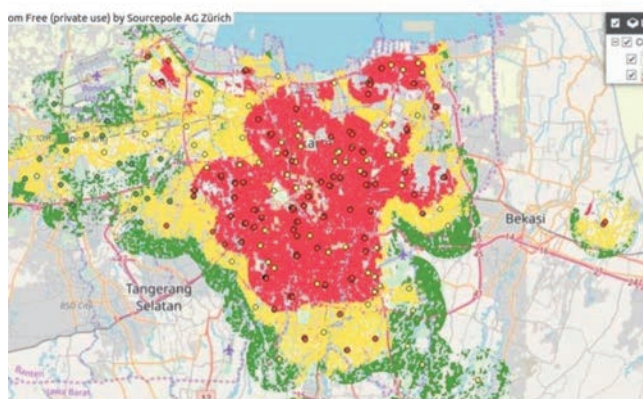
Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**

WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Presiden Jokowi telah menyatakannya sebagai bencana nasional non alam. Penanggulangan bencana memerlukan alat bantu berupa informasi geospasial kebencanaan atau peta-peta

juga dipengaruhi usia (lansia lebih rentan), pendidikan (makin rendah literasi makin rentan), pendapatan (orang miskin lebih rentan, karena tempat tinggalnya atau lingkungannya sempit, sulit melakukan *physical-distancing*), jenis pekerjaan (beberapa profesi seperti sektor kesehatan, pelayanan publik,

perdagangan dan jasa, juga sektor informal lebih rentan), penggunaan transportasi massal, latar belakang kesehatan, dan terakhir adalah preferensi keagamaan fatalistik.

Membuat peta kerentanan seperti ini tidak mudah. Data yang bisa dipasok dari hasil sensus biasanya hanya data usia, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Adapun data lainnya harus didapat dari



■ Webgis sebaran Covid-19 di Jakarta dari tim Ahli UI (*kompas.com*, 20/3/2020).

bencana. Penanggulangan bencana terdiri atas 3 siklus, yaitu pra-bencana (potensi bencana untuk mitigasi), saat-bencana (sebaran bencana untuk tanggap darurat) dan pasca-bencana (dampak bencana untuk rehabilitasi). Demikian juga peta-peta bencana.

Saat ini, kita baru memiliki peta sebaran Covid-19 yang dibuat berdasarkan laporan tentang domisili Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan kasus positif covid-19. Peta seperti itu seharusnya cukup detail. Idealnya di level satuan permukiman (setingkat Rukun Warga, RW), mengingat mereka memiliki ruang publik bersama, seperti rumah ibadah, taman, atau minimarket. Atau juga aktivitas bersama, seperti olahraga, arisan atau hajatan. Informasi zona merah (*red zone*) di tingkat kecamatan tak cukup membantu upaya *physical distancing*.

Idealnya peta ini bisa diakses via internet, dan pengguna mendapat peringatan ketika mendekati *red zone*. Andai setiap ODP dan PDP diwajibkan melapor tiap hari melalui gadgetnya, maka pergerakannya dapat dipantau, dan orang yang sehat dapat menghindarinya.

Peta mitigasi disiapkan berdasarkan peta potensi dan peta kerentanan. Peta Potensi Covid-19 disiapkan untuk daerah yang belum memiliki kasus. Kita tidak ingkari, bahwa ada daerah-daerah yang lebih rentan. Mereka adalah: daerah dengan hubungan sosial-ekonomi yang erat dengan zona merah. Seperti ketika Jakarta menjadi Zona Merah, otomatis Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi menjadi amat rentan. Kerentanan

survei baru atau melalui media sosial.

Bencana covid-19 juga terkait kapasitas layanan kesehatan. Model prediksi dari pengalaman di Tiongkok (RRT) atau Korea Selatan (Korsel) tak bisa kita pakai. Jumlah dokter per 1.000 penduduk, di Korsel 2,4; di RRT 1,8; sedang di Indonesia hanya 0,4. Jumlah kasur di rumah sakit per 1.000 penduduk di Korsel 11,5; di RRT 4,2; sedang di Indonesia cuma 1,2. Fasilitas ICU per 100.000 penduduk, di Korsel 10,6; di RRT 3,6; sedang di Indonesia hanya 2,7. Angka-angka itu baru rata-rata. Tentu ada yang lebih rendah lagi, atau lebih rentan terhadap Covid-19.

Dengan peta mitigasi ini, pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan daerah rentan agar kurva kesakitan bisa lebih landai, dan angka korban jiwa bisa ditekan.

Peta yang ketiga adalah peta



■ Sebuah peta dunia yang terukir di bola perak besar oleh Al-Idrisi pada tahun 549 H / 1154 M.

rehabilitasi. Bencana Covid-19 tak hanya menimpa mereka yang sakit. Akan banyak daerah tanpa kasus Covid-19, namun tetap menanggung dampak ekonominya.

Di Wuhan yang terpaksa diisolasi

Ibn Battuta
أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي
الطنجي بن بطوطة



■ Ilustrasi buku oleh Léon Benett yang diterbitkan pada tahun 1878 memperlihatkan Ibn Battutah (kanan) dan pemandunya di Mesir

hampir dua bulan, angkutan umum libur, dan SPBU ditutup. Ekonomi berhenti. Pemerintah membantu suplai logistik agar penduduk tetap memperoleh makanan, sanitasi pribadi dan energi. Jumlah orang dengan kesulitan ekonomi terdata jelas. Negara punya angka yang akurat. Mereka bahkan menggunakan teknologi 4.0, yaitu *bigdata*, dengan memanfaatkan *smartphone* yang kini nyaris ada di semua orang.

Di Indonesia, masih sulit melakukan ini, karena negara memang faqir data. Andaikata *lockdown* dilakukan seperti di Wuhan atau beberapa negara lain, anggota Polri dan TNI paling hanya bisa dikerahkan di jalan-jalan utama. Sedang di dalam permukiman atau desa-desa, perlu kesadaran umum agar tak ada penduduk yang bandel. Yang jelas, sektor informal akan sangat terpukul.

Dampak ekonomi pasti terjadi di sektor pariwisata. Kita bisa petakan sentra-sentra sektor pariwisata ini. Dampak ekonomi lainnya adalah industri yang melibatkan impor bahan baku atau ekspor hasilnya ke negeri-negeri yang juga terkena Covid-19. Kebijakan *Working From Home* hanya bisa dilakukan pekerja yang mengolah data. Adapun pekerja pabrik, sektor logistik, dan pelayanan publik tak ada yang bisa dilakukan dari rumah.

Sayang kita masih faqir data untuk bisa memetakan ini semua dengan cepat. Kita berkejaran dengan waktu. Ibarat

perang, kita saat ini hanya mengandalkan tim medis di garis depan. Tetapi mereka faqir senjata, di atas mereka tidak ada panglima, dan mereka berangkat tanpa dibekali peta.

Padahal sejarah Islam menunjukkan contoh yang luar biasa bagaimana menghadapi aneka bencana. Ada pemimpin yang terpercaya, karena perbuatannya sesuai kata-katanya, dan kehidupan pribadinya sederhana. Maka ketika mereka memerintahkan rakyatnya untuk menaati syariat (semisal karantina wilayah wabah), rakyat mematuhi. Mereka menjamin logistik warga yang dikarantina. Dan motivasi mereka agar warga saling berlomba dalam kebaikan ke tetangganya, juga dipatuhi. Karena warga melihat pemerintahnya tidak berpangku tangan saja, apalagi malah meremehkan bencana, atau sibuk urusan lain yang bukan prioritas warga.

Pemimpinnya ini juga tak berhenti pada ikhtiar dunia. Namun juga senantiasa menasehati rakyatnya untuk muhasabah. Boleh jadi banyak dosa-dosa selama ini sehingga Allah menurunkan wabah untuk menguji siapa yang akan membersihkan



■ Ibn Khaldun pada sebuah uang Tunisia.

dirinya. Wabah juga diatasi dengan ikhtiar langit, dengan sabar, tawakkal dan doa.

Dan saat itu, para ilmuwan juga tak mau ketinggalan. Mereka menggunakan berbagai ilmu yang dimiliki untuk mengatasi bencana. Mereka berlomba dengan aghniya yang menyulap istananya menjadi rumah sakit, atau pedagang besar yang menyedekahkan seluruh barang dagangannya untuk meringankan beban warga.

Ada dokter yang mengembangkan vaksin. Ada insinyur yang memperbaiki sumber air dan sanitasi. Dan ada juga ahli geografi yang menyumbangkan kontribusi berupa peta. Yang paling menonjol di antara geografer Muslim adalah Al-Idrisi (1099 - 1166 M) sang pembuat bola dunia dari Sisilia; Ibn-Battutah (1304- 1369 M) penulis kitab *ar-Rihlah* yang legendaris dari Maroko; dan Ibn-Khaldun (1332 - 1406 M) dari Tunisia yang menulis sejarah dunia dan geografi yang komprehensif.[]

Perjanjian Lausanne dan Pukulan Penghabisan kepada Khilafah

Pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh pemerintahan Kemal antara lain sekularisme, sistem ekonomi etatisme dan puncaknya penghapusan Kekhalifahan Turki Utsmani pada 3 Maret 1924.

Perjanjian Lausanne (1923) adalah perjanjian yang dilakukan Sekutu dan golongan sekuler nasionalis Turki. Perjanjian tersebut dilakukan pasca Perang Dunia I ditandatangani di Lausanne, Swiss pada 24 Juli 1923.

Sebelumnya, akhir Perang Dunia I diselesaikan dengan Perjanjian Sevres (1920). Namun golongan sekuler nasionalis Turki tidak menyetujui hasil dari Perjanjian Sevres karena merugikan Turki.

Reaksi Sekutu terhadap penolakan itu menyebabkan Perang Kemerdekaan Turki (1921-1922). Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Sekutu dan Turki melakukan perundingan di Kota Lausanne. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Lausanne.

Perjanjian Lausanne telah mewujudkan tujuan dari Pakta Nasional. Turki telah memperoleh kembali wilayah-wilayah yang diinginkannya. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, negara sekuler nasional Turki mendapat pengakuan internasional.

Perjanjian Lausanne berdampak luas bagi bangsa Turki khususnya dan kaum Muslimin pada umumnya. Perjanjian Lausanne telah membuat Republik Turki berdaulat. Setelah perjanjian itu, Republik Turki memproklamasikan kemerdekaannya dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya.

Di bawah pemerintahan Kemal, dilakukan pembaruan-pembaruan di Turki. Antara lain, sekularisme, sistem ekonomi etatisme dan puncaknya penghapusan Kekhalifahan Turki Utsmani pada 3 Maret 1924.

Tindakan Penghabisan Khilafah

Meskipun penghapusan kesultanan, pemindahan ibu kota ke Ankara, dan deklarasi republik semua disertai oleh komitmen Majelis Nasional Agung Turki (Grand National Assembly/GNA) untuk menjaga keberadaan kekhalifahan, jelas bahwa Kemal mulai meragukan posisi lembaga Islam tersebut di negara baru didirikan.

Oleh karenanya keadaan khusus seputar penghapusan khalifah telah diperdebatkan sejak saat itu. Bagaimana pun bahwa keputusan yang dibuat oleh GNA pada 3 Maret 1924 dilatarbelakangi oleh masalah lokal maupun yang lebih luas.

Di tingkat lokal, insiden yang secara luas diingatkan sebagai tindakan untuk menghapuskan khalifah itu terkait dengan surat Muslim India yang dikirim kepada Perdana Menteri Turki, Ismet Pasha.

Sentimen-sentimen pan-Islam telah meningkat di kalangan umat Islam India sejak akhir abad ke-19. Pada tahun 1919, ketika Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan destruktif, para pemimpin pan-Islam India mengorganisasi Konferensi Khilafat (Khilafah) dengan membentuk Khilafat Movement di seluruh India.

Khilafat Movement adalah gerakan massa politik-keagamaan, tidak hanya diikuti oleh para pemimpin dan aktivis Muslim Sunni, tetapi juga oleh tokoh-tokoh Syi'ah dan Isma'ili India, yang tidak selalu berkomitmen untuk kesetiaan kepada Kekhalifahan Utsmaniyah.

Apa yang menyatukan mereka mungkin adalah keinginan untuk merebut kesempatan untuk mengorganisasi Muslim di India dan menegaskan identitas Islam mereka.

Pada 24 November 1923 tiga koran harian Istanbul menerbitkan teks surat kepada Ismet Pasha, yang ditandatangani oleh dua pemimpin Muslim India, Aga Khan (Isma'ili; 1877-1957) dan Amir Ali (Syiah; 1849-1928). Tertulis tampaknya atas nama Khilafat Movement, surat itu menunjukkan bahwa pemisahan khalifah dari kesultanan telah meningkatkan signifikansi (makna)-nya bagi umat Islam secara umum.

Dalam sebuah surat yang secara luas tersebar di kalangan pejabat Turki, dan kemudian dicetak di surat kabar *The Times of London* pada 14 Desember 1923, Khan mengklaim bahwa "Islam, sebagai kekuatan moral dan pemersatu yang besar, telah kehilangan pengaruhnya di kalangan penganut Sunni karena menurunnya martabat dan wibawa khalifah, termasuk pengaruh dan kekuatannya."

Khan berpendapat bahwa hilangnya kekuasaan duniawi tidaklah relevan karena khalifah hanya bertugas "menobatan gelar kepada raja dan para pemuka agama untuk dapat memimpin pemerintahan dan ritual ibadah, dan itu sama saja dengan otoritas sekuler."

Ia juga menyarankan bahwa jika "ingin mempertahankan posisi Islam sebagai kekuatan moral yang besar di dunia, maka posisi dan martabat khalifah, dalam kondisi apa pun, tidak boleh lebih rendah dari Paus Gereja Roma."

Kemal dan para pendukungnya dengan cepat mengklaim bahwa intervensi yang dilakukan oleh mereka, yang juga dicap sebagai antek Inggris itu, merupakan upaya untuk meruntuhkan republik yang baru saja terbentuk. Mereka juga menyatakan bahwa khilafah memang harus dihapuskan "agar institusi itu tidak dimanfaatkan sebagai instrumen politik", yang dapat mengganggu kestabilan



republik yang baru berdiri.

Konflik Internal

Surat Muslim India di atas bukan satu-satunya faktor di balik langkah membubarkan. Faktor lainnya adalah berupa konflik internal di sesama golongan sekuler nasionalis. Selama berbulan-bulan setelah deklarasi, hubungan republik dalam kubu nasionalis memburuk.

Kolega-kolega kritis, termasuk Husain Rauf, Refet Bele, Ali Fuat, dan Kazim Karabekir, serta lingkaran oposisi di Istanbul, melihat deklarasi republik dan asumsi Kemal tentang kepresidenan sebagai langkah lebih lanjut menuju pembentukan pemerintahan otoriter yang berputar di sekitar Ghazi.

Oleh karena itu, dalam konteks saat itu, surat Muslim India diterbitkan di tengah-tengah suasana saling curiga dan paranoia yang intensif, karena kalangan Kemalis tampak percaya bahwa Khalifah mengizinkan dirinya sendiri digunakan dalam perjuangan internal untuk mendapatkan kekuasaan.

Perang terakhir berasal dari Khalifah sendiri. Pada 22 Januari 1924 Ismet melaporkan kepada Mustafa Kemal, bahwa sekretaris pertama Khalifah telah menghubungi pemerintah, mengungkapkan ketidaksenangan pada serangan terhadap orang-orangnya di media dan keputusan pemerintah untuk menghalangi pejabat yang mengunjungi Istanbul untuk beraudiensi dengannya.

Khalifah juga meminta pemerintah untuk mengirim dana yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menutupi biaya kantornya. Membalas Perdana Menteri, Kemal mendapatkan perhatian Ismet terhadap tanda-tanda yang semakin meningkat bahwa Abdul Mejid pada dasarnya berperilaku seperti sultan, bukan khalifah dengan kekuatan

agama simbolis, dan menyarakannya untuk menanggapi keluhan Khalifah dengan cara yang paling keras.

Pada bulan Februari, ketika ia menemani Marshal Fevzi (Çakmak) dalam mengawasi manuver militer di Izmir, Kemal mengirim Ismet dan Menteri Pertahanan Kazim Pasha (Özlap) untuk bergabung dengan mereka. Pada Februari Kemal meyakinkan rekan setianya bahwa sudah saatnya menghapus khilafah sekali dan untuk selamanya.

Kemal dan kawan-kawannya kembali pada 23 Februari ke Ankara. Dia mulai mempersiapkan kelompok parlemen dari Partai Rakyat untuk resolusi-resolusi penting.

Pada 1 Maret Mustafa Kemal membuka sesi baru GNA. Dalam pidatonya dia menekankan beberapa poin, di antaranya adalah soal keberlangsungan institusi khilafah. Pembicaraan tersebut ditegaskan kembali pada hari berikutnya dalam pertemuan Partai Rakyat yang berkuasa. Proposal politik yang diajukan ke pertemuan oleh Presiden dibahas dan kemudian disepakati.

Pada 3 Maret 1924 proposal tersebut disajikan kepada GNA. Mengingat mayoritas adalah pendukung Kemal baik di Partai Rakyat maupun GNA, mosi disetujui tanpa keberatan yang signifikan.

Proposal itu disediakan untuk penghapusan khalifah, deposisi khalifah, dan pembuangan semua anggota keluarga Utsmani dari wilayah Turki. Selain itu juga dihapuskannya Kementerian Agama dan Wakaf dan menempatkan urusan pendidikan di bawah otoritas negara.

Hari berikutnya, Abdul Mejid, Khalifah terakhir Utsmaniyah, dikawal dengan cara yang memalukan ke stasiun kereta api dan memakai kereta Orient Express menuju Paris untuk pengasingan selamanya.[] **Septian AW, sejarawan**



Oleh: Dr M Kusman Sadik

Akibat Corona Beragam Fakta Terbuka



Wabah virus corona kini semakin meluas. Sesuai yang dilaporkan laman resmi *worldometers.info*, hingga 30/3 telah ada 663.740 orang yang positif terinfeksi virus tersebut. Sebanyak 30.879 orang di antaranya telah meninggal dunia. Di Indonesia sendiri ada 1.285 orang yang positif terinfeksi dan 114 orang meninggal dunia.

Sejak pertengahan Maret lalu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah corona ini sebagai pandemi global. *Updated* data terakhir, Amerika Serikat kini menempati urutan teratas banyaknya kasus positif corona yang mencapai

123.750 orang. Kemudian Italia dengan jumlah kasus positif 92.472 orang dan Cina 81.439 orang.

Kasus pandemi corona ini telah membukakan mata terhadap berbagai fakta. *Pertama*, menunjukkan fakta lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah SWT. Virus corona, makhluk super mungil ini terbukti telah membuat 7,75 miliar manusia di seluruh dunia panik tidak berdaya. Padahal saat ini manusia telah mencapai titik puncak teknologi mutakhir 4.0.

Tidak hanya masyarakat umum, banyak elite penguasa pun dilaporkan positif corona. Di antaranya yang diberitakan oleh *BBC* adalah Pangeran Charles yang kini melakukan isolasi mandiri di Balmoral Skotlandia. Perdana Menteri Inggris, Menteri Dalam Negeri Australia, Menteri Kebudayaan Prancis, dan beberapa senator Amerika Serikat juga dinyatakan positif corona.

Virus corona telah memperkuat bukti Kemahakuasaan Allah SWT di alam semesta. Dia-

lah Allah pencipta virus dengan segala karakteristiknya ini. Hanya dengan hitungan minggu, dunia nyaris lumpuh akibat serangannya. Berbagai negara kini telah menyatakan diri *lockdown* akibat serangan makhluk yang tidak kasatmata itu.

Kedua, wabah corona telah membuka fakta rendahnya tingkat kepedulian negara di dunia dalam melindungi rakyatnya. Misalnya banyak negara yang berusaha menutupi fakta terjangkitnya virus ini. Mereka lebih mementingkan pencitraan bagi negaranya agar disebut layak dikunjungi ketimbang menyelamatkan rakyatnya yang terinfeksi corona.

Indonesia termasuk yang dikritik berbagai pihak karena dianggap kurang transparan pada masalah corona ini. Seperti yang diberitakan oleh *Republika* (22/3) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menuntut transparansi pemerintah terkait data tenaga medis yang terpapar virus corona. IDI menduga masih banyak yang berstatus terpapar corona

namun tidak segera dilakukan verifikasi oleh pemerintah.

Ketiga, wabah corona ini juga menunjukkan fakta lambatnya respon negara dalam menjaga keselamatan warganya. Ada kesan lebih memperhatikan kondisi ekonomi daripada keselamatan warganya. Indonesia termasuk yang ramai dikritik di dunia internasional terkait masalah ini. Pasalnya ketika saat itu banyak negara sudah membatasi pergerakan manusia, Indonesia justru membuka lebar-lebar pintu masuk wisatawan asing.

Pemerintah bahkan sempat diberitakan menganggarkan dana Rp 72 miliar bagi para *influencer*. Tugasnya menarik wisatawan yang batal ke Cina, Jepang, dan Korsel untuk berkunjung ke Indonesia. Tidak diberlakukannya *lockdown* hingga akhir Maret ini juga menimbulkan banyak tanda tanya. Padahal tingkat kematian (*mortality rate*) akibat virus corona di Indonesia saat ini sudah mencapai 8,9 persen, terkategori tertinggi di dunia.

Sebagai bahan perban-

dingan, sangat menarik artikel Dr Craig Considine yang dimuat media internasional *Newsweek* (17/3) yang berjudul "*Can the Power of Prayer Alone Stop A Pandemic Like the Coronavirus? Even The Prophet Muhammad Thought Otherwise*". Craig memuji kebijakan Nabi Muhammad SAW yang sangat peduli pada keselamatan umatnya yang saat itu Nabi langsung menerapkan *lockdown* ketika terjadi wabah penyakit. Menurut Craig itulah kebijakan *lockdown* pertama di dunia yang terjadi pada 14 abad yang lalu.

Itulah sebagian fakta yang perlu menjadi catatan di balik wabah corona ini. Pemerintah dengan berbagai kewenangannya memiliki peran sentral untuk menjaga dan melindungi keselamatan warganya. Sejarah telah mencatat bagaimana Rasulullah SAW dan para khalifah kaum Muslimin pada masa lalu telah memberikan teladan terbaik dalam hal kepeduliannya melindungi warganya. *Wallaahua'lam biash-shawaab*.

MEDIA GAUL



5 Tips Tetap Produktif Meski di Rumah Aja

Oleh: Ihsan Tampubolon, Aktivis Dakwah dan Youtuber Ideologis

Bro and sis, wabah pandemik coronavirus atau Covid-19 ini semakin hari semakin massif. Pandemi ini tidak lagi dipandang sebelah mata. Sebagian besar pejabat yang tempo hari dengan jumawanya menyatakan "*Indonesia siap menghadapi corona*", "*virus corona tidak akan hidup di negeri ini*", "*jangan lebay*" serta *statement* semisal lainnya, kini terpaksa menelan ludahnya sendiri. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, dampak wabah ini sudah telanjur tampak baik dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik.

Namun rupanya belum membuat RI 1 beranjak untuk mengeluarkan kebijakan *lockdown* karena berbagai pertimbangan yang terkesan mengada-ada. Apa tidak belajar dari kasus Italia dan Amerika, Pak?

Salah satu kebijakan yang merespon wabah ini adalah merumahkan seluruh siswa di negeri ini untuk sementara, begitu juga para karyawan baik PNS maupun swasta, demi memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Ujian Nasional ditiadakan dan kegiatan belajar mengajar, bagi yang memungkinkan, diselenggarakan secara *online*. Namun, sekilas sebagian besar siswa di negeri +62 mengartikannya sebagai liburan. Sehingga bukannya belajar di rumah sebagaimana yang diharapkan, justru malah habis waktunya dengan nyemil dan rebahan.

5 Tips Produktif

Tahukah kamu bahwa salah satu nikmat yang paling melenakan adalah waktu luang?

"Ada dua nikmat yang banyak manusia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, yaitu nikmat sehat dan waktu luang." (HR Bukhari no. 6412).

Dengan adanya peristiwa yang terjadi saat ini, justru para remaja memiliki waktu luang yang begitu berlimpah yang sebelum ini habis dipakai di sekolah. Meski kamu di rumah, ada banyak loh aktivitas yang bisa kamu lakukan agar #TetapProduktif. Berikut adalah 5 tips tetap produktif meski di rumah aja:

Pertama, berlatih ilmu baru. Kamu bisa tetap produktif dengan belajar ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di sekolah, misalnya ilmu desain grafis, animasi, fotografi, video editing, dan ilmu-ilmu menarik lainnya yang bisa kamu eksplorasi.

Kedua, olahraga di rumah. Meski kamu *ngga* bisa lagi meneruskan hobi bermain sepak bola (kecuali halaman rumah kamu sebesar punya Christiano Ronaldo), kamu tetap bisa olahraga di dalam rumah seperti senam, *pilates*, atau olahraga ritmik dengan ruangan yang kecil sekalipun.

Ketiga, waktu yang tepat untuk merekatkan kembali hubungan keluarga. Anggota keluarga yang pada hari normal sudah sangat jarang karena sibuk dengan urusan

masing-masing, kini "dipaksa" untuk senantiasa kumpul di rumah dan *ngga* boleh keluar kecuali urusan yang betul-betul urgen. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengikat kembali silaturahmi dengan orang tua, kakak, dan adik kamu di rumah.

Keempat, mengkaji Islam di rumah. Semakin canggihnya teknologi informasi-komunikasi abad 21 ini memungkinkan kamu untuk tetap bisa mengkaji Islam bersama para guru walau terpisah jarak. Banyak banget aplikasi *video call conference* yang bisa kamu gunakan agar tetap berinteraksi dengan guru maupun teman-teman ngaji kamu. Bagi yang belum pernah mengkaji Islam, ini saatnya buat kamu memanfaatkan waktu luang untuk mengenal Islam lebih dalam.

Kelima, dakwah di dunia digital. Inilah urgensinya kamu memiliki aset dakwah dalam berbagai platform digital yang semakin digandrungi oleh generasi milenial, seperti Youtube, Facebook, maupun Instagram. Meskipun di rumah, kamu tetap bisa mensyiarkan ilmu-ilmu Islam walau jarak terpisah ribuan kilometer. Di satu sisi kita harus bersabar dan menjaga diri agar terhindar dari musibah Covid-19 ini, dan di sisi lainnya para aktivis dakwah milenial justru semakin terbakar memanfaatkan wasilah dan cara baru untuk tetap dakwah dalam kondisi apa pun.[]

Memangun Ketahanan Keluarga



Karena itu, mengejar kesetaraan gender, sampai kapan pun akan sulit. Ibarat fatamorgana, laki-laki dan perempuan mustahil setara.

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga menemukan batu sandungan. Masih banyak pasal-pasal yang dianggap kontroversi.

Kalangan pegiat kesetaraan gender bahkan menolak mentah-mentah. Alasannya, RUU tersebut tidak diperlukan karena sudah ada UU Perkawinan, UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Dikhawatirkan akan tumpang tindih.

Lagipula, pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga dituduh terlalu mencampuri urusan privat. Hanya mendomestikasi perempuan. Membatasi peran publik dan malah mengembalikan perempuan ke dalam rumah. Padahal, kata mereka, banyak perempuan berkapasitas bagus yang harus diberdayakan di ruang publik.

Tak hanya itu, penolakan juga karena alasan materi. Kaum perempuan adalah penopang roda-roda perekonomian. Separuh dari perempuan Indonesia, bekerja membanting tulang demi mendapatkan uang. Pada skala Asia Pasifik, memajukan kesetaraan gender dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US\$ 4,5 triliun di tahun 2025. Ditegaskan, dengan memajukan kesetaraan gender di Indonesia bisa menambah PDB hingga US\$ 135 miliar pada 2025.

Jadi, jika perempuan ditarik kembali ke rumah, jelas mengancam pundi-pundi rupiah. Sebab, kontribusi perempuan pekerja kini mencapai 50 persen. "Nanti kontribusi pekerja perempuan semakin turun lagi," tutur Ketua Divisi Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Endah Lismartini (*bisnis.com*).

Materialistis

Begitulah cara pandang kapitalis yang materialistis. Mereka hanya peduli dengan keuntungan sebesar-besarnya yang disumbangkan oleh keringat perempuan. Memeras tenaga perempuan untuk meraup keuntungan. Alih-alih memikirkan dampak keluarga mereka saat perempuan bekerja, yang ada mendorong perempuan pada jurang depresi karena tanggung jawab ganda. Sesuai fitrahnya, tak ada perempuan pekerja yang mampu benar-benar 100 persen melepas tugas kerumahtanggaan saat ia berkiprah di ruang publik.

Padahal, pendapatan perempuan di ruang publik, banyak yang tidak sebanding dengan pengorbanan yang mereka keluarkan. Keringat perempuan dibayar murah, sementara mereka harus

menanggung mahal risiko keretakan rumah tangga. Misal, perempuan yang terlampau lelah bekerja sehingga sulit melayani suami. Akibatnya suami selingkuh dan perempuan terpaksa menanggung luka. Siapakah yang mengobatinya? Gaji yang didapatkan tak mampu menyembuhkan patah hatinya.

Belum lagi kesibukannya di luar rumah, harus ditukar mahal dengan hilangnya waktu-waktu *bonding* bersama anak-anak. Ketika anak remaja atau dewasa mengabaikan ibunya, tidak erat hubungannya, siapakah yang membayar itu semua? Belum lagi jika anak-anaknya tumbuh menjadi generasi rusak yang menjadi sampah masyarakat, ibu yang kerap dituding penyebabnya. Materi yang didapat tak bisa mengembalikan anaknya ke jalur yang benar.

Karena itu, mengejar kesetaraan gender, sampai kapan pun akan sulit. Ibarat fatamorgana, laki-laki dan perempuan mustahil setara. Sebenarnya, hal inipun secara tidak langsung diakui sendiri oleh para pegiatnya. Misal, berdasarkan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs) yang dikembangkan oleh UN Women dan UN Global Compact, kesenjangan gender baru dapat ditutup dalam 108 tahun.

Keluarga Unggul

RUU Ketahanan Keluarga digadang-gadang sebagai pondasi untuk membangun keluarga unggul menuju Indonesia maju. Semua mengakui, keluarga adalah elemen terkecil masyarakat tempat terbaik lahirnya generasi. Namun, anehnya banyak yang tidak peduli terhadap ketahanan keluarga. Kalaupun menunjukkan kepedulian, namun tidak fundamental menyelesaikan akar persoalan keluarga.

Padahal, keluarga bertanggung jawab atas tingginya angka perceraian, banyaknya kriminalitas hingga rendahnya moral remaja. Hal ini karena pondasi dalam berkeluarga kian rapuh. Di samping faktor lingkungan sosial dan penerapan sistem oleh negara.

Sementara itu, pengusung RUU Ketahanan Keluarga berargumen, aturan ini penting untuk mengatasi fenomena disharmoni keluarga di Indonesia. Menjadi alternatif pemecahan berbagai persoalan sosial yang dihadapi dalam lingkup keluarga. "Fakta sosial kita menunjukkan betapa rapuhnya kondisi objektif saat ini dalam dunia perkawinan. Tingkat perceraian rata-rata di tingkat kabupaten/kota tidak kurang dari 150-300 per bulan," kata Ali Taher (*bisnis.com*, 20/2).

Perceraian, menimbulkan persoalan pada hak asuh dan masa depan anak. Ali Taher menjelaskan penyebab utama keretakan rumah tangga tersebut adalah persoalan ekonomi seperti banyak pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, negara tidak mengatur hubungan keluarga dalam konteks privat, namun akibat dari permasalahan yang dihadapi dalam konteks kekerasan maka perlu diselesaikan.

Pondasi Keluarga

Setidaknya, ada beberapa pilar yang harus dibentuk untuk menciptakan keluarga yang kuat. *Pertama*, pondasi agama. Keluarga dibentuk oleh pernikahan yang sah. Melalui jalan yang sah pula. Keluarga harus dibangun berlandaskan agama. Diniatkan untuk ibadah. Ini harus menjadi titik tekan. Keluarga Muslim menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan sekaligus arahan dalam mencapai tujuan.

Keluarga disebut tahan dan kuat, jika setiap anggota keluarga taat dalam agama. Berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam dalam menjalani kehidupan. Suami menjalankan peran sesuai kewajibannya dalam Islam, demikian pula istri. Pola asuh dan pendidikan juga diatur oleh syariat Islam, bukan yang lain.

Ketika menghadapi masalah dan ujian, keluarga harus menjadikan Islam sebagai rujukan pemecahannya. Tidak mudah stres. Tidak putus asa. Tercipta suasana keimanan, yang membentuk seluruh anggotanya menjadi pribadi bersyakhshiyah Islamiyah atau berkepribadian Islam.

Kedua, pondasi ekonomi. Banyak keluarga yang bercerai berai karena faktor ekonomi. Keluarga Muslim, hendaknya berjuang bersama-sama, baik suami maupun istri dalam mewujudkan ketahanan ekonomi ini. Sebab, ada kalanya ujian datang karena faktor materi. Misal, ketika suami memiliki kelemahan dalam nafkah, disebabkan situasi dan kondisi yang tidak ramah keluarga. Gaji kecil tak memenuhi standar, sakit permanen, terkena PHK, bisnis yang gagal atau tertimpa musibah yang tak diundang. Sementara, kebutuhan hidup begitu banyak dan beragam.

Keluarga yang tahan ekonominya, memiliki kemandirian tanpa bergantung pada pihak lain. Oleh karena itu, setiap keluarga, khususnya suami harus berupaya maksimal dan kreatif menggali sumber pendapatan.

Rasul bersabda: "Seseorang yang

membawa tambang, lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar kemudian membawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang diberi dan kadang ditolak (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketiga, pondasi pendidikan. Keluarga yang tahan banting adalah keluarga yang tak berhenti tumbuh. Termasuk dalam keilmuan. Pendidikan menjadi pondasi penting, sebab dengan tingginya derajat berpikir, menjadikan keluarga lebih jernih dalam menyikapi sebuah persoalan.

Pendidikan di sini bukan sekolah formal, tetapi menuntut ilmu di ranah informal. Seperti kajian keislaman, belajar *skill* rumah tangga, ilmu-ilmu parenting, ilmu bisnis dan ilmu alat lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Sebab, tanpa ilmu, akan buta arah.

Keempat, budaya. Keluarga memiliki kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dilestarikan dan dibiasakan. Dipegang teguh dan ditularkan kepada seluruh anggota keluarga. Jangan terpengaruh oleh budaya luar yang menyesatkan. Saat ini, gempuran budaya asing menggerus kebaikan-kebaikan dalam keluarga. Seperti hilangnya moral, adab dan akhlak mulia.

Terpengaruh globalisasi yang menawarkan gaya hidup bebas. Masyarakat cenderung hedonis dan permisif. Wajib bagi keluarga Muslim melawan tantangan yang masif dari lingkungan luar. Termasuk, melawan sistem sekuler kapitalisme yang merusak kehidupan sosial, termasuk merusak bangunan keluarga.

Tak Butuh Kesetaraan

Ketahanan keluarga yang kokoh, tidak hanya bergantung pada keluarga itu sendiri. Juga, tergantung pada lingkungan atau sistem hidup yang menaungi. Profil keluarga Muslim, menjadi tidak khas ketika hidup di sistem sekuler. Keberadaan keluarga-keluarga sebagai elemen terkecil dari masyarakat, membutuhkan kehadiran negara untuk mengaturnya. Butuh dukungan sistem untuk mewujudkannya.

Karena itu, penting mengatur keluarga. Namun, aturan berbasis sekuler tidak cukup. Apalagi jika berbasis kesetaraan dan keadilan gender, ini menyesatkan. Jika serius membangun ketahanan keluarga, campakkan sistem sekuler dan ganti dengan sistem Islam kaffah.[] **kholda**

Jangan Depresi Saat Pandemi

Pandemi virus corona belum jelas akan berakhir kapan. Saatnya keluarga-keluarga *stay at home*. Suami terpaksa *work at home*. Anak-anak terpaksa *learn at home*. Ibu-ibu terpaksa *standby at kitchen*.

Tentu saja muncul rasa bosan dengan aktivitas yang cenderung monoton. Jenuh dengan ruang gerak yang terbatas. Sebagai makhluk sosial yang biasa *mobile*, siapa tahan terkurung di rumah? Karena itu, butuh manajemen stres agar tidak berlarut-larut menjadi depresi.

Lebih baik mengambil hikmah dengan berkumpulnya keluarga di rumah. Memperkuat kembali fungsi keluarga. Mengasah kembali saling ketergantungan. Menambah tangki kasih sayang.

Tak ketinggalan, menghangatkan kembali hubungan suami-istri. Berkurangnya keluar rumah berdua, jangan malah meningkatkan frekuensi pertengkaran. Justru ini kesempatan untuk menciptakan kemesraan.

Berikut ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas jiwa anggota keluarga:

1. Muhasabah

Menguatnya perasaan akan dekatnya kematian, jangan membuat stres. Justru untuk meningkatkan ketakwaan. Perbanyak istighfar. Perbanyak dzikir. Muhasabah. Bertaubat memohon ampun dosa. Sembunyi menyiapkan amal-amal lebih baik lagi.

2. Ibadah bersama

Ini adalah momentum kompak ibadah bersama. Istri yang selama ini rindu diimami suami yang kebanyakan shalat jamaah ke masjid, kini merasakan kembali seperti yang dulu diharapkan sebelum menikah. Merasakan menjadi makmum dalam makna sebenarnya.



Demikian pula suami, menjadi momentum introspeksi agar memperbaiki bacaan Al-Qur'an dan menambah hafalannya. Menumbuhkan rasa percaya diri menjadi imam shalat. Menjadi teladan bagi anak-anaknya, khususnya anak laki-laki.

3. Bermain bersama

Jadikan momentum bersama keluarga untuk banyak-banyak menciptakan permainan bersama. Banyak bercengkerama dan bercanda, tertawa bersama.

Orang tua jangan tegang dan terlalu serius menghadapi situasi. Agar rumah tidak mencekam. Agar anak-anak tidak ikut tegang. Tetap ceria bermain bersama.

4. Menuntaskan target

Barangkali ada target-target pribadi anggota keluarga yang bisa dikerjakan di rumah. Inilah saat menuntaskannya. Seperti target hafalan anak-anak. Target suami dengan bacaan bukunya. Target istri dengan menulisnya. Demikian seterusnya.

5. Membereskan rumah

Saatnya untuk membersihkan dan membereskan

rumah. Mungkin sudah banyak sekali barang tak terpakai yang menumpuk. Sudah banyak barang-barang rusak yang tak lagi dipakai.

Misal baju-baju, sepatu, perabot rumah tangga dan kertas-kertas atau majalah yang memenuhi lemari. Padahal sudah bertahun-tahun tak pernah tersentuh. Mengeluarkannya, membuang atau memberikan pada yang membutuhkan. Ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan.

6. Turunkan standar

Berkumpul bersama, tentu membuat rumah lebih berantakan. Cucian berkali lipat. Aktivitas dapur bertambah produktif. Mainan anak berserakan. Buku-buku bertebakan.

Pengeluaran rumah tangga melonjak tajam.

Semua itu adalah sumber stres. Hadapi dengan menurunkan standar, agar level kemarahan juga turun. Misal, tidak harus hari itu juga rumah langsung bersih dan kinclong setelah seharian dipakai anak-anak. Bergotong royonglah dan tetap santai.

7. Rileks bersama

Jangan terlalu keras menuntut diri sendiri dan anggota keluarga. Jangan terlalu ketat membuat jadwal aktivitas. Tetap realistis sesuai kemampuan. Fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Rileks tanpa dikejar-kejar ambisi.

Beri kesempatan jika ingin rehat. Jadikan momentum ini untuk rileks, setelah berbulan-bulan biasa sibuk dengan urusan masing-masing.

Demikianlah yang bisa dilakukan agar menjalani karantina dengan suasana hati tetap tenang. **kholda**

Tayangan Kekerasan Berpengaruh Pada Kepribadian Anak?

KONSULTASI

Diasuh oleh:
Dra (Psi) Zulia Ilmawati



Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga yang saya hormati, beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan kejadian seorang remaja membunuh balita. Dari pengakuan pelaku, di antaranya karena sering menonton film beradegan kekerasan. Seperti yang kita tahu bersama, banyak tayangan televisi atau film melalui gawai, yang juga berbau kekerasan. Meski film anak-anak. Sebagai orang tua, saya sangat khawatir dengan perkembangan anak saya yang masih balita jika kebetulan menonton tayangan-tayangan tersebut. Sebenarnya seberapa besar bahaya tayangan kekerasan bagi kepribadian anak? Dan apa yang harus dilakukan agar anak-anak kita tidak meniru tayangan kekerasan tersebut?

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

AM-Bogor

Wa'alaikumussalam Wr Wb.

Ibu AM yang baik,
Saya bisa memahami kekhawatiran Anda. Saya kira tidak hanya Anda yang merasa khawatir terhadap pengaruh gawai atau tayangan televisi pada perkembangan anak, tetapi juga ibu-ibu yang lain. Kedua perangkat itu memang tak bisa lepas dari kehidupan kita saat ini. Gawai dan televisi menjadi media yang sangat menarik, karena dapat memadukan gambar, suara, gerakan sekaligus warna. Menonton tayangan melalui benda-benda itu tidak hanya melibatkan indera pendengaran anak saja, tetapi juga penglihatan. Begitu gencarnya tayangan untuk anak-anak, mengakibatkan sebagian anak-anak menjadi amat tergantung pada gawai atau televisi.

Ibu AM yang baik,
Seperti apa bentuk kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara dia berpikir dan berperilaku. Apa yang ada dalam pikiran anak akan membentuk sebuah pemahaman yang akan mempengaruhi perilakunya. Tayangan kekerasan merupakan informasi, yang akan membentuk maklumat anak. Manusia begitu juga anak-anak telah diberikan potensi naluri oleh Allah SWT, salah satunya adalah naluri untuk mem-

pertahankan diri. Bagaimana anak mengekspresikan sebuah kemarahan sebagai manifestasinya untuk mempertahankan diri sangat dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dia dengar. Kalau anak sering melihat tayangan yang memperlihatkan bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan kekerasan, maka secara tidak langsung sesungguhnya anak sedang belajar, bahwa begitulah menyelesaikan persoalan. Sehingga menjadi hal yang lumrah jika kemudian anak memiliki temperamen yang keras, mudah marah, ekspresif untuk persoalan-persoalan yang mungkin sangat sepele.

Ibu AM yang baik,
Dari berbagai kemungkinan masalah yang bisa timbul akibat tayangan-tayangan tersebut, peran orang tua tidak bisa diabaikan. Sikap orang tua terhadap gawai dan televisi akan mempengaruhi perilaku anak. Maka, sebaiknya orang tua lebih dulu membuat batasan pada dirinya sebelum menentukan batasan bagi anak-anaknya. Biasanya, di kala lelah atau bosan dengan kegiatan rumah, orang tua suka menonton televisi atau membuka gawai. Cobalah ganti dengan melakukan kegiatan lain, sehingga anak akan tahu ada banyak cara beraktivitas selain kedua aktivitas itu.

Ibu AM yang baik,
Usahakan kedua benda itu hanya menjadi bagian kecil dari kehidupan anak. Tetapkan apa, kapan, dan seberapa banyak yang boleh dan bisa ditonton. Tujuannya, agar anak menjadikan kegiatan menonton hanya sebagai pilihan, bukan kebiasaan. Ia menonton hanya bila perlu. Pertimbangkan jenis program yang bisa ditonton anak. Kadang ada acara yang bagus karena memberi pesan tertentu, tetapi di dalamnya ada bahasa yang kasar atau adegan kekerasan. Sebaiknya orang tua tahu isi acara yang akan ditonton anak. Usia anak dan kedewasaan mereka harus jadi pertimbangan pula. Masalah bahasa pun perlu diperhatikan agar anak tahu mengapa suatu kata kurang sopan untuk ditiru. Jadi tontonlah dahulu tayangan yang akan ditonton oleh anak-anak. Dampingi mereka ketika sedang menonton, agar jangan sampai ada adegan yang merusak akhlak dan aqidah dilihat oleh anak Anda. Bagaimana pun juga tayangan-tayangan melalui gawai atau televisi adalah satu media yang sangat luar biasa pengaruhnya bagi pertumbuhan anak-anak kita.[]

Hukum Menjualbelikan Hand Sanitizer yang Mengandung Alkohol

Diasuh Oleh: **Ustaz M Shiddiq Al Jawi**



Tanya:

Ustaz, bolehkah menjualbelikan hand sanitizer yang mengandung alkohol dalam situasi wabah Covid-19 saat ini? (Abdurrahman, Yogyakarta)

Jawab:

Boleh hukumnya menjualbelikan hand sanitizer yang mengandung alkohol, selama untuk keperluan pengobatan (*at tadâwi*). Yang lebih baik, menjualbelikan hand sanitizer yang tak beralkohol. Namun disyaratkan, harga jualnya wajib sesuai dengan harga wajar di pasar, yakni tidak boleh memanfaatkan situasi wabah Covid-19 ini dengan menjualbelikan hand sanitizer, atau barang-barang lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti masker, obat-obatan, dengan harga yang berlipat ganda.

Mengenai bolehnya menjualbelikan hand sanitizer yang beralkohol, dalilnya hadits Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala jika telah mengharamkan sesuatu, maka Allah telah mengharamkan harganya." (*innallâha ta'âla idzâ harrama syai'an*

harrama tsamanahu). (HR Ad Dâraquthni, *Sunan Ad Dâraquthni*, 3/7; Abu Dawud, no. 3490; Ahmad, 1/293; Al Thabrâni, *Al Mu'jam Al Kabîr*, no. 12378. Redaksi menurut Imam Ad Dâraquthni. Hadits sahih).

Hadits itu menunjukkan bahwa apa saja yang telah diharamkan oleh Allah SWT, seperti khamr, babi, bangkai, patung, buku-buku yang mengajarkan kekufuran, kemusyrikan, atau sihir; juga alat-alat musik yang diharamkan, dan sebagainya, maka menjualbelikannya haram. (Ibnu Rajab Al Hanbali, *Jâmi' Al Ulûm wa Al Hikam*, 11/447-449).

Dari hadits tersebut dapat ditarik *mafhûm mukhalâfah* (pengertian sebaliknya), yaitu jika suatu benda tidak diharamkan oleh Allah, maka menjualbelikannya hukumnya boleh. (Taqiyuddin An Nabhâni, *Al Syakhshiyah Al Islâmiyyah*, 3/192; *Mafhûm Al Syarath*).

Padahal hand sanitizer beralkohol itu walaupun mengandung alkohol yang najis, menggunakannya tidak haram, melainkan makruh, selama untuk keperluan pengobatan (*at tadâwi*). Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Taqiyuddin An Nabhani. Dalilnya, meski Rasulullah SAW melarang berobat dengan yang haram (HR Abu Dawud, no. 3876), namun ada petunjuk (*qarînah*) bahwa larangan itu adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Petunjuk itu berupa izin dari Rasulullah SAW kepada suku 'Ukl dan 'Urainah yang sakit di Madinah saat itu untuk berobat dengan meminum air kencing unta. Padahal air kencing unta itu zat yang najis. (HR. Bukhari, no 231). (Taqiyuddin An

Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islâmiyyah*, 3/116).

Hanya saja, yang lebih baik adalah menjualbelikan hand sanitizer yang tak beralkohol, karena Islam mengajarkan *ihtiyâth* (berhati-hati) dan bersikap *wara'*, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Seorang hamba Allah tidak akan mencapai derajat orang yang bertaqwa hingga dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada dosanya lantaran khawatir di situ ada dosanya." (HR Tirmidzi, no.2568; dan Al Hakim, no.7899).

Disyaratkan harga jual hand sanitizer wajib sesuai dengan harga pasar. Tidak boleh memanfaatkan wabah virus Corona saat ini sehingga masyarakat terpaksa membelinya dengan harga berlipat ganda. Jual beli seperti ini disebut *bai' al mudhtar*, yaitu jual beli oleh orang yang terpaksa yang terjadi saat terjadi suatu krisis atau bencana. Misalnya, menjual beras dengan harga berlipat ganda saat bencana kelaparan, menjual air bersih dengan harga berlipat ganda saat bencana banjir, dsb.

Islam telah mengharamkan *bai' al mudhtar* ini. Dari 'Ali bin AbiThalib ra, bahwa, "Rasulullah SAW telah melarang *bai' gharar* (jual beli yang mengandung ketidakpastian), *bai' al mudhtar* (jual beli oleh orang yang terpaksa), dan jual beli buah sebelum dapat dipanen." (HR Ahmad & Abu Dawud; hadits sahih menurut Imam Jalaluddin Suyuthi. *Al Jâmi' Al Shaghîr*, 2/192). *Wallahu a'lam*.[]

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

MediaUmat
mediaumat.news | Memberjuangkan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :

Alamat Pengiriman 1 :

Alamat Pengiriman 2 :

Telpon/ No. Hp-WA :

Jumlah Langganan : eksemplar

Dikirim Mulai edisi :

Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks



Oleh: **Taufik S. Permana**, Direktur Geopolitical Institute

Antara *Nation State* dengan *Khilafah State*

Konsep negara bangsa (*nation state*) mendapat sejumlah kritikan. Konsep ini mulai disadari banyak orang tidak kompatibel menjawab problem kekinian. Sementara sistem khilafah makin diminati banyak orang. Jika ditelaah, terdapat perbedaan tajam antara negara khilafah dengan *nation state* dalam banyak segi.

Sejumlah perbedaan tajam negara-bangsa dengan negara khilafah. Dari segi dasar negara, dasar negara *nation state* bisa berupa sekularisme, bisa juga yang lainnya, seperti sosialisme atau marxisme. Ini karena nasionalisme adalah ide kosong yang bisa dikawinkan dengan ide apa pun dari sumber mana pun. Sebaliknya, dasar negara khilafah adalah akidah Islam saja.

Dari segi ikatan, juga ada perbedaan. Dalam *nation state*, ikatannya adalah ikatan kebangsaan. Dalam khilafah, ikatannya adalah akidah Islam.

Dari segi kepentingan tertinggi, *nation state* mengenal apa yang disebut "kepentingan nasional" yang dirumuskan oleh elite politiknya, baik kepentingan dalam negeri maupun kepentingan luar negeri. Dalam Khilafah, kepentingan tertinggi adalah kepentingan umat (*mashalih al-ummah*), yang tunduk kepada syaria Islam.

Secara garis besar kepentingan umat tercermin dalam dua hal. *Pertama*, penerapan syaria Islam dalam segala bidang kehidupan (politik dalam negeri). *Kedua*, penyebaran dakwah Islam ke luar negeri dengan jihad fi sabilillah

(politik luar negeri).

Dari segi batas wilayah, *nation state* akan memiliki batas teritori yang tetap. Adapun batas wilayah khilafah tidak tetap, melainkan akan terus meluas seiring dengan politik luar negerinya, yaitu penyebaran dakwah Islam dengan jalan jihad fi sabilillah (M. Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyyah*, II/42-44).

Dari segi sistem hukum, *nation state* juga berbeda dengan Khilafah. Dalam *nation state*, sistem hukumnya adalah hukum nasional, yang bisa jadi berupa macam-macam sistem hukum yang dicampur-aduk menjadi satu.

Kalaupun ada satu sistem hukum, tidak pernah menjadikan hukum Islam (syaria) sebagai sistem hukum tunggal. Di Indonesia, misalkan, berlaku tiga sistem hukum: hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam. Dalam Khilafah, sistem hukumnya hanyalah syaria Islam, tidak ada yang lain.

Dari segi bendera dan bahasa, *nation state* akan mempunyai bendera dan bahasa nasional masing-masing. Dalam khilafah, bendera dan bahasa resminya hanya satu, yaitu bendera dan bahasa yang telah ditetapkan syaria dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Benderanya berupa bendera Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu Liwa' dan Rayah. Liwa' adalah bendera berwarna putih dengan tulisan hitam yang berbunyi: "*La ilaha illallah Muhammadur Rasulallah*". Rayah adalah bendera berwarna hitam dengan tulisan putih yang berbu-

nyu: "*La ilaha illallah Muhammadur Rasulallah*". (Lihat: Abdul Hayyi al-Kattani, *At-Taratib al-Idariyah*).

Bahasa resmi negara khilafah juga hanya satu, yaitu bahasa Arab, yang diberlakukan dalam bidang pemerintahan, pendidikan dan urusan negara lainnya, seperti diplomasi dan dakwah ke luar negeri. Namun, ini bukan berarti haram hukumnya menggunakan bahasa lokal antar individu rakyat (Lihat: Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustur*).

Berbeda dengan konsep *nation state*, dalam konsep Islam, warga negara khilafah yang non-Muslim disebut sebagai kafir dzimmi. Istilah dzimmi berasal dari kata *dzimmah*, yang berarti "kewajiban untuk memenuhi perjanjian". Dalam Rancangan UUD Daulah Islam (Masyru' ad-Dustur pasal 5) dikatakan bahwa setiap warga negara (khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syaria.

Oleh karena itu non-Muslim yang menjadi warga khilafah mendapat perlakuan yang sama dengan warga Muslim. Tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan dzimmi. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan dan harta benda mereka. Non-Muslim atau kafir dzimmi berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan dan perlakuan baik dari Negara Islam.

Bandingkan dengan nasib kaum Muslimin di berbagai negara bangsa saat ini.[]

Omnibus Law Cika: Sengsarakan Rakyat, Langgengkan Korporasi

Oleh: **Ismawati**, Aktivis Dakwah dari Palembang

Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang saat ini diganti namanya menjadi Cika (Cipta Kerja) kian menuai kontroversi. Pasalnya, RUU ini dinilai tidak menguntungkan bagi buruh pekerja melainkan menguntungkan bagi para pengusaha.

RUU Cipta Kerja berisi 1028 halaman yang membahas berbagai hal, mulai dari peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial. Masalah ketenagakerjaan dibahas secara khusus pada Bab IV.

Beberapa Pasal dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini yang menimbulkan kontroversi dihimpun dari berbagai sumber, di antaranya:

Pertama, kemudahan dalam proses perekrutan maupun pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam draf RUU ini disebutkan perusahaan dapat merekrut dan memecat tenaga kerja dengan menggunakan sistem kontrak kerja dan *outsourcing* yang sudah dilaksanakan jauh sebelumnya. Maka, perusahaan tidak perlu membayarkan pesangon kepada pekerja yang dipecat ketika tidak memenuhi target produksi ataupun pekerja yang banyak menuntut.

Kedua, pengusaha tak lagi dipidana. Bakal ada perubahan basis hukum untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Dasar hukum yang digunakan untuk menindak para pengusaha nakal tak lagi menggunakan dasar hukum kriminal, namun administratif. Sehingga, jika terjadi pelanggaran, hukuman yang diberikan berupa denda, tak lagi sanksi pidana.

Ketiga, mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA). *Keempat*, pengaturan upah pekerja per jam, ketentuan pesangon atau bonus disesuaikan dengan

masa kerjanya. Semakin lama para buruh bekerja semakin besar pesangon yang didapat contohnya dalam RUU ini dirilis apabila memiliki masa kerja 12 tahun/lebih akan mendapatkan bonus 5x upah.

Kelima, memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per pekan. *Keenam*, menghilangkan upah bagi para pekerja yang berhalangan hadir. Seperti sakit, cuti haid, menikah, melahirkan bahkan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Islam Solusi

Sejatinya akar masalah sesungguhnya adalah sistem kapitalisme yang bercokol dalam negaralah yang membuat UU semacam ini lahir. Omnibus Law yang digadag-gadang menjadi UU "sapu jagat" dengan tujuan meningkatkan daya saing dan mendorong investasi serta diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Didalam Islam, kewajiban seorang pemimpin adalah bertanggung jawab atas rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus*" (HR Bukhari dan Ahmad).

Maka seorang Khalifah akan serius mengurus rakyatnya dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan menerapkan aturan yang menguntungkan korporasi di satu sisi, merugikan rakyat banyak di sisi lain.

Di dalam Islam, investasi tidak diperbolehkan jika dalam sektor yang menyangkut kebutuhan kepemilikan umum. Negara juga tidak membolehkan penguasaan

SDA kepada asing, karena SDA tersebut wajib dikelola negara untuk menyejahterakan rakyat.

Negara juga berkewajiban membuka lapangan pekerjaan bagi para kepala keluarga untuk mencari nafkah demi keluarganya. Jika ingin membuka usaha dan terkendala modal, negara akan memberikannya modal agar ia memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Dalam sistem pengupahan misalnya, di dalam Islam terpisah antara upah dan kebutuhan hidup. Kebutuhan dasar hidup manusia adalah tanggung jawab penguasa kepada rakyatnya. Maka dalam Khilafah kebutuhan dasar manusia akan dijamin oleh negara. Seperti sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, keamanan, hingga pendidikan.

Dalam khilafah, pengusaha tidak dipusingkan dengan UMR/UMK, demo buruh dan lain sebagainya, pengusaha cukup membayar upah sesuai dengan jasa dan manfaat pekerjaannya. Jika ada buruh yang diberi upah rendah karena kurang keahlian misalnya maka akan diberi pelatihan khusus oleh khalifah secara gratis.

Hanya dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah, karut marut permasalahan di negeri ini dapat diatasi. Masalah ketenagakerjaan adalah permasalahan krusial, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya. Sudah saatnya kembali kepada hukum Allah sebagai pemilik alam semesta, manusia dan kehidupan ini.[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.



Pidato Politik Amir Hizbut Tahrir Seruan Untuk Menolong Perjuangan Penegakan Khilafah

Kewajiban penegakan khilafah sesungguhnya bukanlah kewajiban syabab Hizb saja, tetapi kewajiban setiap orang yang mampu dari kaum Muslim.

Bulan Rajab adalah bulan kemuliaan dalam Islam. Inilah saat Rasulullah diperjalankan Allah SWT dari Masjid al Haram di Makkah al Mukarrah, singgah di

nah (pelindung).

Untuk mengingatkan kembali umat tentang peristiwa penting ini, Hizbut Tahrir kembali menggelar agenda Rajab, mengingatkan kembali umat tentang keruntuhan khilafah, pentingnya khilafah bagi umat,



Baitul Maqdis Palestina hingga mi'raj ke *sidhratul muntaha* di langit ketujuh. Perjalanan yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW, sebagai pemimpin para nabi, saat Rasulullah ditunjuk menjadi imam dalam shalat berjamaah yang diikuti para nabi dan rasul. Perjalanan yang menunjukkan Kemahabesaran Allah SWT, sekaligus ujian keimanan untuk manusia, apakah percaya atau tidak.

Dalam bulan Rajab ini pula, terjadi peristiwa menyedihkan yang menimpa umat Islam. Ketika Khilafah Islamiyah, institusi negara umat Islam, dibubarkan oleh negara imperialis Inggris melalui anteknya

dan kewajiban untuk menegakkannya kembali. Berbagai acara digelar di seluruh dunia, termasuk hal yang paling penting adalah pidato politik Amir Hizbut Tahrir, al 'alim al jalil Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah hafidzahullah, pada Senin, 28 Rajab 1441 H (23 Maret 2020).

Ada beberapa poin penting dari pidato ini yang menjadi perhatian. *Poin pertama*, mengingatkan kepada umat, apa yang dilakukan penjahat abad itu Mustafa Kamal dengan menghapuskan khilafah, bukan saja merupakan kejahatan yang besar, tapi merupakan tindakan kekufuran yang nyata dan penghapusan hukum



yang hina Mustafa Kamal. Runtuhnya institusi yang menerapkan syariah Islam secara totalitas, yang menyatukan dan melindungi umat ini, terjadi pada 28 Rajab 1342 H (3 Maret 1924). Artinya, sudah 99 tahun umat Islam, hidup tanpa khilafah. Hidup penuh dengan penderitaan tanpa *al jun-*

Islam. Karena berdasarkan hukum syara', pelakunya wajib diperangi! Ini penting agar hal ini tidak berulang kembali.

Poin Kedua, Amir Hizbut Tahrir mengingatkan kaum Muslim bahwa khilafah adalah agenda vital kaum Muslimin (*ghadiyatul muslimin al mashiriyah*). Dengan

khilafah, *hudud* bisa ditegakkan, kehormatan bisa dijaga, berbagai pembebasan (*futuhat*) bisa dilaksanakan. Dengan Khilafah Islam, kaum Muslimin menjadi mulia. Cukuplah bagi seorang Muslim merenungkan tiga perkara berikut untuk bisa memahami betapa khilafah merupakan kewajiban yang agung dan agung. Tiga perkara itu adalah:

Pertama, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam ath-Thabarani di Mu'jam al-Kabir dari 'Ashim dari Abu Shalih dari Mu'awiyah, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang mati sementara di pundaknya tidak ada baiat, dia mati laksana kematian jahiliyah". Ini merupakan dalil besarnya dosa yang terjadi pada seorang Muslim yang mampu yang tidak berjuang untuk mengadakan seorang khalifah yang di pundaknya ada

Rasyah hafidzahullah mengingatkan kepada kaum Muslim agar tidak pernah putus asa dalam perjuangan ini, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Bukankah Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan pemberian kekuasaan di muka bumi. "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa" (TQS an-Nur [24]: 55).

Demikian pula, Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kembalinya khilafah yang mengikuti manhaj kenabian setelah kekuasaan diktator yang sedang terjadi kini. "Kemudian ada khilafah yang



baiat kepada khalifah itu. Yakni ini merupakan dalil adanya khalifah yang dengan keberadaannya terpenuhi adanya baiat di pundak setiap Muslim.

Kedua, kesibukan para sahabat ra dalam menegakkan khilafah dan membaiai seorang khalifah sebelum kesibukan mereka memakamkan jenazah Rasulullah SAW. Padahal penyegeraan pemakaman mayit merupakan perkara yang dinyatakan di dalam syara'. Meski demikian, para sahabat mendahulukan baiat khalifah daripada pemakaman Rasulullah SAW. Artinya, berdasarkan ijma' sahabat ini, mengangkat khalifah di tengah-tengah umat adalah perkara yang sangat penting.

Ketiga, bahwa Umar ra pada hari wafatnya telah menjadikan jangka waktu untuk memilih khalifah dari enam orang yang diberi kabar gembira dengan surga tidak lebih dari tiga hari. Maka itu merupakan ijmak para sahabat bahwa tidak boleh kaum Muslim kosong dari khalifah lebih dari tiga hari dengan malam-malamnya. Sementara kita telah berlalu atas kita "banyak tiga hari" dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

Al 'alim al jalil Atha' bin Khalil Abu ar-

mengikuti manhaj kenabian." (HR Ahmad dari Hudzaifah bin al-Yaman ra).

Terakhir, Amir Hizbut Tahrir mengingatkan bahwa kewajiban penegakan khilafah sesungguhnya bukanlah kewajiban syabab Hizb saja, tetapi kewajiban setiap orang yang mampu dari kaum Muslim. Karena Hizbut Tahrir menyerukan seluruh komponen umat terutama para tentara yang memiliki kekuatan yang nyata, berjuang bersama membantu Hizbut Tahrir.

Menolong agama Allah dan menegakkan al-Khilafah memiliki pahala yang agung dan keutamaan yang mulia, hingga para malaikat mengusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, penghulu kaum Anshar radhiyallah 'anhu, sebagaimana yang ada di al-Mustadrak 'alâ ash-Shahihayn karya Imam al-Hakim dikarenakan keagungan menolong agama Allah. Dan paling akhir, sesungguhnya orang yang menolong perjuangan untuk menegakkan khilafah sebelum ditegakkan, pahalanya lebih besar dan lebih agung dari orang yang menolong khilafah setelah tegaknya.[] **af**

Peran Penting Wakaf di Era Khilafah Utsmani

Wakaf merupakan salah satu amal shalih dalam Islam yang berperan penting dalam tatanan ekonomi dan sosial di era Khilafah Utsmani. Meskipun bukan satu-satunya, keberadaan wakaf banyak membantu perekonomian sejarah kekhilafahan.



■ Wakaf dari Sultan di Bursa.

Wakaf digunakan untuk membantu operasional lembaga-lembaga pendidikan, rumah ibadah, hingga membantu orang-orang miskin. Pada era kekhilafahan, wakaf tidak hanya dikelola dan didistribusikan untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.

Ibadah wakaf dicontohkan oleh Umar bin Khatthab. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Umar bin Khatthab berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah yang ada di Khaibar (sekitar kota Madinah) itu dengan pengertian tak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Umar bin Khatthab kemudian menyedekahkan hasil tanah itu kepada



■ Wakaf dari Sultan Bayezid II di Edirne.

fakir miskin, kerabat serta digunakan pula untuk memerdekakan budak, kepentingan di jalan Allah SWT, orang telantar dan tamu.

Pada abad ke-19 untuk menangani persoalan wakaf, pemerintahan Utsmani telah membentuk kabinet khusus untuk menangani masalah wakaf. Undang-undang Perwakafan pernah dikeluarkan oleh pemerintahan Utsmani pada 29 November 1863.

Di era Khilafah Utsmani, badan-badan wakaf didirikan oleh para sultan, anggota keluarga mereka dan wazir, para gubernur. Khalifah atau Sultan sendiri memiliki lahan pertanian yang luas, beragam *real estate*. Dari hasil tanah wakaf ini digunakan untuk membantu pelayanan sosial, pendidikan dan keagamaan.

Kayhan Orbay dari Turkish Cultural Foundation Fellow dan pernah menjadi pengajar Department of Türkologie, Vienna University, Austria, menyebutkan Wakaf Kekhilafahan Utsmani berfungsi sebagai institusi redistribusi. Mengumpulkan penghasilan dari tanah wakaf di berbagai daerah kemudian menyalurkan ke perekonomian kota. Kemudian didistribusikan kembali melalui pembelian makanan dan bahan untuk memenuhi layanan amal, pemeliharaan bangunan wakaf, dan gaji karyawan pengurus wakaf. Salah satu kompleks wakaf besar Süleymaniye di Istanbul mempekerjakan lebih dari 700 orang di berbagai jenis pekerjaan kantor. Para keluarga pekerja wakaf, mata pencaharian ribuan orang bergantung pada wakaf Süleymaniye.

Dari wakaf kekhilafah Utsmani ini digunakan membantu layanan pendidikan dengan membangun sekolah dasar dan sekolah pendidikan tinggi. Kompleks wakaf Süleymaniye memiliki sekolah dasar, lima sekolah pendidikan tinggi keagamaan



■ Wakaf dari Sultan Bayezid II di Amasya.

(teologi), dan satu sekolah kedokteran.

Kota Amasya di Anatolia tengah terkenal dengan sejumlah pusat pendidikan tinggi di kota itu. Keberlangsungan perguruan tinggi itu tidak bisa dilepaskan dari wakaf dari Sultan Bayezid II. Wakaf digunakan untuk pengelolaan masjid besar, dapur umum, pusat pendidikan tinggi dan sekolah dasar. Dari wakaf Sultan Bayezid II disajikan makanan dan tunjangan bulanan untuk para siswa. Sementara di Edirne wakaf dari sultan Murad dan Bayezid II digunakan untuk membangun dan mengoperasikan rumah sakit yang merawat pasien secara gratis.

Wakaf dari Khilafah juga digunakan untuk dapur umum yang disebut imaret yang memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Bursa, ibu kota pertama negara Khilafah Utsmani adalah kota wakaf dari sultan. Digunakan untuk mengembangkan kota, mendukung urbanisasi dan mendukung kehidupan ekonomi dan komersial di kota.

Peninggalan wakaf yang terkenal lainnya adalah transportasi publik Hejaz Railway. Kereta yang menghubungkan Istanbul, Damaskus dan Madinah. Ini merupakan salah satu pengembangan wakaf terbesar pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang selesai dibangun pada tahun 1908. Kereta ini masih bekerja hingga terjadi perang dunia I. Jalur kereta ini kemudian dihancurkan Inggris untuk melemahkan Khilafah Utsmani. [af]

KRONIK MANCANEGERA

Lockdown, Kehidupan Warga Gaza Selama 14 Tahun

Di tengah isolasi dan karantina wilayah yang sedang diterapkan sejumlah negara karena wabah corona, suara-suara getir datang dari Jalur Gaza. Masyarakat di sana diketahui telah hidup di bawah blokade Israel selama 14 tahun.

"Apakah Anda bosan dengan karantina Anda, penutupan perbatasan Anda, bandara Anda, perdagangan Anda? Kami di Gaza telah menjalani ini selama 14 tahun. Oh dunia, selamat datang di realitas permanen kami," kata salah seorang pengguna media sosial di Gaza seperti diberitakan *Reuters* dan dikutip *republika.co.id*, Ahad (22/3/2020).

Warga Gaza juga telah terbiasa bekerja jarak jauh dengan bantuan telekonferensi. Sebab, mereka tak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar negeri. [j]

Daftar Pejabat Dunia yang Positif Corona

Pasien virus corona terus bertambah, dan ikut menyeret sejumlah nama petinggi negara. Terbaru, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dinyatakan positif tertular corona. Ada yang bisa pulih, tapi ada juga yang tidak terselamatkan nyawanya. Berikut adalah daftarnya per negara yang dikutip dari *kompas.com*, Jumat (27/3/2020):

Inggris, selain Boris Johnson, virus corona juga menerpa Pangeran Charles Putra Mahkota Kerajaan Inggris, dan Menteri Kesehatan Inggris Nadine Dorries.

Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri, Bupati Karawang Cellica Nurrahadiana, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Australia, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton. **Italia**, Kepala Staf Angkatan Darat Italia, Salvatore Farina. **Perancis**, Menteri Kebudayaan Franck Riester.

Iran, cukup banyak petinggi negara Iran yang tertular virus bernama resmi SARS-CoV-2 ini di antaranya Wakil Presiden Iran Urusan Perempuan dan Keluarga Masoumeh Ebtekar, Wakil Menteri Kesehatan Iran Iraj Harirchi, Menteri Perindustrian Iran Reza Rahmani.

Sedangkan, Penasihat Menteri Luar Negeri Iran Hossein Sheikholeslam, Pembantu Pemimpin Tertinggi Iran Mohammad Mirmohammadi, dan Mantan Duta Besar Iran untuk Vatikan dan Mesir Hadi Khosroshahi tidak terselamatkan nyawanya. [j]

Kekacauan dan Kelaparan Hiasi Lockdown di India



Perdana Menteri Narendra Modi pada Selasa (24/3/2020) mengumumkan penguncian ketat (*lockdown*) 21 hari untuk menahan penyebaran virus yang kini telah membunuh 17 orang dan menginfeksi lebih dari 700 lainnya.

Namun menurut Dr. T Sundaraman, penyelenggara nasional Gerakan Kesehatan Rakyat, kemampuan India untuk menguji buruk dan pengujian yang lebih kuat akan mengungkapkan tingkat pandemi yang sebenarnya. Di samping itu, India juga kekurangan ADP dan ventilator.

Sundaraman juga menggarisbawahi bagaimana tekanan *lockdown* tampaknya tidak mengatasi tekanan penyakit.

Sundaraman mengatakan kekhawatiran terbesarnya adalah ribuan migran yang menemukan diri mereka terdampar di India ketika Modi mengumumkan penguncian dengan pemberitahuan hanya empat jam.

"Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah migrasi besar-besaran yang telah dimulai di seluruh negeri. Anda tidak bisa menghentikan angkutan umum seperti itu. Penguncian seharusnya dilakukan secara bertahap. Orang tidak boleh terlantar tanpa pendapatan, tanpa pekerjaan. Bahkan di negara otoriter, mereka akan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan negara," kata Sundaraman seperti diberitakan *Al Jazeera* dan dikutip *arramah.com*, Sabtu (28/3/2020).

Foto-foto pekerja migran berjalan ratusan kilometer atau berjejalan di dalam truk menunjukkan bagaimana pemerintah mengabaikan keadaan mereka.

Polisi juga menggunakan kekerasan terhadap migran, pedagang kaki lima dan penjual daging. Satu orang meninggal di negara bagian Benggala Barat setelah dipukuli oleh polisi karena keluar rumah untuk membeli susu selama *lockdown*. [j] *joy dari berbagai sumber*

Keutamaan Isolasi atau Karantina Wilayah dan Orang Ketika Ada Wabah

Aisyah ra Ummul Mukminin pernah bertanya kepada Rasul tentang tha'un, dan Rasul SAW bersabda: Tha'un itu merupakan azab yang Allah timpakan terhadap siapa yang Dia kehendaki dan Allah jadikan sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin. Maka tidaklah seorang hamba tha'un terjadi, lalu dia berdiam di negerinya -dalam riwayat lain oleh imam Ahmad: lalu dia berdiam di rumahnya- seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dia tahu bahwa tidak menyimpannya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuknya, kecuali untuknya semisal pahala syahid" (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Al-hafizh Ibnu Hajar al-Ashqalani di dalam *Fath al-Bâri* menjelaskan: "iqdadhâ manthû-quhu anna man ittashafa bi ash-shifât al-madzkûrah yahshulu lahu ajru asy-syâhid wa in lam yamut bi ath-thâ'un -Manthûq hadits tersebut berkonsekuensi bahwa siapa saja yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan maka dia mendapatkan pahala syahid meskipun dia tidak meninggal karena tha'un-".

Sifat-sifat yang dijelaskan dalam hadits tersebut adalah: *pertama*, yaqa'u ath-tha'un (terjadi tha'un). Ini bisa bermakna tha'un terjadi pada dirinya. Bisa juga dipahami, terjadi tha'un di negeri (wilayah)nya. Makna kedua ini menjadi kuat ketika hadits ini dikaitkan dengan hadits Usamah tentang larangan keluar dari negeri yang dilanda tha'un atau masuk ke negeri itu.

Kedua, yamkutsu fi baladihi (berdiam di negerinya) dan yamkutsu fi baitihi (tetap berdiam di rumahnya). Kedua sifat ini saling melengkapi. Tetap berdiam di

negerinya dan tidak keluar darinya, ini sesuai yang dinyatakan di dalam hadits Usamah. Sedangkan tetap berdiam di rumahnya, maka ini sesuai dengan hadits-hadits agar tidak mencampurkan yang sakit dengan yang sehat, juga hadits untuk menjauhi orang yang sakit menular, dan hadits tidak menyebabkan *dharar* kepada diri sendiri dan orang lain.

Sifat ini pada dasarnya berfaedah untuk memutuskan penularan dan penyebaran wabah. Ini yang saat ini diistilahkan *physical distancing* atau *social distancing*. Memang jika diketahui persis siapa-siapa yang sakit, merekalah yang dikarantina dengan tetap berdiam di rumahnya atau dikarantina di tempat khusus. Sementara orang yang sehat tidak perlu dikarantina. Tetapi dalam kondisi tidak bisa diketahui orang yang sehat dengan orang yang sakit, apalagi orang yang tampak sehat pun sebenarnya dia pembawa penyakit (*carier*) tanpa dia sadari, maka tetap berdiam di rumah lebih tepat untuk dilakukan oleh semua orang. Dan langkah ini akan menjadi jauh lebih efektif jika disertai tes massal dan masif untuk mengetahui siapa-siapa yang positif dengan wabah penyakit itu baik padanya terlihat gejalanya atau tidak yakni tampak sehat saja, sehingga bisa dilakukan penanganan yang tepat. Jika keduanya dikombinasikan dan dilakukan secara paralel, cepat, massal dan masif, maka rantai penularan wabah akan bisa diputus dalam waktu yang relatif cepat.

Ketiga, shâbiran wa muhtasiban, yakni bersabar dan mengharap ridha Allah. Bersabar, menurut al-hafizh Ibnu Hajar maknanya yakni tidak protes dan tidak menggerutu atas terjadinya wabah itu. Sebaliknya dia menerima dan ridha terhadap qadha' Allah SWT itu. Seraya dengan itu

mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

Keempat, ya'lamu anna lam yushibhu illâ mâ kataballâhu. Yakni pada saat melakukan semua itu diiringi keyakinan atau i'tiqad terkait qadha' Allah SWT. I'tiqad ini juga dinyatakan di dalam banyak ayat al-Quran dan hadits.

Seorang Muslim yang memiliki keempat sifat itu maka dia mendapat pahala seperti pahala syahid. Dan dari mafhum hadits di atas, siapa yang tidak memiliki sifat-sifat itu, semisal pahala syahid bisa luput darinya. Jadi jika orang itu menggerutu dan tidak ridha dengan qadha' Allah terhadapnya, atau dia malah pergi dari negerinya atau berkeliaran keluar dari rumahnya tanpa keperluan penting yang mengharuskannya keluar rumah, meski dia tertimpa tha'un dan mati karenanya maka pahala yang besar itu bisa luput darinya.

Keutamaan besar ini berlaku untuk orang yang di wilayahnya sedang terjadi tha'un, berlaku atas orang yang: *pertama*, terkena tha'un dan meninggal karenanya. *Kedua*, terkena tha'un tapi tidak meninggal karenanya. *Ketiga*, tidak terkena tha'un dan meninggal selama wabah tha'un itu melanda. Dan *keempat*, tidak terkena tha'un dan tidak meninggal. Hal itu selama mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadits tersebut. Sabda Rasul SAW *mitslu ajri asy-syâhid* -semisal pahala orang yang syahid- mengisyaratkan kepada tiga golongan selain golongan pertama.

Semoga Allah SWT melindungi negeri ini dan penduduknya dan segera mencabut wabah Covid-19 serta memberi keutamaan diatas kepada siapa saja yang berhak. Wallâhu a'lam. [] **yahya abdurrahman**



PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU KHUSUS PUTRI Tahun Ajaran 2020/2021

Kami menyiapkan fasilitas sarana untuk memudahkan santri menyerap pendidikan pesantren:

- Gedung permanen untuk kegiatan belajar
- Kamar istirahat yang memadai
- Kamar mandi yang bersih
- Saung dua lantai untuk kegiatan serbaguna
- Ruang kelas yang nyaman
- Ruang aula belajar bersama
- Air minum dengan water reverse osmosis



Pendaftaran
0895 6152 20764

Format:
Ketik Daftar, Nama Ortu,
Nama Anak, Usia, Kota Domisili

* Pendaftaran via whatsapp setiap hari pukul 09:00 - 18:00

Alamat: Jl. Otista Gg. Lurah No. 2 Sasaktinggi Ciputat Tangerang Selatan 15411

ponpes.aljawahir.id
@aljawahir.id

aljawahir.id
info@aljawahir.id

0895 6152 20764
aljawahir.id/maps

LIVE ON AIR

DaktaFM

Seretan Dunia Islam



BERSAMA:

UST MUJIYANTO
(REDAKTUR MEDIA UMAT)

ACARA INI DAPAT DINIKMATI SECARA LIVE
MELALUI AUDIO STREAMING DI WWW.DAKTA.COM
SETIAP SENIN JAM 07.30-08.00 WIB

ACARA INI TERSELENGGARA ATAS KERJASAMA:



MediaUmat
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam



Ketentuan Iklan

- ☒ Materi iklan dikirimkan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum terbit ke email: **iklan.tabloidmu@gmail.com**
- ☒ Materi iklan dalam bentuk softcopy dengan format CDR/JPG/TIF resolusi 300 dpi, CMYK.
- ☒ Desain iklan menjadi tanggung jawab pihak pemasang iklan.
- ☒ Materi iklan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, serta tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan, atau merugikan nama baik pihak lain.
- ☒ Pihak pemasang bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi materi iklan tersebut.
- ☒ Pembayaran dilakukan maksimal 1 minggu sebelum terbit.
- ☒ Pembayaran di transfer ke Rekening:
BNI Syariah: 0245 8009 73 atau
BSM: 7000 5898 47
An. Budi Darmawan.

Tarif Iklan

URAIAN	UKURAN	HARGA
1 Halaman Back Cover	255 X 350 mm	Rp 16,000,000
1 Halaman Dalam	255 X 340 mm	Rp 12,000,000
½ Halaman Dalam	255 X 170 mm	Rp 8,000,000
¼ Halaman Dalam	125 X 170 mm	Rp 4,000,000
1/8 Halaman Dalam	125 X 85 mm	Rp 2,000,000
1/16 Halaman Dalam	125 X 43 mm	Rp 1,000,000
Advetorial 1 Halaman	520 X 340 mm	Rp 11,000,000
Center Spread (2 Halaman)	520 X 340 mm	Rp 36,000,000

**DAPATKAN
DISCOUNT
SPECIAL**

Informasi :
0857.1713.5759



Terima Kasih

**Kami Ucapkan Terima Kasih kepada
980 Peserta Survey Tabloid Media Umat
Tahun 2020**

**Semoga pendapat, kritik dan saran yang
diberikan menjadikan Tabloid Media Umat
kian lebih baik.**

Berikut daftar peserta Survey yang beruntung mendapatkan hadiah @Rp.500.000,-

Suwanto	0819.5289.6XXX	Banjarbaru, Kalimantan selatan
Meto Elfath	0853.9412.2XXX	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
Bella Novianti	0852.7334.6XXX	Koba, Bangka Tengah
Taufik Hidayat	0856.2448.0XXX	Bandung, Jawa Barat
Franciska Rahmani	0895.3688.86XXX	Malang, Jawa Timur